# Agama Tanpa Penganut

Memudarnya Nilai-nilai Moralitas dan Signifikansi Pengembangan Teologi Kritis

Abd A'la

# Agama Tanpa Penganut

# Agama Tanpa Penganut

Memudarnya Nilai-nilai Moralitas dan Signifikansi Pengembangan Teologi Kritis

Abd A'la

Penerbit Kanisius

**Agama Tanpa Penganut**

072093





Diterbitkan atas kerja sama:
IMPULSE, IAIN Sunan Ampel, dan Penerbitt-Percetakan Kanisius

PENERBIT KANISIUS (Anggota IKAPI)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Yogyakarta 55281, INDONESIA
Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
E-mail : office@kanisiusmedia.com
Website : www.kanisiusmedia.com

Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (Impulse)
E-mail : office@impulse.or.id
Website : www.impulse.or.id

| Cetakan ke- | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 |

Editor : Saiful Amin Ghofur
Desain Sampul : Marius Santo
Desain Isi : *i-nong*

**ISBN 978-979-21-2466-8**





Dicetak oleh Percetakan Kanisius Yogyakarta

# DAFTAR ISI

## BAGIAN KEDUA: PEMBACAAN KEMBALI SIMBOL DAN RITUAL AGAMA



## BAGIAN KETIGA: MEMBACA KEMBALI AGAMA: PENGEMBANGAN DEMOKRASI, DAN *CIVIL SOCIETY*

# KATA PENGANTAR

# MENUJU KEBERAGAMAAN TRANSFORMATIF

Seandainya dikatakan, sebagian besar umat beragama saat ini sudah meninggalkan agamanya, nyaris dipastikan atau kemungkinan besar mereka –kendati tidak semuanya –akan marah besar. Secara sepintas pernyataan semacam itu bisa dianggap provokatif. Namun jika melihat realitas yang ada, kita akan menyaksikan sesuatu yang bisa membenarkan ungkapan tersebut. Hal ini dapat dilacak dari keberadaan umat beragama yang menjalani kehidupan mereka dalam beragam paradoks. Misalnya dalam perspektif Islam, umat Islam merupakan wakil Tuhan di alam dunia ini yang diberi amanah untuk "memakmurkan" kehidupan. Mereka ditugaskan mengelola dan mengolah alam, membangun, serta melestarikan kehidupan menuju kesejahteraan paripurna, dan holistik bagi segenap penghuninya. Dalam perspektif yang lebih luas, semua penganut agama –berdasarkan ajaran agama masing-masing –dituntut untuk melabuhkan ajaran agama mereka yang pada prinsipnya bersifat moral. Moralitas luhur harus menjadi pijakan kokoh mereka dalam merajut dan mengembangkan kehidupan dalam semua aspeknya.

Menyikapi tuntutan agama tersebut, mereka tampaknya menyanggupi untuk melaksanakannya yang diejawantahkan melalui ritual dan seremonial keagamaan yang mereka laksanakan dari saat ke saat. Namun pada sisi ini paradoks itu mulai muncul. Mereka

tekun menjalankan ritual dan seremonial keagamaan, tapi pada saat yang sama mereka juga rajin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika dan moral. Sebagian mereka melakukan kebejatan yang pertentangannya mungkin "hanya" samar dan tipis dengan nilai-nilai agama; dan sebagian yang lain justru menyebarkan *munkarat* yang secara tegas berdiri diametral dengan etik dan akhlak agama. Pada umumnya, tindakan-tindakan amoral itu berada dalam tataran ranah publik, atau bersifat dosa sosial.

Keterkelupasan keberagamaan dari nilai moral agama tersebut tampak jelas ketika agama sekadar dijadikan alat legitimasi untuk kepentingan subyektif yang sempit dan pragmatis. Politik merupakan ranah yang begitu sering memerlukan agama untuk dibiaskan menjadi pembenar bagi syahwat-syahwat kekuasaan yang mengeram di balik politik tersebut. Kondisi ini terpapar secara kasat mata dari sikap dan perilaku (mayoritas?) kaum politisi yang menggunakan simbol-simbol agama untuk sekadar meraih atau memperteguh kekuasaan bagi mereka dan kelompoknya. Seiring itu, dengan penggunaan attribut-atribut keagamaan itu, mereka melakukan *othering* terhadap saingan mereka, baik yang seagama, apalagi yang berbeda agama. Dalam kondisi ini, tuduhan dan fitnah –yang tentunya berseberangan dengan nilai agama apa pun, bahkan dengan nilai kemanusiaan universal –menjadi menyatu dengan simbol agama yang mereka gunakan. Ironisnya, kendati realitas menunjukkan kesia-siaan memperalat agama dalam dunia politik, para politisi, penguasa atau lainnya tidak jera-jera, bahkan kian menguat dari saat ke saat, untuk melakukannya. Manakala mereka berkuasa, mereka terus menggerogoti nilai-nilai agama. Mereka tetap membiarkan –implisit atau eksplisit –perilaku bejat yang mengotori kehidupan, dari korupsi, ketidak-adilan, hingga konflik-berdarah. Bahkan bisa-bisa mereka termasuk pelaku atau punyai kaitan dengan perilaku biadab itu.

Selain dunia politik, ranah sosial dan lainnya juga tidak luput dari rembesan reduksi agama. Fenomena di sekitar kita menghadirkan foto diri umat beragama yang merepresentasikan secara utuh merebaknya –minimal kecenderungan –keberagamaan semacam itu. Meskipun temanya sama, yaitu pembiasan dan reduksi agama, gambar hidup itu sangat beragam *bak* pameran foto yang mempertontonkan tingkah polah umat beragama yang hadir dengan bedak tebal dan penuh dengan aksesoris agama, tapi badan mereka kudisan atau terkena penyakit yang lebih parah. Ambil satu contoh, mereka menghelat upacara keagamaan besar-besaran. Namun nuansa kesejukan, kelembutan, dan kesyahduan yang mencerminkan kehadiran sifat-sifat Tuhan sama sekali tidak terasa. Justru acara semacam itu disarati dengan kegiatan yang sering mengotori, merusak, atau mengganggu lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pola keberagamaan sejenis itu yang dicoba diangkat dalam buku ini. Religiusitas yang tanpa roh agama itu merupakan fenomena atau bahkan realitas yang nyaris menyatu dengan kehidupan umat beragama di hampir seluruh belahan dunia. Tentunya pola dan perwujudannya bisa ada perbedaan antara satu wilayah dan wilayah lain, antara satu penganut dan penganut agama yang lain. Namun terlepas dari perbedaan itu, ada benang merah yang merajut kuat yang menjadikannya sebagai satu jalinan; rangkaian keberagamaan yang cenderung meminggirkan sifat-sifat Tuhan dan moral ajaran agama yang prinsip.

Berdasar pada kenyataan itu, buku ini mencoba mengajak kepada setiap penganut agama untuk kembali kepada suatu keberagamaan yang diharapkan lebih menampakkan esensi agama itu sendiri. Sejatinya, para penganut agama sudah memiliki potensi dan modal untuk pencapaian ke arah sana. Namun hal ini seutuhnya tergantung kepada mereka.

Dalam konteks itu, buku yang berasal dari kumpulan tulisan ini dipublikasikan dan dihadirkan ke ruang publik. Melalui pembacaan yang kritis, karya ini diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keberagamaan kita –semua umat beragama –untuk menuju keberagamaan yang transformatif: keberagamaan yang dapat menyebarkan dan membumikan nilai-nilai luhur agama.

Dengan terbitnya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Penerbit Impulse dan segenap jajaran Redaksi, Editor, dan seluruh karyawan, yang semuanya berjibaku untuk penerbitan kumpulan tulisan penulis. *Matur nuwun* yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Mas Tommy, yang tanpa pertimbangan untung-rugi, tapi semata-mata komitmen untuk mengembangkan keberagamaan yang lebih mencerahkan, bersedia menerbitkan karya ini. Ungkapan terima kasih juga saya haturkan untuk Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si yang merekomendasikan penulis untuk menerbitkannya di Impulse. Terima kasih pula untuk Mas Habib yang mengenalkan penulis ke Mas Tommy, dan kepada Mbak Hany dari Impulse yang tidak bosan-bosannya selalu berkomunikasi dengan penulis.

Harapan penulis, karya ini dapat bermanfaat, minimal sebagai refleksi untuk membangun keberagamaan yang lebih berarti bagi kita dan kehidupan. Di atas semua itu, semoga karya ini mempunyai nilai –sesedikit apa pun –di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Surabaya, awal Juli 2009

aa

# BAGIAN PERTAMA:

# AGAMA TANPA PENGANUT: MEMUDARNYA NILAI-NILAI MORAL

# KEHIDUPAN KONTEMPORER DALAM TEOLOGI YANG MANDUL

Kekerasan terjadi di mana-mana. Di tingkat internasional, terorisme mencengkramkan kuku mautnya di setiap belahan bumi. Amerika Serikat (AS) pun yang dianggap negara adidaya dengan kemampuan teknologi yang canggih harus kecolongan dan menjadi bulan-bulanan "kecerdikan" kaum teroris. Akibatnya, AS menjadi berang. Bersama sekutu-sekutunya dari negara-negara maju yang "beradab", AS menyerang Afghanistan yang dianggap telah melindungi gerakan terorisme. Rakyat Afghanistan yang tidak berdusta mengerang, terhempas ke dalam penderitaan.

Di tingkat nasional, Indonesia, kekerasan terus merebak dan tidak mau berhenti. Ledakan bom, misalnya, terjadi berulang kali dari saat ke saat. Gedung Atrium Senin di kawasan ibukota telah tiga kali menjadi sasaran. Demikian pula, tawuran massa antar-kampung dan sebagainya menjadi "tontonan" yang mudah didapat diberbagai tempat. Hal itu belum ditambah lagi dengan unjuk rasa yang sering berujung dengan kerusuhan, perusakan, dan kekerasan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa, atau dari "oknum" polisi/militer yang pada awalnya hadir sebagai pengaman jalannya demonstrasi. Pada tataran yang lebih substantif-ideologis, Aceh terus bergolak. Dari bulan ke bulan, korban dari kalangan masyarakat terus berjatuhan.

Kekerasan yang dipaparkan ini hanya merupakan secuil contoh dari *seabreg* kekerasan yang ada di sekitar kita. Contoh ini diangkat hanya untuk menunjukkan betapa kekerasan telah begitu melekat pada kehidupan umat manusia. Bahkan bagi sebagian orang atau kelompok, kekerasan sudah dijadikan semacam "budaya". Mereka "menyelesaikan" hampir semua persoalan yang dihadapi dengan cara kekerasan. Ironisnya, kebiadaban ini justru berlangsung di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang sedang berada dalam perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kenyataan itu menunjukkan betapa humanitarianisme serta agama sebagai sumber nilai tidak berperan nyata dalam mengantarkan umat manusia menuju kehidupan yang lebih sejahtera, tenang, dan penuh kedamaian. Agama lalu menjadi sekadar simbol yang penuh dengan ritual-ritual formal yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kehidupan konkret. Nilai-nilai yang terdapat di balik ibadah tidak disentuh secara serius untuk diaplikasikan secara utuh dalam hidup keseharian umat.

Tillich dengan telak menyindir kenyataan itu. Ia menyatakan (sebagaimana ditulis Henderson, Jr.), gereja (agama) telah kehilangan fungsi karena nilai-nilainya tidak mampu lagi menyentuh kehidupan yang nyata. Kata-kata orang yang saleh, khotbah dan doa diucapkan berungkali tanpa makna sedikit pun, dan ungkapan para teolog tidak lagi memiliki hubungan dengan keinginan aktual masyarakat.

Fenemona seperti itu nyaris tidak banyak berbeda dalam dunia Islam. Khotbah Rasulullah (saw) pada haji *wada'* (Haji terakhir Nabi) tentang kesamaan umat manusia dan ketidakbolehan manusia melakukan kekerasan terhadap manusia yang lain tidak pernah diwujudkan secara konkret dalam kehidupan umat Islam saat ini. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam melaksanakan haji ke Mekkah, tapi kekerasan dan semacamnya terus terjadi, baik antar-sesama Muslim atau antara umat Islam dan umat yang lain.

***

Salah satu faktor ketidakmampuan agama dalam memberikan landasan bagi penciptaan kehidupan yang damai dan sejahtera terletak pada mandulnya teologi dalam menangkap perkembangan realitas kehidupan. Teologi yang berkembang saat ini masih didominasi oleh *defensive teologia* yang *theistic-oriented* dan sangat kental dengan karakter yang eksklusif. Teologi semacam itu menitikberatkan bahasannya pada upaya dan cara memperkokoh keimanan transenden semata sehingga nilai-nilai imanen yang terkandung pada aspek akidah dan ibadah dibiarkan terbengkalai. Maka keimanan yang dikembangkan dalam konstruks teologi tersebut tidak mampu menjadi *worldview* yang berfungsi sebagai landasan etika-moral bagi kehidupan umat manusia.

Dalam kondisi seperti itu, seseorang atau sejumlah penganut agama bisa saja hidup dalam simbol-simbol yang penuh agama, tapi sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan sama sekali nilai-nilai substantif agama. Amerika Serikat dapat saja mengklaim diri mereka dengan semboyan "*In God We Trust*". Demikian pula umat Islam Indonesia dapat mengklaim sebagai bangsa yang religius, sebagaimana kelompok Wahabi di Arab sana mengaku sebagai umat Islam dengan kepenganutan yang murni dan *genuine*. Namun di tingkat praksis, mereka mungkin saja melakukan suatu tindakan yang bertentangan seratus delapan puluh derajat dengan nilai dan ajaran agama mereka sendiri.

Dari belahan dunia paling barat ke belahan paling timur, kekerasan, tindakan anarkis, pembunuhan, serta penindasan dalam beragam bentuk dan cara terus berlanjut. Semua itu dilakukan justru oleh orang, kelompok, atau bangsa yang mengaku diri mereka sebagai manusia yang beragama. Hal itu terjadi karena teologi tak lebih dari sekadar *intellectual exercise* yang mementingkan aspek retorik semata.

Akibatnya teologi tidak pernah membumi dalam kehidupan nyata yang dialami umat manusia.

Bahkan lebih jauh lagi, teologi defensif membuat para penganut agama terjebak ke dalam klaim kebenaran sepihak. Mereka menganggap diri mereka dan kelompoknya yang paling benar dan baik, sedangkan orang dan kelompok lain adalah salah, bid'ah, dan sesat. Pada saat yang sama, mereka melakukan kekerasan terhadap orang dan kelompok lain dengan menggunakan dalil-dalil agama. Agama yang sebenarnya diturunkan untuk menciptakan kesejukan direduksi menjadi berwajah angker dan mencekamkan. Pada sisi itu, "agama" nyaris identik dengan alat legitimasi untuk melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap orang, kelompok agama, atau aliran yang lain.

Itulah realitas hidup kekinian. Agama memang tidak mati, tapi nilai-nilainya kian menyusut menjadi sesuatu yang mati. Agama memetamorfosis sebagai boneka pajangan dalam sebuah etalase yang tidak pernah tersentuh dan tidak boleh dijamah oleh tangan-tangan manusia.

***

Berangkat dari kenyataan itu, kita, umat manusia dewasa ini memerlukan suatu teologi kontekstual yang benar-benar membumi. Dalam perspektif Islam, sebagaimana dinyatakan Falur Rahman (1982: 155), teologi sebagai *intellectual endeavor* harus mampu memberikan ungkapan yang koheren dan keyakinan terhadap (dan sesuai dengan) (keseluruhan) apa yang terdapat dalam al-Quran sehingga orang yang beriman atau yang cenderung beriman dapat menyetujuinya dengan pikiran dan hatinya serta menjadikannya sebagai *worldview* yang dibuat tempat berlabuh bagi mental dan spiritualnya. Alhasil, nilai-

nilai monoteisme al-Quran, misalnya, akan terkait erat dengan upaya pembebasan manusia dari ketidakadilan, penindasan dan kekerasan.

Dalam bahasa yang lain, teologi hendaknya mampu membaca tanda-tanda zaman. Artinya, seperti sudut pandang Dick Hartoko (w. 2001) yang Kristiani, gereja tidak boleh terasing dari dunia. Untuk itu gereja perlu memperhatikan tanda-tanda zaman, yaitu fenomena-fenomena yang begitu umum dan acapkali terjadi sehingga dapat menjadi karakteristik untuk zaman sekarang dan menandakan kebutuhan dan harapan umat manusia pada zaman ini (lihat Sindhunata, 2001: 3). Dari itu, ketika kekerasan menjadi fenomena, teologi hendaknya memiliki kepedulian yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan itu dan akar-akar yang menimbulkannya.

Atas dasar itu, teologi dituntut untuk menjadi upaya pemahaman umat manusia terhadap ajaran dasar agama mereka masing-masing, dan menangkap nilai-nilainya yang substantif dengan mengkaitkannya dengan konteks kekinian. Upaya itu dikembangkan sebagai landasan yang kokoh bagi keseluruhan sikap dan perilaku mereka. Dengan demikian, kita memerlukan suatu reformulasi dan pengembangan lebih jauh dari teologi yang berkembang saat ini. Sebagai prinsip dasar, teologi tentunya harus dapat memberikan keteduhan iman bagi pemeluknya. Namun pada saat yang sama, teologi hendaknya mampu memberikan gambaran tentang nilai-nilai kesamaan dan perbedaan pada tiap-tiap agama, sekaligus meletakkan kesamaan dan perbedaan itu sebagai landasan untuk melakukan kerjasama di antara semua para penganut agama tanpa harus kehilangan identitas dan jati diri masing-masing. Pengembangan kerjasama tersebut diarahkan kepada pembebasan umat manusia dari segala nilai, sikap, dan perbuatan yang dehumanistik, serta menggantikannya dengan nilai-nilai yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan Yang Mahakasih, adil, penuh rahmat, dan seumpamanya.

Pengembangan teologi tersebut meniscayakan rekonstruksi pendidikan agama di berbagai tingkatan dan kebijakan implimentasinya yang harus diletakkan pada tahapan-tahapan yang jelas serta orientasi ke depan yang akurat. Melalui rekonstruksi yang menyeluruh itu, teologi diharapkan dapat memberikan keimanan yang kokoh pada umatnya, sekaligus kesejukan dan kedamaian kepada keseluruhan umat manusia. Pada gilirannya, manusia tidak lagi menjadi budak-budak sains dan teknologi, di mana tanpa pijakan etika-moral dan nilai agama yang substansial hasil peradaban manusia justru akan menjadi bumerang yang akan mengantarkan mereka kepada jurang kehancuran. Misalnya saja, mereka dengan kecanggihan teknologi atau dan atas nama agama akan saling membantai dan membunuh satu dengan yang lain.

***

# AGAMA TANPA "PENGANUT": MEMUDARNYA PRINSIP-PRINSIP MORAL DALAM KEBERAGAMAAN UMAT

Salah satu fenomena kontemporer yang dapat dilihat dengan mudah di sekitar kita adalah kian memudarnya kemaslahatan atau upaya pengembangan kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan umat manusia. Pada saat yang sama, ke*mafsadat*an atau kejahatan dalam bentuk perang, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain sebagainya kian merebak dan menjadi bagian yang nyaris lekat dengan sikap dan perilaku manusia.

Dari fenomena yang berkembang dewasa ini kekerasan tampaknya masih akan terus berlanjut. Gerald O. Barney dalam *Global 2000 Revisited: What Shall We Do* menyebutkan, meskipun perang dingin telah berakhir, senjata nuklir yang memiliki kekuatan destruktif 5.000 kali lebih besar dari semua senjata yang digunakan dalam Perang Dunia II saat ini masih berada di antara kita. Kenyataan itu masih ditambah lagi dengan teknologi yang memproduksi senjata biologis dan kimia, senjata konvensional, dan bom-bom teroris yang dapat diperoleh dengan mudah di sembarang tempat. Semua itu merupakan ancaman kekerasan sangat mengerikan yang dapat membuat kehidupan masa depan manusia sebagai neraka.

Ironisnya, penghuni dunia yang sebagian besar (86 %) merupakan umat beragama nyaris bungkam menghadapi persoalan kemanusiaan itu. Bahkan sebagian mereka justru menjadikan agama sebagai alat

untuk menabuh konflik dan melanggengkan kekerasan. Barney menemukan, belakangan ini ada empat puluh perang berkecamuk di berbagai belahan dunia dan beberapa kekerasan yang terinspirasi oleh agama.

Persoalannya kian menjadi runyam ketika orang terjebak dalam simplifikasi persoalan dengan menyalahkan agama sebagai penyebab terjadinya kekerasaan atau krisis kemanusiaan yang lain. Sebagai contoh, salah seorang penulis terkenal tentang pembangunan yang berkelanjutan –sebagaimana dikutip Barney –menyatakan, agama harus mati. Agama merupakan penyebab utama perbagai masalah sosial, ekonomi, ekologi, dan merebaknya kekerasan di dunia. Gugatan tersebut sama seperti gugatan Nietzsche yang mendeklarasikan kematian Tuhan, atau Marx yang menganggap agama sebagai candu merupakan bentuk ketidakpuasaan terhadap peran agama dalam kehidupan.

***

Atas dasar itu, persoalan yang perlu dikritisi adalah mencari kebenaran tentang hubungan merebaknya kekerasan, atau krisis kemanusiaan yang lain dengan ajaran dan nilai agama. Dari hasil penelusuran itu, penyebab kekerasan yang sebenarnya perlu dikuak untuk dicari jalan keluarnya yang tepat dan mencerahkan.

Jika kita mau jujur, agama di tingkat nilai dan ajaran sebenarnya tidak pernah mengajak umat penganutnya untuk berbuat kekerasan atau kerusakan dalam kehidupan. Dalam perspektif Islam, agama ini menjelaskan bahwa kehadiran Muhammad (saw) sebagai pembawa Islam adalah sebagai rahmat, berkah bagi sekalian alam. Misi Islam tersebut berulang kali telah diucapkan dan disebarkan ke mana-mana.

Namun realitasnya, banyak kekerasan yang terjadi dewasa ini –dan juga sebelumnya –yang justru dilakukan oleh umat yang mengaku dirinya muslim. Di sini inti masalahnya jelas bukan terletak pada ajaran Islam, tapi pada pemahaman umat Islam terhadap nilai dan ajaran agama Islam. Mereka hanya mengambil aspek-aspek tertentu dari ajaran itu, serta pada saat yang sama mereka melupakan aspek ajaran lain yang sebenarnya menjadi inti nilai Islam.

Kondisi seperti itu bisa berkembang karena pada satu pihak aspek moral dipinggirkan dari kerangka ajaran Islam, dan pada pihak lain aspek teologi atau hukum menjadi satu-satunya sumber rujukan yang harus ditoleh. Ajaran keimanan, hukum, dan moral menjadi elemen-elemen yang saling terpisah atau direduksi sedemikian rupa sehingga tidak dapat menimbulkan suatu moralitas yang kukuh dalam keberagamaan umat. Kemungkinan lain, mereka mereduksi nilai substansial Islam karena dilatarbelakangi kepentingan tertentu, seperti politik dan kekuasaan. Akibatnya, keberagamaan yang muncul ke permukaan adalah keberagamaan yang ritualistik, atau eksklusif yang tidak memiliki roh dan semangat moral keagamaan yang hakiki.

Agama dalam kepenganutan seperti itu tidak akan mampu membimbing umatnya kepada kehidupan yang sejuk, tentram, damai dan transformatif. Keberagamaan ini pada gilirannya hanya mementingkan keselamatan individu dan kelompok sendiri. Bahkan pada tingkat yang lebih parah, keselamatan yang menjadi titik perhatian adalah keselamatan akhirat yang mengabaikan sama sekali realitas kehidupan dunia. Untuk itu, pola yang dikembangkan ditekankan pada sekadar hubungan vertikal manusia dengan sang Pencipta melalui intensifikasi pelaksanaan ritual dan ajaran-ajaran formal agama semata.

Tentunya aspek ritual merupakan keniscayaan bagi setiap penganut agama. Namun keterperangkapan pada ritualisme, serta pengabaian kepada nilai-nilai yang terdapat di balik ritual merupakan

persoalan yang perlu dikritisi dan digugat. Sebab Islam mengajarkan, kepatuhan seseorang dalam melakukan ibadah ritual tidak akan pernah berdampak nyata serta positif terhadap peningkatan keimanan dan keberagamaan seseorang tanpa disertai pelaksanaan nilai-nilai moral yang terkandung dalam pesan ibadah tersebut.

Sejauh ini moralitas Islam tersebut telah memudar dari pola keberagamaan umat. Ajaran mengenai keterkaitan akidah, ritual, dan hukum pada satu sisi, dan moral pada sisi yang lain –sampai batas-batas tertentu –telah menjadi debu-debu sejarah yang tidak pernah disentuh secara serius oleh sebagian (besar) umat Islam. Islam hanya dipahami sebagai keimanan dan pelaksanaan ritual atau dan semacamnya. Umat lalu terjebak kepada simbol-simbol agama dan formalisasi dalam segala bentuknya. Karena itu, banyak umat Islam yang melakukan solat, zakat, dan haji, tapi pada saat yang sama mereka juga adalah koruptor, suka membodohi masyarakat, atau melakukan perbuatan keji yang lain. Mereka beranggapan, dengan melakukan ibadah secara intens, dosa-dosa sosial mereka akan diampuni Tuhan. Mereka tidak menyadari, dosa-dosa sosial tidak akan pernah terampuni tanpa melakukan pertobatan yang bersifat sosial pula. Demikian pula, mereka melakukan kekerasan dan perang kepada umat dari agama lain karena mereka meyakini bahwa hal itu merupakan bagian dari keimanan mereka. Mereka lupa, keimanan dalam Islam adalah keimanan yang terkait erat dengan moral, semisal keadilan, dan pluralisme.

***

Paparan sebelum ini merujuk kepada satu konklusi yang tegas bahwa moral merupakan salah satu elemen pokok agama yang tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur agama yang lain. Dalam pandangan Islam, mengabaikan aspek moral hampir dapat dikatakan sebagai

pengingkaran agama secara keseluruhan. Al-Quran dalam surat 107 (al-Ma`un) menunjukkan dengan tegas adanya keterkaitan dan interdependensi tersebut.

Berkaitan dengan aspek moral tersebut, al-Jabiri (2001) menyebutkan, dasar asasi moral Islam adalah *al-maslahah*. Nilai ini merupakan representasi dari *al-ihsan* (*performance of good deeds*) yang dapat merealisasikan *the legitimate pleasure* bagi jiwa dan raga manusia, serta juga mewujudkan *al-amal al-shaleh* yang dapat bermanfaat besar bagi manusia (dan kehidupan). Dengan demikian *al-maslahat al-am* (kepentingan dan kesejahteraan umum) menjadi tolok ukur bagi sikap dan perilaku yang harus dilakukan umat Islam. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian adalah moralitas yang harus dijunjung, sedangkan segala sesuatu yang akan merugikan, merusak, atau sekadar mengabaikan kepentingan umum merupakan sesuatu yang tidak bermoral yang harus dihindari.

Dalam konteks tersebut, tugas berat yang perlu dilakukan terletak dalam upaya meyakinkan dan melakukan penyadaran terhadap umat tentang keterkaitan keimanan dan moral, serta sekaligus mengembangkan pemahaman bahwa Islam sebagai agama terdiri dari dua unsur: aspek normatif dan aspek historis. Nilai-nilai Al-Quran dan *living* Sunnah bersifat normatif dan absolut, sedangkan perjalanan Islam dalam bentuk pemahaman umatnya dari ke masa ke masa bersifat historis dan nisbi.

Tugas para intelektual Islam untuk meyakinkan umat bahwa masalah moral merupakan nilai ajaran yang bersifat normatif, sedangkan pandangan-pandangan yang berkembang saat ini, termasuk pengentalan simbol yang tanpa semangat moral, adalah bersifat historis yang perlu dikritisi, diapresiasi, dan direkonstruksi berdasarkan cahaya nilai-nilai normatif agama yang otentik. Tanpa adanya kesadaran untuk menuju kepada pola pemahaman dan keberagamaan seperti itu, Islam akan menjadi agama yang tanpa penganut. Dalam arti, Islam

tidak dianut umatnya sebagaimana tuntutan ajaran agama Islam itu sendiri. Maka, ketika Islam mengajarkan tentang penyebaran rahmat, umatnya justru melakukan pengrusakan dan kekerasan di muka bumi. Itulah yang banyak terjadi dewasa ini. *Na'udzubillah*©.

***

# MENYOAL KEBERAGAMAAN DOMINAN

Dari saat ke saat, bangsa Indonesia terus meniti kehidupan yang penuh dengan karut-marut. Dari korupsi yang merajela, keserakahan sebagian besar para wakil rakyat, hingga menyebarnya kekerasan di tengah-tengah kehidupan. Semua itu terjadi di tengah-tengah klaim atau anggapan bangsa kita adalah bangsa yang taat beragama. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan, keberagamaan yang saat ini berkembang di masyarakat luas adalah keberagamaan simbolis. Karakter utama keberagamaan ini terletak pada pada aspek formalistik dan sejenisnya. Simbol dan ritual keagamaan dianggap sebagai nyaris satu-satunya ukuran keberagamaan seseorang. Pada saat yang sama, penganut keberagamaan ini kurang menganggap penting, atau bahkan mengabaikan nilai-nilai moralitas.

## Ritualisme-Eksibisionistik

Ada beragam bentuk keberagamaan simbolis ini. Salah satunya adalah ritualisme-sombolik. Pola ini menekankan pada sisi ritual lahiriyah, simbol dan atribut agama. Dalam bentuknya yang ekstrem, tujuan beragama para penganut agama model ini sekadar untuk mendapatkan pengakuan masyarakat bahwa mereka adalah penganut yang taat. Mereka menggunakan simbol agama dan menjalankan ritual agama untuk menutupi diri mereka yang penuh dengan kejahatan. Bahkan

sampai derajat tertentu, mereka menjalankan ritual lebih bersifat sebagai pameran.

Dalam bentuk yang moderat, mereka yang beragama dengan model ini menjalankan ajaran ritual agama sebagai upaya penebusan atas dosa-dosa mereka. Demikian pula penganut keberagamaan ini aktif melakukan kegiatan sosial karitatif. Mereka biasanya tekun melaksanakan ibadah, tapi pada saat yang sama mereka juga melakukan praktik jahat yang merugikan manusia lain. Dengan menekuni ibadah ritual, mereka berharap nanti bisa terselamatkan di akhirat.

Penganut keberagaman ini pada umumnya tidak memiliki kepeduliaan cukup memadai terhadap aspek moralitas. Bahkan sampai batas tertentu, nilai-nilai etika-moral sama sekali diabaikan. Mereka menyebut Tuhan, dan menggunakan atribut agama demi kepentingan diri sendiri yang sangat subyektif. Mereka tidak menjadikan agama sebagai sumber rujukan dan inspirasi moral dalam sikap dan perilaku keseharian mereka.

Keberagamaan ritualisme-eksibionis biasanya menjangkiti figur yang dianggap (tepatnya, diri mereka sendiri menganggap) sebagai tokoh masyarakat, elit politik, penguasa dan sebagainya. Mereka beragama lebih banyak dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, dan sekaligus mengharapkan keselamatan akhirat. Dilihat dari sisi manapun, keberagamaan mereka sangat kental dimuati pragmatisme. Sikap ini pada gilirannya menjadikan mereka –sengaja atau tidak –sering "mengelabui" atau memperalat masyarakat, bahkan Tuhan.

Dalam kenyataannya, keberagamaan ini tidak pernah berkembang sebagai gerakan melembaga sebagai suatu organisasi formal. Kemunculan dan berkembangnya religiusitas ini lebih bersifat individual sehingga antara satu dengan yang lain yang sama-sama terperangkap dalam pola keberagamaan ini tidak memiliki jaringan

atau bahkan hubungan sama sekali. Kendati demikian, hal itu menggejala kuat dalam masyarakat. Karena itu, berkembangnya pola agama yang demikian cukup mengkhawatirkan, serta akan berdampak negatif bukan hanya pada agama, tapi pada masa depan bangsa dan masyarakat. Ia akan menggrogoti nilai-nilai luhur moralitas yang sesungguhnya merupakan salah satu fondasi utama bangsa.

**Keberagamaan Simbol-Minimalis**

Selain itu, keberagamaan simbolis menampakkan diri dalam bentuk simbol-minimalis. Karakteristik utama religiusitas ini terletak pada keberadaan agama sebagai identitas diri semata. Para penganutnya menyikapi agama secara minimal dalam bentuk sekadar pengakuan terhadap agama dan Tuhan. Selebihnya, mereka tidak pernah lagi atau jarang mendekati Tuhan. Ajaran-ajaran ritual agama tidak pernah dijalankan, atau paling *banter* hanya dilakukan dalam waktu tertentu. Bagi mereka, dengan menyatakan beragama, mereka berharap Tuhan akan menyelamatkan mereka di akhirat.

Keberagamaan ini sangat sulit untuk menumbuhkan kedalaman spiritualitas dan memberikan pijakan moralitas, individual dan sosial kepada penganutnya. Mereka beragama, namun pada saat yang sama, mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai agama, bahkan merugikan orang lain dan masyarakat luas. Bahkan sebagian mereka ada yang tidak mampu membedakan agama dengan persoalan-persoalan yang bernuansa magis. Dengan demikian, mereka membuat adonan yang mencampurbaurkan kedua unsur yang bertentangan ini menjadi semacam *black religion*. Hasilnya adalah menguatnya semacam ilusi dan hayalan yang sering dijadikan pijakan untuk melakukan tindak kejahatan dalam kehidupan nyata.

Fenomena yang ada menunjukkan, kendati hanya beragama sebatas KTP, serta tidak pernah atau hanya sesekali menjalankan

ibadah-ritual, mereka (khususnya yang latar belakang pendidikannya rendah) tampak mudah sekali tersinggung jika agama mereka dilecehkan, dan mudah tersulut jika simbol-simbol agama dinodai. Untuk itu, mereka akan melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan anarkis dalam rangka "membela" agama mereka. Mereka sangat fanatik terhadap simbol agama, tapi sekaligus sangat acuh terhadap isensi ajaran agama.

Keberagamaan ini –sama seperti keberagamaan ritual-eksibisionistik –bukan bersifat gerakan struktural yang berbentuk organisasi dan sejenisnya. Namun ia dapat berubah cepat menjadi gerakan massa sesaat dalam momen-momen tertentu, manakala para penganutnya dipicu dengan isu-isu yang berbau agama. Setelah peristiwa berlalu, keberagamaan ini kembali kepada bentuknya yang semula, yang bersifat pasif.

Terlepas dari kondisinya saat menjadi keberagamaan individual atau ketika berkembang menjadi gerakan massa, agama simbolik tetap tidak memiliki perhatian terhadap persoalan nilai-nilai moral. Justru, ia menjadi persoalan bagi moral itu sendiri karena selain sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang bukan saja memandulkan peran agama, ia juga menggerus nilai-nilai moral yang diemban agama.

**Keberagamaan Fundamentalis**

Dalam konteks umat Islam, sikap kaum fundamentalis yang demikian tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemunculan mereka yang pada awalnya lebih merupakan pertahanan diri terhadap modernitas, secara umum, dan Barat secara khusus yang diyakini telah menyerang Islam dan ajarannya. Menyikapi hal itu, mereka bersikap apologis dengan menyatakan bahwa gagasan yang saat ini berkembang di Barat senyatanya jauh sebelumnya telah diinvensi dan dikembangkan umat Muslim. Pandangan ini berakibat pada terjadinya *sense of intellectual-*

*suffiency* yang sering terperangkap ke dalam arogansi moral yang sampai derajat tertentu bisa menghasilkan budaya yang jauh dari pandangan kritis dan introspektif (Lihat Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Theology of Power*, 2000).

Hal ini tampak jelas dalam pengembangan gagasan-gagasan mereka yang bersifat klaim kebenaran sepihak. Pada umumnya mereka menganggap bahwa pandangan mereka merupakan cerminan otentik dari ajaran agama, serta menjadikannya sebagai dogma yang tidak boleh diotak-atik dan dikritisi. Pada saat yang sama, mereka meminggirkan pandangan-pandangan lain yang berbeda, apalagi yang bertentangan dengan pendapat mereka. Mereka menyikapinya sebagai sesuatu yang salah, atau bahkan sesat.

Sikap mereka yang anti-Barat senyatanya merupakan ideologi politik yang sarat dengan orientasi kekuasaan. Karena itu, tujuan mereka yang utama bukan untuk mengintegrasikan nilai-nilai partikular di dalam budaya Islam, tapi lebih bersifat memperkuat Islam terhadap rival budayanya. Dalam konteks ini, mereka (masih kata El Fadl) sebenarnya mengalami perasaan kalah, frustasi, dan teralienasi bukan saja terhadap institusi kekuatan modernitas, tapi juga terhadap warisan dan tradisi Islam. Dengan demikian, sebagai kompensasinya, mereka mengembangkan sikap arogansi benar sendiri *vis-à-vis* kelompok lain yang berbeda. Arogansi mereka ini kadangkala, atau bahkan sering, ditampakkan melalui pola-pola yang bisa merugikan orang lain dari "sekadar" menuduh kelompok lain sesat, atau kafir hingga penyebaran ancaman yang bersekat tipis dengan aksi-aksi teroristik.

Ada benarnya jika dikatakan, fundamentalisme Islam yang demikian tidak bisa menawarkan visi politik dunia yang secara kultural sangat beragam. Alih-alih, mereka (menurut Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism*,1998: 91) mengklaim, mereka memiliki risalah ilahi yang absolut dan abadi yang harus disampaikan –dan

jika memungkinkan –dipaksakan ke seluruh umat manusia. Sikap semacam itu mengantarkan mereka kepada suatu kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya ruang yang cukup untuk dialog dan sejenisnya, baik dengan kelompok lain, maupun dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi. Bagi mereka, risalah ilahi yang mereka emban karena sifatnya telah final dan paripurna bagaimana pun juga harus dilabuhkan ke dalam kehidupan sebagaimana apa adanya, tanpa kompromi dan tawar menawar lagi. Ujung-ujungnya adalah penegakan kekuasaan yang bersifat ilahi di muka bumi ini.

Pada altar ini persoalan krusial mengedepan. Dalam realitasnya, kekuasaan ilahi yang mereka klaim justru sering berseberangan nilai-nilai keilahian yang seutuhnya bersifat moral. Sejarah dan realitas kekinian menunjukkan, aksi yang mereka kembangkan tampaknya sulit untuk dilabuhkan ke dalam nilai-nilai moralitas yang mencerminkan keluhuran dan kearifan. Dengan klaim kebenaran sepihak yang dipegangnya, mereka tampak terperangkap ke dalam keangkuhan yang memproduksikan kekerasan dalam beragam bentuknya, struktural, budaya, dan fisik. Sikap dan aksi ini jelas akan membuat nilai-nilai moral yang ilahi atau humanitik menjadi terkorbankan. Kekuasaan ilahi yang mereka gemakan tak lebih dari sekadar untuk mencapai target utama mereka, yaitu melawan Barat dan kelompok lain yang berbeda.

Karena itu, alih-alih Islam merupakan visi moral yang berkaitan dengan humanitas, mereka mengembangkan Islam yang dikonstruksi sebagai antitesis Barat. Islam sekadar tameng untuk melakukan penentangan terhadap Barat, bahkan terhadap intelelektualitas Islam sendiri. Akibatnya, tradisi intelektualitas Islam yang sampai derajat tertentu memiliki kepedulian atas persoalan moralitas kemanusiaan menjadi tergerus, berganti dengan dogma mati yang bukan saja mengabaikan aspek-aspek moral, tapi juga menjadikan agama sebagai

alat kekuasaan, dan sarana untuk melawan orang atau kelompok yang tidak disukai.

Sebagai kesimpulan, pola keberagamaan simbolis dalam beragam bentuknya itu sulit diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kemanusiaan, terutama pada masa kontemporer ini. Justru religiusitas tersebut bisa menjadi persoalan atau ancaman serius bagi kehidupan dan umat manusia sendiri. Karena itu, diperlukan rekonstruksi keberagamaan yang seutuhnya memiliki komitmen moral terhadap umat manusia dan beragam persoalannya.

# *ISLAM AND THEOLOGY OF POWER* DALAM KONTEKS INDONESIA

*Islam and the Theology of Power* sebenarnya judul artikel yang ditulis Khaled Abou El Fadl dalam *Middle East Report* 2001 lalu. Dalam tulisannya ia menyatakan, kekuasaan dan simbol-simbol yang berkaitan dengan hal itu merupakan perhatian utama dan nyaris satu-satunya dari gerakan puritanisme fundamentalistik. Saya tertarik untuk meminjam judul tersebut dan mengontekstualisasikannya dengan Indonesia karena teologi kekuasaan tampaknya juga menjadi anutan sebagian umat Islam Indonesia meski dengan pemaknaan yang agak lain dan karakteristik yang berbeda dari yang disandera oleh intelektual Muslim dari UCLA itu.

Abou El Fadl menjelaskan, gerakan puritanisme merupakan gerakan yang berawal dari sikap bernuansa apologetik dengan ciri *intellectual self-sufficiency* yang cenderung arogan. Mereka beranggapan, Islam mencakup dan juga telah membicarakan segala-galanya. Isu-isu kontemporer, semuanya telah ada dalam Islam jauh sebelum Barat mengangkatnya. Namun ketika berhadapan dengan realitas, di mana hegemoni Barat begitu kuat dan institusi modernitas begitu dominan, mereka terjebak ke dalam perasaan kalah, frustasi dan alienasi.

Untuk melawan itu, mereka –masih kata El Fadl –mengembangkan teologi kekuasaan yang bercirikan pengangkatan simbol-simbol dan gerakan kekuatan yang tanpa kompromi dan bahkan arogan, bukan

saja terhadap Barat dan non-Muslim, tapi juga terhadap Muslim yang berbeda aliran. Mereka juga cenderung menolak tradisi dan warisan Islam sehingga aspek kesejarahan Islam yang kaya nuansa menjadi terabaikan. Mereka ingin mengembangkan Islam langsung dari "langit". Perspektif tunggal yang mereka miliki mengantarkan mereka kepada kebergantungan terhadap kekuasaan semata. Kekuasaan, atau bahkan kekuatan bersenjata lalu menjadi acuan dalam gerakan-gerakan mereka.

***

Dalam konteks Indonesia, Teologi Kekuasaan, selain memunculkan diri dalam gerakan-gerakan fundamentalisme yang jumlahnya tidak seberapa, juga berkembang dalam bentuk keyakinan atau anggapan bahwa Islam adalah kekuasaan, atau dalam bentuk sikap yang lebih lunak, Islam harus dikembangkan melalui kekuasaan. Paradigma ini meniscayakan, segala persoalan yang dihadapi umat Islam, dan bangsa secara keseluruhan perlu diselesaikan melalui kekuasaan, terutama yang *legitimate*, seperti negara dengan segala jejaringannya.

Pandangan semacam itu membuat tokoh-tokoh umat Islam dari berbagai tingkatannya saling berebutan untuk memasuki wilayah kekuasaan. Bukan sekadar di legislatif, tapi juga wilayah eksekutif. Fenomena itu menguat sejak masuknya Indonesia dalam era reformasi dan terus berlangsung hingga saat ini. Sebagai contoh kecil, di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, beberapa kiai masuk ke dalam bursa pencalonan dalam pilkada.

Tentu tidak ada yang salah dalam hal itu selama mereka adalah *the right man in the right place*, dan selama hal itu tidak berdampak pada menciutnya keberadaan Islam sebagai *rahmatan lil alamien*; sebagai pijakan moral dalam mengembangkan kehidupan yang berwatak humanis dalam berbagai aspeknya. Namun dalam realitasnya, mereka

ingin masuk jaringan kekuasaan sekadar bermodalkan kharisma tanpa diimbangi visi dan misi yang jelas. Parahnya lagi, mereka terhegemoni Teologi Kekuasaan sehingga beranggapan hanya melalui kekuasaan semacam itu mereka dapat "berjuang" *membumikan* atau *menyebarkan* Islam. Itu pun dalam pengertiannya yang berbeda-beda, mulai dari yang substansial dalam bentuk pengembangan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan, hingga dalam maknanya yang eksklusif berupa penegakan Islam formal dan simbolnya dari atas.

Terlepas Islam model apa yang ingin dikembangkan, teologi kekuasaan cenderung menafikan signifikansi pengembangan Islam dari bawah. Teologi semacam itu cenderung menyikapi masyarakat sebagai obyek yang direkayasa dari atas, bukan sebagai subyek yang memiliki hak seutuhnya untuk mengembangkan diri dan kehidupan mereka sesuai dengan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan mereka, serta situasi konkret yang dihadapi mereka.

Jika Abou El Fadl menyatakan, teologi kekuasaan kurang menghargai tradisi dan warisan Islam, maka dalam konteks Indonesia, teologi kekuasaan yang dianut beberapa tokoh agama dan elit Islam Politik menjadikan mereka kurang peka dalam melihat dan menyikapi tradisi dan warisan bangsa. Mereka kurang memiliki apresiasi yang memadai atas tradisi bangsa dengan segala pluralitas yang melekat di dalamnya. Atau mereka memaknai tradisi berdasarkan ideologi dan ukuran-ukuran yang mereka buat sendiri tanpa banyak melibatkan masyarakat, atau kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Akibatnya, kekonyolan sering terjadi seiring dengan berkembangnya teologi kekuasaan. Misalnya, praktik-praktik kejahatan tetap marak, dan terkadang berlindung di balik simbol-simbol agama justru daerah di mana teologi kekuasaan itu marak dan dicoba diimplementasikan.

Selain itu, mereka para penganut teologi kekuasaan kurang menghargai tradisi keulamaan yang selama ini melekat pada masyarakat

Indonesia. Ulama dalam tradisi Indonesia, bahkan di dunia Muslim secara umum, sejatinya bukan sebagai penguasa, tapi lebih merupakan penyampai ajaran Islam yang secara keseluruhannya nyaris bersifat moral.

Dengan demikian, ulama dituntut untuk selalu bersikap kritis terhadap kekuasaan, dan mampu mengarahkan kekuasaan kepada nilai-nilai moralitas yang dapat membawa kepada tercipta dan kukuhnya keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, mereka seharusnya tidak masuk dan menjadi bagian dari kekuasaan sehingga kearifan dan obyektivitas pandangan mereka tidak membias.

***

Sejarah umat Islam, termasuk di Indonesia, membuktikan, teologi kekuasaan tidak pernah menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat. Kendati tampak begitu "mempesonakan", ia tak lebih dari upaya memperalat agama untuk kepentingan sekelompok kecil umat atau elitnya semata. Arogansi yang melekat dalam teologi itu memandulkan nilai-nilai universal Islam yang luhur yang menjadikan orang dan kelompok di luar mereka sendiri sebagai *outsider* yang tidak pernah disikapi secara arif dan adil. Demikian pula, teologi kekuasaan hanya akan menyulut ambisi para elit dan tokoh agama untuk tetap berada dalam kekuasaan meski kenyataan membuktikan bahwa mereka gagal dalam mengemban kekuasaan mereka untuk diabdikan kepada masyarakat dan bangsa.

Dengan demikian, persoalan urgen yang perlu didiskusikan adalah mengembangkan Islam Indonesia ke depan yang diharapkan bermakna konkret bagi negara, dan bangsa, termasuk di dalamnya umat Islam sendiri. Nilai-nilai moral yang dikandung Islam lebih mendesak untuk diimplementasikan tinimbang dijadikan sebagai kekuasaan,

yang hanya mengundang perebutan, konflik, dan pertentangan bukan hanya antara Muslim dan non-Muslim, tapi antar umat Muslim sendiri. Antara satu aliran dengan aliran yang lain, bahkan antara faksi yang satu dengan faksi yang lain dalam kelompok yang sama. Fakta yang ada di sekeliling kita memperlihatkan dengan jelas kenyataan itu. Irak yang terus bergolak, PKB yang sibuk mengupayakan islah, hanya secuil dari sejumlah tragedi akibat menguatnya teologi kekuasaan yang menghegemoni umat, tepatnya para elit mereka.

# KEKERASAN, "SUMBANGAN" MODERNISASI DAN FUNDAMENTALISME AGAMA

Fundamentalisme agama sering dituduh sebagai biang terjadinya beberapa kekerasan di berbagai kawasan dunia. Tudingan itu—sampai batas tertentu—memang mengandung kebenaran. Namun kita sering lupa bahwa modernitas sebenarnya ikut andil pula dalam banyak kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama ini. Dengan kata lain, modernitas dan fundamentalisme agama sama-sama berperan dalam menyuburkan tindak kekerasan serta dalam menghadirkan wajah-wajah berang dan perilaku mengerikan dalam kehidupan.

Banyak bukti yang menjelaskan tentang keterlibatan modernisasi dalam tindakan yang bersifat kursif dan represif. Demikian pula cukup banyak fakta yang menunjukkan betapa fundamentalisme agama menampakkan diri dalam wajah yang angker, serta sikap dan perilaku yang penuh keberingasan.

***

Kita memang sepakat, modernisasi telah memberikan kenyamanan dalam sisi-sisi tertentu bagi kehidupan umat manusia. Kemajuan sains dan teknologi dengan akar-akar rasionalismenya telah membuat manusia dapat merengkuh sesuatu yang dulunya dianggap mustahil. Cita-cita manusia untuk menaklukkan alam dan menguak misterinya,

sebagian besar mulai terwujud dalam kenyataan. Semua itu dapat dicapai sebagai berkah modernisasi. Namun pada saat yang sama, ia juga membawa malapetaka yang dulu tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam kehidupan.

Melalui modernisasi, yang didukung penuh sains, teknologi, dan ekonomi kapitalistis, bangsa-bangsa Barat menunjukkan kekerasan mereka yang biadab dengan tindak kekerasan kolektif dan sistematis. Mereka di awal masa modern melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa lain di Timur.

Kekerasaan yang mereka lakukan bukan hanya terjadi pada permulaan modernisasi, tapi terus berlangsung sampai saat ini. Misalnya saja, dengan alasan yang sangat sepele, negara-negara Barat modern dapat dengan mudah menggempur negara-negara lain yang terbelakang atau sedang berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai anak modernitas, terkesan –eksplisit atau implisit –mendukung hampir semua kebijakan represif negara-negara Barat tersebut.

Di negara berkembang yang terseret ke dalam modernisasi, wajah yang ditampakkan nyaris tidak berbeda, atau bahkan lebih angker lagi. Dalam hal ini, Indonesia sepanjang tiga puluh empat tahun rezim Orde Baru (Orba) menjadi contoh konkret yang tak terbantahkan. Pada masa itu, rezim penguasa melakukan kebijakan yang sangat otoriter dan represif melalui penyeragaman kehidupan dalam berbagai dimensinya. Setiap suara atau langkah yang berbeda dengan pemerintah dianggap sebagai pembelotan yang harus dibungkam atau dimusnahkan.

Akibatnya, rezim orba –seperti diungkap Pabottingi (2000) –telah membantai paling tidak 500.000 jiwa hanya dalam periode 1965-1966. Tragedi kemanusiaan ini terus berlanjut melalui pembantaian massal di Tanjung Priok, Irian Jaya (Papua), Aceh, Jakarta (peristiwa

penyerangan kantor PDIP), serta di pelosok-pelosok lain tanah air. Bahkan ketika akan tumbang, rezim Orba masih "sempat" melakukan penyiksaan, penculikan, dan penghilangan puluhan pemuda dan mahasiswa pejuang reformasi.

Indonesia bukan satu-satunya fenomena. Sebelumnya, Turki di bawah Atturk di awal masa modern, dan Iran di bawah rezim Reza Pahlevi juga melakukan hal yang serupa. Demikian pula yang terjadi di Afrika, Timur Tengah, dan berbagai kawasan lain di dunia.

Pada sisi itu, persamaan hak, kesederajatan, dan keadilan yang selalu didengungkan para penggagas modernisme menjadi sekadar retorik yang sulit dilabuhkan dalam kehidupan nyata. Kapitalisme (dan juga komunisme) sebagai anak modernitas justru menciptakan kehidupan yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alih-alih memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai yang semacam itu, para penganut modernisme justru menjadikan hal tersebut sekadar komoditi untuk kepentingan segelintir elit mereka. Rasionalisme telah menjadi tolok ukur segala-galanya sehingga menghilangkan keluhuran dan moralitas umat manusia. Maka yang terjadi adalah kekerasan yang terus merebak di mana-mana.

***

Selain sebagai dampak modernisasi, kekerasan juga dipicu oleh fundamentalisme agama. Gerakan fundamentalis merupakan fenomena global sehingga nyaris terdapat pada semua agama, semisal Kristen, Yahudi, dan Islam, meskipun masing-masing dengan karakteristiknya sendiri.

Aspek utama yang memunculkan gerakan fundamentalis adalah perubahan sosial. Menurut Tibbi (1991), dalam dunia yang begitu cepat berubah, banyak masyarakat melihat lingkungan mereka sudah

tidak tampak *determinable*. Karena itu, mereka harus melindungi identitas mereka, serta perlu mendefinisikannya kembali. Dalam konteks itu, agama mendapatkan fungsi krusial sebagai upaya restorasi terhadap segala sesuatu yang dianggap telah dihancurkan oleh perubahan, dan sekaligus sebagai upaya kembali kepada unsur-unsur mereka yang asli. Agama lalu dihadirkan pada tataran program yang bersifat aksi politis; sebagai alat legitimisasi terhadap tindakan mereka. Maka muncullah *repoliticization of the sacred* dalam bentuk gerakan fundamentalisme.

Atas dasar itu, kata Tibbi (1998), fundamentalisme agama merupakan aktivitas ideologis dan politis (murni) yang sangat *concerned* dengan kekuasaan politik. Dalam realitasnya, fundamentalisme menjadi suatu ideologi yang memicu konflik, dan bukan sebagai strategi untuk mendamaikan antara budaya lokal dan peradaban regional (atau juga peradaban yang lebih besar). Dengan kata lain, ia hadir sebagai reaksi terhadap perubahan dan modernisasi melalui penafsiran secara harfiyah terhadap teks-teks suci sehingga cara-cara yang dimunculkan seringkali mengerikan dan berwatak penuh kekerasan.

Bagi kaum fundamentalis, kekerasan, pembunuhan, dan perang merupakan sesuatu yang sah dalam rangka menegakkan ajaran "agama". Maka kita tidak heran jika, misalnya, pada dekade 80-an abad yang lalu Paul Hill dari gereja Presbiterian Amerika Serikat dan David C. Trosch dari Gereja Katolik menganggap pembunuhan terhadap dokter yang melakukan praktik aborsi adalah tindakan yang sah.

Demikian pula yang terjadi pada agama Yahudi. Sebagai misal, Rabbi Shlomo Goren dari kelompok Ashkenazic berfatwa, pembunuhan terhadap Yasser Arafat merupakan bagian dari salah satu tugas suci keagamaan (lihat Shihab, 1999). Sedang dalam Islam, kelompok yang fundamentalis sering berpendapat, melakukan

kekerasan terhadap negara-negara Barat dan satelitnya yang dianggap setan adalah suatu tindakan yang halal.

Semua itu mengisyaratkan bahwa pembunuhan, kekerasan, dan tindakan anarkis dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bahkan harus dilakukan bagi kaum fundamentalis. Mereka (entah fundamentalis Muslim, Yahudi, atau Kristen) melakukan hal tersebut sebagai "penyelesaian" terhadap persoalan yang mereka hadapi.

***

Dari fenomena yang berkembang selama ini, kekerasan tampaknya masih terus akan berlanjut dalam kehidupan. Karena itu, kita yang masih menginginkan suatu kehidupan yang damai dituntut untuk mencari solusi yang benar-benar sistematis dan menyeluruh; suatu penyelesaian yang dapat menghindarkan umat manusia dari perilaku dehumanistik, serta menyelamatkan mereka dan kehidupan dari kehancuran.

Untuk melenyapkan –minimal mengurangi –kekerasan di muka bumi, kita jangan terjebak kepada tindakan yang berbau kekerasan. Karen Amstrong (2001) dengan cerdas menyatakan, penindasan dan pemaksaan jelas bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan kekerasan. Sebab hal itu hanya akan mendatangkan serangan balik dan dapat menjadikan kelompok fundamentalis atau calon fundamentalis akan lebih ekstrem lagi. Pada saat yang sama, kita harus pula menyadari, kultur modern kadang-kadang memaksakan tuntutan yang sulit. Kultur ini sering menjatuhkan harga diri manusia, serta menunjukkan kelemahan moral, kerentanan dan minimnya kehormatan manusia.

Pada tataran itu kita harus melangkah. Kita harus menjadi modern Karena kemodernan –sebagai upaya memakmurkan dunia –adalah tugas umat manusia. Namun kita tidak boleh kehilangan

spritualitas sesuai dengan identitas diri kita masing-masing. Kita hendaknya menjadi manusia yang utuh sebagai makhluk yang terdiri dari aspek rasionalitas dan spiritualitas. Kekerasan terjadi, karena kita selama ini berpegang teguh kepada salah satu aspek saja.

Pada satu pihak, keberpegangan kepada rasionalisme semata membuat kita tidak mampu memaknai hidup sehingga kita mengabaikan tujuan hidup yang sebenarnya. Sedang pada pihak lain, pembenaman diri dalam spiritualitas semata membuat kita gagap dan gamang dalam hidup sehingga tidak mampu menyikapi realitas secara arif dan nyata. Maka upaya kita ialah mengembalikan fungsi keduanya sesuai kedudukannya masing-masing, serta pada saat yang sama memadukan secara harmonis kedua unsur itu sehingga terjadi suatu interdependensi yang kokoh.

Melalui usaha tersebut, kita diharapkan menyadari keterbatasan kita. Dengan demikian, kita tidak akan menganggap diri kita selalu benar sendiri, serta akan membuat kita selalu dituntut untuk melakukan dialog secara tulus dengan sesama, dengan lingkungan alam, dan bahkan dengan Tuhan.

***

# MENURUNNYA KUALITAS MANUSIA INDONESIA DAN ANCAMAN KEKERASAN DI MASA DEPAN

Salah satu persoalan krusial yang menghadang bangsa Indonesia saat ini dan akan berdampak jauh ke depan adalah terjadinya penurunan kualitas manusia Indonesia. Sebagaimana diberitakan *Kompas* (Kamis, 10/7 03), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami kemerosotan dari 0,684 ke 0,682 sehingga peringkat negara Indonesia turun dari posisi 110 menjadi 112 dari 175 negara di dunia.

Meskipun angka sering tidak menunjukkan fakta yang senyatanya, kita dengan mata telanjang dapat menyaksikan bahwa penurunan kualitas manusia Indonesia tampak di mana-mana, yang dapat dilacak dari kondisi masyarakat akar rumput yang tidak dapat menjangkau lagi pelayanan kesehatan, mereka tidak mampu membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang harganya melambung tinggi, dan hal-hal yang seumpama dengan itu. Dengan demikian, Laporan Pembangunan Manusia 2003 yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memperkokoh temuan yang ada di sekitar kita.

Secara prinsip, terjadinya kemerosotan ini terkait erat dengan meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Data Puslitbang Gizi Depkes menyebutkan, jumlah kasus meninggal karena gizi buruk di Indonesia tahun 1998/1999 sebanyak 180 jiwa. Seiring dengan itu, angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi, dan peningkatan

pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi dan sanitasi yang memadai, belum mengalami percepatan yang signifikan. Hal itu masih diperburuk lagi dengan kualitas pendidikan dasar yang masih rendah, serta orientasi pendidikan yang masih sangat berbias kota. Bahkan secara umum, pendidikan yang berjalan selama ini –sampai derajat tertentu – lebih menampakkan diri sebagai "pengajaran" yang kering dan formal, dan bukan pendidikan dalam arti yang sebenarnya.

***

Menurunnya kualitas manusia Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara umum saat ini belum mengalami kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya. Bahkan meskipun dikatakan ada penurunan angka dan jumlah orang miskin yang cukup signifikan, kesenjangan sosial-ekonomi antara golongan kaya dan si miskin, atau antara satu daerah tertentu dengan daerah yang lain belum mengalami pengurangan yang berarti.

Kesenjangan sosial-ekonomi ini diyakini oleh banyak kalangan sebagai salah satu basis munculnya kekerasan. Realitas kehidupan bangsa selama beberapa dasawarsa belakangan ini membuktikan, adanya gap itu telah memupuk kecemburuan sosial pada kelompok-kelompok tertentu. Kecemburuan yang bercambur baur dengan kekecewaan (akibat perlakuan penguasa yang tidak adil) akhirnya dilampiaskan dalam bentuk anarkisme massa dan tindak kekerasan yang lain sebagaimana telah terjadi pada masa-masa sebelum, saat, dan sesudah runtuhnya rezim Orde Baru (Orba). Oleh karena itu, melebarnya kesenjangan yang saat ini masih terjadi mengantarkan kepada suatu kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa kekerasan masih memiliki peluang yang cukup besar untuk merebak kembali di masa-masa datang.

Terkait dengan itu, terjadinya penurunan kualitas manusia Indonesia, khususnya kekurangan gizi balita, juga akan berdampak sangat jauh terhadap kemungkinan kegagalan Indonesia di masa datang dalam mengembangkan suatu generasi yang *mumpuni* dan terciptanya suatu negara yang kokoh. Akibat kurang gizi, misalnya, akan membuat terjadinya penurunan IQ sebesar 13-15 poin dibandingkan dengan balita normal setelah memasuki usia sekolah. Demikian pula, kekurangan yodium pada anak balita kemungkinan menimbulkan keterbelakangan mental dan penyakit atau gangguan fisik yang lain (lihat IDEA, 2001 204).

Lahirnya generasi yang kurang memiliki kecerdasan, kreativitas, keterampilan, atau spiritualitas yang memadai itu, selain tidak dapat mendukung sama sekali terhadap harapan pengembangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, hal itu juga akan berdampak terhadap ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk bersaing secara sehat dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Bangsa Indonesia dengan sumber daya manusianya yang lemah itu hampir dapat dipastikan akan berada dalam ketidakberdayaan dalam segala dimensinya dan akan selalu ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan semisal hegemoni negara, pasar global dan lainnya.

Jika asumsi ini nantinya benar-benar menjadi kenyataan, maka bangsa ini akan terdampar dalam suatu frustasi yang cukup mendalam. Dalam ketidakberdayaan dan kekecewaan itu, kekerasan dalam segala bentuknya akan menjadi salah satu fenomena yang dapat merebak kembali dalam kehidupan masyarakat.

***

Merosotnya kualitas manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang belum sepenuhnya menjadikan masyarakat sebagai subyek yang paling berhak menikmati segala

program yang dicanangkan dan dilaksanakan Pemerintah. Sejauh ini kesan kuat yang timbul adalah berlangsungnya praktik Pemerintah yang menjadikan masyarakat sekadar sebagai obyek kepentingan politik pragmatis yang sesaat.

Negara yang direpresentasikan oleh penguasa, partai politik, dan segala perangkatnya telah mereduksi masyarakat –sampai batas-batas tertentu –sebagai suatu himpunan orang yang hanya diperlukan suaranya di saat Pemilihan Umum (Pemilu), atau paling banter sebagai alat legitimasi semata. Setelah Pemilu berlalu, dan negara berjalan "normal"kembali, masyarakat atau rakyat dilupakan kembali. Di saat seperti itu, pengentasan masyarakat dari keterbelakangan sulit untuk dicapai, dan pada gilirannya kekerasan akan terus mewarnai kehidupan bangsa.

Kenyataan itu mengharuskan kita semua untuk mencari suatu solusi yang benar-benar mencerahkan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada sisi itu, negara perlu dikembalikan kepada makna dan fungsinya yang otentik sebagai institusi alamiah yang lahir dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Meminjam ungkapan Hegel –yang dikutip Schmandt (2002: 493) –negara adalah keseluruhan organis yang terdiri dari individu yang terkelompokkan ke dalam kelas, asosiasi sukarela, dan komunitas lokal, di mana masing-masing hanya memiliki arti dalam hubungannya dengan dan sebagai bagian dari keseluruhan.

Namun kondisi itu tidak harus membuat individu –sebagaimana dianut Hegel –terserap ke dalam negara. Justru negara hadir dalam rangka merealisasikan, dan melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Karena itu, negara –menurut Kant (Schmandt, 2002: 485-486) –harus dibangun di atas kebebasan manusia, di atas persamaan warga, dan di atas ketergantungan individu pada dirinya sendiri.

Dalam kondisi itu, di satu pihak negara harus merepresentasikan kehendak masyarakat yang mengantarkannya kepada kedaulatan yang hakiki; dan di pihak lain, semua orang dituntut untuk bertindak sesuai dengan aturan atau hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat tersebut. Semua itu dilaksanakan dalam kerangka nilai-nilai yang merepresentasikan keadilan, kesetaraan dan nilai-nilai universal kemanusiaan yang hakiki.

Untuk menghindari terjadinya penyerapan individu ke dalam negara atau menguatnya hegemoni negara terhadap rakyat, pengembangan lembaga-lembaga sosial-keagamaan masyarakat yang kuat menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan. Pada tataran itu, lembaga tersebut memiliki dua fungsi yang kait-mengkait. *Pertama* sebagai *preoure group* yang berperan melakukan semacam kontrol dan penekan yang bersifat moral secara berkelangsungan terhadap negara agar semua kebijakan dan programnya selalu berorientasi dan selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. *Kedua* sebagai lembaga transformatif yang mengemban tugas melakukan penguatan dan pencerahan atas masyarakat melalui pengembangan ekonomi, pembumian nilai-nilai demokratis, dan moralitas-agama substansial.

Pengembangan sistem politik transformatif semacam itu diharapkan menjadikan negara yang mengejawantah dalam institusi dan konstalasi politik yang dikembangkan pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat memberikan pencerahan dan kesejahteraan atas masyarakat dalam berbagai aspeknya –terutama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan tidak akan membias menjadi proyek yang hanya menebalkan saku para elit dan kelompok yang berada dalam jaringan kekuasaan semata.

Konkretnya, hal itu akan menjadi kegiatan yang benar-benar menyebar rata sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat dalam menyalurkan

aspirasi dan menyelesaikan segala persoalannya diharapkan selalu berpijak pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama dan selalu mengedepankan keadaban serta moralitas keagamaan luhur yang penuh kearifan.

Terciptanya kondisi dan sistem politik yang kondusif tersebut akan meminggirkan sejauh mungkin segala bentuk kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula, kondisi seperti itu tidak akan pernah menyuburkan bagi bersemainya politisasi agama dengan karakteristiknya yang radikal, rigid dan (sering) berangasan. Seandainya kekerasan masih muncul, hal itu hanya akan dilakukan oleh petualang-petualang politik yang diyakini tidak akan diterima dan pernah menarik massa dari masyarakat luas.

***

# KEJUJURAN, MORALITAS BANGSA YANG TERGADAIKAN

Terantuknya bangsa Indonesia dalam mega-permasalahan yang sampai saat ini belum dapat tertangani secara memuaskan tidak dapat dilepaskan dari kian memudarnya kejujuran dari masyarakat dan kaum elitnya. Dewasa ini ketidakjujuran dalam beragam bentuknya nyaris dapat ditemui pada semua lapisan masyarakat dan pada semua dimensi kehidupan: politik, sosial, ekonomi atau pendidikan.

Dalam kehidupan politik para politisi lebih terfokus pada perebutan kekuasaan, terutama menjelang Pemilu 2004 mendatang daripada mengembangkan kepedulian untuk bersama-sama memperbaiki situasi negara dan bangsa (*Kompas*, 1/5 02). Suara lantang mereka di saat kampanye Pemilu lalu bahwa mereka akan memperjuangkan nasib rakyat belum dibuktikan secara serius dan konkret sampai kini.

Pada kehidupan sosial, ketidakjujuran juga telah menjadi gejala fenomenal. Kesepakatan untuk hidup damai antar-etnis, antar-agama, dan sejenisnya lebih merupakan sekadar retorika yang tidak didukung oleh kejujuran dan ketulusan hati. Akibatnya, konflik terus berkembang dan kehidupan kian memanas. Satu misal, *Kompas* (29/4 02) memberitakan terjadinya penyerangan di desa Soya, Sirimau, Ambon sehingga menewaskan 12 orang dan menyisakan 12 orang yang terluka berat. Kejadian ini menggoreskan ironi yang cukup

menyentak karena terjadi setelah penggelaran Perjanjian Malino sebagai kesepakatan perdamaian antar masyarakat di sana.

Aspek kehidupan lain, seperti pendidikan dan ekonomi, menunjukkan secara jelas kejujuran belum dijadikan landasan dalam mengembangkan kependidikan atau aspek yang bersifat ekonomi. Pendidikan yang berjalan sejauh ini lebih terkesan formalistik *ketimbang* sebagai proses transformatif. Pendidikan masih belum mampu mengakomodasi eksistensi manusia seutuhnya. Ekonomi pun masih bersifat developmentalisme-kapitalistik yang hanya "membesarkan" sebagian kecil elit bangsa. Pendidikan rakyat atau ekonomi kerakyatan hanya gaung yang belum ada wujudnya.

Semua itu mengungkapkan, kebohongan atau kemunafikan telah mendominasi – sampai derajat tertentu –kehidupan bangsa. Sedangkan kejujuran dan sebangsanya kian terpinggirkan dan menjadi barang yang hampir langka bagi "bangsa besar" ini.

***

Pada tanggal 6 April 1977 abad lalu Muchtar Lubis dalam ceramahnya *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban* di Taman Ismail Marzuki Jakarta menyebutkan, salah satu ciri manusia Indonesia yang cukup menonjol adalah hipokrisi. Manusia Indonesia suka berpura-pura: lain di muka, lain di belakang. Mereka pandai menyembunyikan kata hati mereka yang senyatanya, perasaan mereka yang sebenarnya, pikiran mereka yang sesungguhnya, atau bahkan keyakinan mereka yang sebenarnya. Mereka suka berbohong sekadar untuk menyelamatkan diri sehingga mereka *survive*. Mereka mengatakan kata "tidak" dengan ungkapan lain yang *ambigue*, sebagaimana pula mereka mengemas kebohongan mereka dengan bahasa-bahasa retorik sehingga sulit dikenali realitas yang sebenarnya. Konkretnya, apa yang dikatakan sering (atau selalu) berbeda dengan

apa yang dilakukan. Mereka tidak jujur kepada diri sendiri sebagaimana mereka tidak jujur kepada manusia yang lain.

Kritik tersebut mungkin agak berlebihan dan terlalu subyektif. Namun ketika dikontekstualisasikan dengan kehidupan yang berkembang dewasa ini, pernyataan budayawan Indonesia itu memiliki relevansi yang kuat dan berdasar. Dalam konteks itu, kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog yang disalurkan melalui Yayasan *Raudlatul Jannah* menjadi satu bukti yang cukup otentik. Pengakuan Dadang Sukandar, Ketua Yayasan, tentang laporan penyaluran bahan pokok yang fiktif menjelaskan betapa mudahnya kebohongan disebar ke masyarakat luas sekadar untuk mengukuhkan ambisi pribadi dan kelompok, memperkaya diri, atau mempertahankan kekuasaan.

Gila kekuasaan yang dibingkai dengan ketidakjujuran itu pula yang pada gilirannya membuat bangsa ini –sebagaimana disitir Lubis pada kesempatan itu –enggan bertanggung jawab terhadap perbuatan, keputusan, atau pikirannya. Untuk menghindari tanggung jawab itu, manusia Indonesia paling suka mengatakan ungkapan semacam "bukan saya yang melakukan". Alih-alih mau bertanggung jawab, mereka mengalihkannya kepada bawahan, bawahan kepada yang lebih bawah lagi, dan atau mencari kambing hitam. Kasus tragedi Trisakti dengan kesalahan prosedurnya, atau Akbar Tanjung dengan pernyataan lupanya menggambarkan secara telanjang tentang kebenaran pernyataan Lubis sekitar duapuluh lima tahun yang lalu.

Kondisi seperti itu membuat mereka menjadikan agama sekadar sebagai sarana penebus dosa; atau meminjam istilah Gordon W. Alport –seperti dikutip Rahmat (1986: 26) –mereka beragama secara ekstrinsik, *something to use but not to live*. Mereka menjadikan agama untuk pencapaian kepentingan mereka. Dengan demikian, mereka mengorbankan kejujuran dan ketulusan, serta nilai-nilai moral dan sosial yang lain asal tujuan mereka tercapai.

Pada saat yang sama, mereka pun rajin melakukan ibadah-ibadah ritual sebagai penebus dosa-dosa mereka. Tujuan mereka hanya "keselamatan" mereka sendiri, termasuk di akhirat nanti (yang belum tentu bisa dicapai). Mereka mengingkari pengembangan keselamatan sosial yang harus disebarkan dalam kehidupan. Padahal dalam perspektif ajaran agama substansial, menebarkan keselamatan sosial –seperti kesejahteraan dan kedamaian –merupakan mata rantai yang menghubungkan antara keberagamaan seseorang dengan keselamatan di akhirat.

Sikap dan perilaku tersebut yang ditopang dengan pola keberagaman ekstrinsik hanya akan menebarkan musibah sosial. Akhirnya, masyarakat yang tidak berdosa yang harus memikul beban. Dari korupsi yang terus membengkak, beban hutang yang menyesakkan, pendidikan yang bersifat pesanan atau titipan penguasa, sampai konflik elit yang bersifat premanistik, semua itu hanya menyisakan penderitaan paling parah pada masyarakat di tingkat akar rumput.

Penderitaan itu telah membuat masyarakat benar-benar tidak berdaya. Kesejahteraan, ketenangan dan cita-cita agung yang dirangkai sejak Indonesia merdeka mulai tercerai berai dan menghilang di balik ambisi kekuasaan sekelompok kecil dari bangsa. Sebagai gantinya, perasaan anomi dan dampak-dampak yang menyertainya menjadi bagian yang melekat pada kehidupan masyarakat. Dalam kondisi yang sangat tidak kondusif itu, antara kepercayaan dan kecurigaan, dan antara kedamaian dan konflik hanya dibatasi sekat sangat tipis, yang sangat mudah menghilang begitu saja.

Ketika para pembohong tidak mau sadar juga, dan mereka terus menjual kejujuran dan ketulusan mereka, bahkan mereka menggunakan bahasa agama sebagai alat pencapaian kepentingan mereka, maka realitas yang harus dihadapi masyarakat adalah kekerasan, permusuhan, pembantaian, atau tindakan-tindakan anarkis-biadab yang lain.

***

Paparan sebelum ini tidak menegasikan adanya individu atau beberapa tokoh yang benar-benar jujur, tulus dan memiliki pengabdian yang total kepada bangsa, negara, dan agama. Kita masih memiliki sosok seperti Gus Mus yang dengan segala sikap *tawadldlu'*-nya menyuarakan kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan yang mesti dilabuhkan di bumi pertiwi. Kita juga masih mempunyai figur semisal Cak Nur yang tidak kenal lelah berupaya membumikan nilai-nilai substansial Islam ke dalam kehidupan konkret. Dengan sikapnya yang sangat sederhana, dia teguh dan konsisten memperjuangkan keyakinan itu dan rela untuk tidak ditokohkan secara formal di Republik yang sedang sakit ini. Demikian pula, kita menyaksikan ketokohan semacam Romo Magnez yang sangat menekankan pentingnya dialog dan perdamaian sebagai modal pokok bagi bangsa untuk menuju kehidupan yang dicita-citakan.

Terlepas dari kekurangan mereka (yang pasti ada) sebagaimana manusia biasa, tokoh-tokoh seperti itu mestinya perlu menjadi teladan bagi bangsa. Sikap keteladanan sosial-keagamaan mereka yang -sampai batas tertentu –mengungkapkan keberagamaan yang arif dan otentik perlu dijadikan bahan diskusi untuk diapresiasi, dikembangluaskan, sekaligus dikritisi dalam kehidupan.

Pendidikan yang pada intinya merupakan pranata pembentukan dan pengembangan nilai-nilai moral menjadi persoalan paling urgen untuk diperhatikan lebih serius oleh masyarakat secara keseluruhan, dan kalangan pendidik secara khusus. Pendidikan hendaknya bernilai transformatif; dapat mendewasakan masyarakat, serta mengembangkan kepribadian, intelektualitas, dan ketrampilan mereka secara utuh. Di samping itu, sistem pendidikan harus mampu membaca dengan jujur kondisi *real* dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sehingga

benar-benar mampu memberdayakan mereka dalam kehidupan yang majemuk ini.

Bersamaan dengan itu, agama sebagai bagian fitrah manusia perlu didekati kembali, dipahami, dan diaplikasikan secara utuh. Agama tidak dapat dijadikan sebagai wahana penyelamat manusia di alam eskatalogis semata. Agama perlu dijadikan moralitas kehidupan yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia dari kehancuran dan kebiadaban. Keselamatan akhirat perlu disikapi sebagai konsekuensi logis dari keberagamaan yang dapat menyelamatkan si penganut dan umat manusia lain dari tindakan-tindakan amoral, dan biadab dalam kehidupan dunia. Sikap dan pola pandang semacam itu hendaknya dihadirkan dalam keberagamaan seluruh penganut agama. Dengan demikian, kejujuran akan disikapi sebagai bagian *inherent* agama yang tidak dapat diabaikan sama sekali, serta tidak bisa digadaikan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan sesaat.

# INFANTILISME BANGSA

Salah satu kesimpulan dari diskusi panel terbatas Harian *Kompas* pada tanggal 5 Agustus 2003 menyebutkan, partai politik Indonesia saat ini masih menunjukkan wajah yang infantil. Sejatinya, bukan hanya partai politik yang memiliki sifat seperti itu, tapi nyaris seluruh elemen bangsa –para elit, dan sebagian (besar?) masyarakat –berada dalam kondisi tersebut. Bahkan mereka sudah terjebak dalam infantilisme. Memodifikasi konsep Monks *et. al.* (1991: 295) –sikap itu merupakan psikopati yang menyebabkan ketidakmampuan mengadakan hubungan afektif normal dan selalu menjadi problem bagi yang lain.

Salah satu indikator dari fenomena "kekanak-kanakan" itu dapat dilacak pada menguatnya egoisme di tataran negara (baca Legislatif, Ekskutif, dan Yudikatif) serta masyarakat yang hanya mau memikirkan diri sendiri. Selain itu, di kalangan masyarakat timbul gejala ketergantungan yang akut terhadap negara. Masyarakat selalu minta "disusui, disuapi", serta dimanja oleh negara. Ketika negara tidak mau menghiraukan mereka, maka mereka lalu *ngambek* yang sering dilampiaskan dalam bentuk tindakan anarkis, kekerasan dan sejenisnya.

Diakui atau tidak, fenomena itu sampai saat ini hampir dapat ditemui di mana-mana, dari tingkat paling bawah sampai jajaran paling tinggi di Republik ini. Karena itu, ungkapan yang menyatakan

bahwa reformasi jalan ditempat, atau bahkan telah mati muda -sampai derajat tertentu –memang sangat beralasan.

**Negara Represif**

Ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari sikap infantil, serta sulit tumbuh untuk menjadi dewasa berakar pada keberadaan negara yang bersifat integralistik. Dibayang-bayangi oleh bentuk negara seperti itu, Orde Baru (Orba) memetamorfosis menjadi neo-fasisme yang totaliterianistik.

Dhakidae menjelaskan (2003: 745 -747), pada saat itu developmentalisme menjadi anutan yang total. Totalisasi sistemik dalam bentuk formalisasi, birokratisasi, dan militerisasi mendefinisikan bagian atau segala sesuatu di luar lingkaran kecil (kekusaan, au) sebagai asing jika tidak mampu dan tidak bersedia menerima wacana pembangunan; serta pada saat yang sama mendikskreditkannya sebagai sesuatu yang berada di luar sistem. Penyeragaman total menjadi tak terelakkan yang diberlakukan ke dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa. Demikian pula, monoloyalitas kepada negara yang direpresentasikan oleh aliansi Golkar, dan militer dalam bayang-bayang sang penguasa tunggal menjadi kemestian yang harus dilakukan oleh setiap orang dan elemen bangsa.

Semua itu merupakan manifestasi dari infatilisme yang telah mengungkung rezim Orba. Sikap infantilis menjadikan rezim begitu egoistis sehingga yang ada dalam benak pikirannya hanya dirinya semata. Kekuasaan dan segala yang ada di negeri ini adalah miliknya. Orang atau kelompok lain yang berbeda dianggap asing, serta dianggap tidak memiliki hak sedikit pun menikmati kekayaan Indonesia.

Rezim menjadi begitu ketakutan untuk kehilangan kekuasaannya. Di mana dan kapan saja, rezim Orba menggunakan perlindungan berlapis yang beragam untuk menjaga dan melestarikan kekuasaannya.

Ia juga minta selalu dipuja, disanjung dan harus dianggap sebagai sesuatu yang paling sempurna. Manakala merasa tidak diperhatikan, permintaannya ditolak, atau merasa tersinggung, rezim meresponsnya melalui "kejengkelan" yang dilampiaskan dalam bentuk kekerasan, kebrutalan dan sejenisnya. Kekerasan vertikal menjadi fenomena yang mudah ditemui dalam hidup keseharian bangsa.

## Pendidikan Pesanan dan Politisasi Agama

Terkait dengan kebijakan politik negara, seluruh aspek kehidupan –terutama yang bernilai strategis semisal pendidikan, dan agama –dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim. Maka, pendidikan sedikit sekali terkait dengan cara pengembangan intelektualitas yang mengedepankan kreativitas dan orisinalitas atau aspek yang bersifat afektif-spiritual.

Sistem pendidikan lebih menampakkan diri sebagai indoktrinisasi semata yang sangat menekankan kepada upaya kepatuhan total kepada negara. Perubahan sistem pendidikan yang selalu dilakukan pada setiap pergantian menteri orba hanya bersifat tambal sulam dan tetap berkutat pada aspek formalisme untuk kepentingan negara. Seluruh sistem dan proses pendidikan berubah wujud menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Akhirnya, institusi tersebut hanya melahirkan generasi-generasi bangsa yang berjiwa budak, gamang, selalu dibayang-bayangi kewajiban untuk mengiyakan segala kebijakan negara, serta tidak mandiri, selalu tergantung kepada negara. Ketika negara mengabaikan kepentingan mereka, negara sibuk dengan urusan dan kepentingannya sendiri, dan hegemoni negara begitu kuat mencengkeram kehidupan masyarakat, mereka hanya mampu "menangis" bak anak-anak direbut mainannya, sambil menunggu kesempatan untuk merampasnya kembali dan menumpahkan kekesalan mereka.

Kekuatan rezim yang mulai rapuh pada seperempat terakhir dasawarsa sembilan puluhan abad lalu dijadikan ajang untuk menumpahkan kejengkelan mereka. Amuk massa, tindakan anarkis, bahkan terorisme lalu menjadi pilihan. Sebagai masyarakat infantil, mereka tidak merasa berdosa sama sekali dengan tindakan mereka. Alih-alih, sebagian kelompok membenarkan tindakan brutal mereka melalui dasar-dasar formal agama yang parsial.

Bagi mereka, penggunaan agama untuk kepentingan politik adalah persoalan yang sah sebagaimana negara selama masa rezim orba telah memolitisasi agama. Agama telah dijadikan alat paling ampuh untuk mengesahkan segala kebijakan orba, termasuk dalam melakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu.

Reformasi yang digulirkan sejak penghujung abad yang lalu ternyata tidak membawa perubahan signifikan dalam pendidikan (dan aspek-aspek yang lain). Undang-Undang Sidiknas yang baru disahkan beberapa bulan yang lalu tampaknya tidak akan mampu melepaskan bangsa dari infantilisme. Sebab warna politisasi pendidikan begitu kental melekat pada proses pengesahan dan isi substansi UU Sidiknas. UU ini terkesan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang sangat pragmatis.

Hal itu masih diperburuk lagi dengan adanya etatisme yang begitu kuat yang dapat dilacak –menurut Mardiatmadja (2003: 4 -6) –dari banyaknya rencana Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan, dan "kejutan" Diknas yang menerbitkan naskah UU Sidiknas yang berbeda dengan yang ditandatangani DPR. Dengan demikian, hegemoni negara tampaknya masih akan berlangsung dalam dunia pendidikan yang berdampak pada aspek-aspek lain sehingga harapan bahwa pendidikan Indonesia akan mencerahkan dan mendewasakan bangsa tampaknya kian jauh dari gapaian.

Dalam kondisi semacam itu, tumbuhnya nasionalisme yang kokoh yang didasarkan pada pluralisme, dan nilai-nilai demokratis yang luhur menjadi sulit untuk mengakar kuat di hati masyarakat. Infantilisme hanya akan mengantarkan bangsa kepada sikap egoistis, mau menang sendiri, dan cenderung mengabaikan kepentingan orang atau kelompok lain, serta kepentingan bangsa yang lebih besar. Sikap itu akan membuat bangsa selalu terperosok ke dalam bencana kemanusiaan, seperti hilangnya solidaritas sosial dan maraknya kekerasan.

## Pengembangan Demokrasi Substantif

Melihat fenomena yang berkembang sampai saat ini, proses pendewasaan bangsa di negeri ini kemungkinan besar masih akan mengalami perjalanan cukup terjal, dan penuh kerikil. Tugas kita bersama menjadikan proses itu lebih cepat, serta menyingkirkan hambatan-hambatan menghadang melalui cara-cara manusiawi, dan penuh kearifan.

Terkait dengan itu, seluruh elemen bangsa dan negara perlu memiliki komitmen total untuk membumikan demokrasi substantif. Intinya adalah –menyadur Soroush (2002: 191) –sebagai metode dan nilai etika-moral untuk membatasi kekuasaan, mencapai keadilan, dan menggapai hak asasi. Dengan demikian, kekuasaan bukan dijadikan tujuan, tapi dijadikan sarana untuk menegakkan keadilan bagi semua sehingga setiap orang dan kelompok memperoleh hak-haknya yang asasi serta terdorong untuk menjalankan kewajiban demi kepentingan bersama.

Pada sisi itu, pendidikan perlu dikembalikan kepada ranahnya yang asal sebagai proses pendewasaan manusia yang mampu memahami keutuhan dirinya, serta mengenal berdialog, dan berinteraksi secara aktif dengan sesama, alam kehidupan, dan Tuhan. Demikian

pula, agama hendaknya dijadikan sebagai sarana pencerahan sehingga manusia dapat memaknai kehidupan dan mengetahui tujuan kehidupan yang sebenarnya.

Dua upaya ini diharapkan akan mengantarkan proses demokratisasi kepada arti dan tujuannya yang sejati, di mana aura ilahiyah akan memancar ke dalam hati setiap manusia Indonesia. Dengan demikian, manusia sebagai khalifah Tuhan, dan Tuhan sebagai sumber nilai memanifestasikan diri dalam bentuk pencapaian prestasi, berkembangnya tanggung jawab, menyebarnya keadilan, dan kokohnya solidaritas sosial di bumi pertiwi.

# BUDAYA POLITIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Rendahnya kualitas pendidikan kita dibandingkan dengan pendidikan di beberapa negara tetangga merupakan realitas yang sulit dipungkiri siapa saja. Menyikapi hal itu, pemerintah memang tidak tinggal diam. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan, baik yang menyangkut penambahan dana pendidikan maupun yang berkaitan dengan sistem pendidikan itu sendiri.

Namun melihat proses perjalanan yang dilalui, pesimisme akan keberhasilan niat baik pemerintah tersebut begitu kuat menggejala. Pertanyaan yang cukup menggelitik lalu menyeruak: mampukah kebijakan Pemerintah yang dikembangkan selama ini mendongkrak mutu pendidikan kita. Jangan-jangan hal semacam itu akan menguntungkan segelintir kelompok yang berada di sekeliling pembuat kebijakan, atau bahkan hanya menambah beban dunia pendidikan.

## Budaya Politik

Realitas menunjukkan, krisis yang menimpa dunia pendidikan di Indonesia, khususnya rendahnya kualitas pendidikan, sejatinya berpulang kepada persoalan sangat kompleks yang satu dengan yang lain bersifat *interplay*. Prasarana, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, anggaran pendidikan nasional yang sangat minim, serta

banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian, atau memang sebenarnya belum layak disebut guru, diakui merupakan faktor yang ikut menyulitkan pengembangan kualitas. Di atas itu, faktor yang sama sekali tidak dapat diabaikan adalah kebijakan yang terlalu mengedepankan "formalisme", serta kuatnya sistem kependidikan secara umum yang masih tidak/ kurang berorientasi pendidikan, atau gampang dirembesi kepentingan di luar pendidikan. Kendati wacana yang dikembangkan sarat dengan nuansa nilai-nilai pendidikan, praktik yang sering terjadi di lapangan jauh panggang dari api.

Semua itu terjadi karena masalah pendidikan di Indonesia dihimpit beberapa faktor dominan yang tidak mendukung atau bahkan bisa berseberangan dengan nilai-nilai pendidikan. Salah satu yang utama adalah kentalnya budaya politik dalam dunia pendidikan. Nuansa budaya politik –yang ujung-ujungnya kekuasaan itu –dapat dilacak dari pemilihan atau penunjukan pimpinan lembaga pendidikan hingga kebijakan kurikulum.

Sering terjadi, misalnya, seseorang diangkat sebagai kepala sekolah, dan sebagainya bukan karena kapabalitas intelektual atau kemampuan manajerialnya, tapi karena terkait erat dengan formalitas semata atau kepentingan atasan yang mengangkatnya. Seorang dekan, rektor dan sejenisnya terkadang diusulkan ke menteri bukan karena dia layak menduduki jabatan itu, namun lebih disebabkan ada kepentingan tertentu dan tekanan dalam beragam bentuknya agar dia yang harus dicalonkan. Akibatnya, figur yang senyatanya lebih layak untuk menempati posisi itu harus tersingkir.

Dalam tataran itu pula, kebijakan semisal pengembangan kurikulum yang di atas permukaan tampak berwajah pendidikan, pengembangannya di lapangan sering diorientasikan "proyek" dengan konotasinya yang negatif. Semua itu dibungkus dengan formalisme sehingga yang tampak seakan-akan benar-benar bernilai pendidikan.

Budaya politik itu pula yang membuat sebagian struktur institusi pendidikan kita gemuk dan lamban. Struktur organisasi pada institusi pendidikan sering dirombak dan diperluas bukan karena institusi membutuhkannya. Alih-alih, karena ada orang tertentu yang karena berbagai alasan –seperti tekanan dari atas atau dari bawah –harus diberi posisi dalam institusi tersebut.

Dalam kondisi semacam itu institusi pendidikan kita rasanya sulit, bukan hanya untuk bersaing dengan pendidikan di negara-negara lain, tapi juga untuk menghasilkan manusia berpendidikan dalam arti yang sebenarnya. Fenomena ini tampaknya bukan hanya terjadi pada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga tertentu saja, tapi telah menjadi fenomena pada institusi pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

## Sistem Pendidikan Holistik

Persoalan-persoalan semacam itu merupakan prioritas utama yang harus dieliminasi ke depan. Pendidikan perlu didekati dan ditangani berdasar dan berorientasi pada nilai-nilai pendidikan. Jangan lagi ada pendekatan politik kekuasaan yang mengotori dunia pendidikan.

Dalam kerangka itu, kita perlu membangun sistem pendidikan holistik yang segala sisinya, dari kebijakan pengelolaan hingga pengembangan kurikulum serta aplikasinya di dunia nyata, bernuansa pendidikan. Kita perlu mengembangkan kebijakan yang menjadikan segala kepentingan di luar kepentingan pendidikan tidak masuk ke dalamnya. Hal ini sangat urgen untuk segera diagendakan. Tanpa itu, bukan hanya peserta didik yang akan menjadi korban, tapi juga negara, masyarakat dan bangsa Indonesia. ©

# BAGIAN KEDUA:
# PEMBACAAN KEMBALI SIMBOL DAN RITUAL AGAMA

# KEBERAGAMAAN UMAT DAN SIGNIFIKANSI TEOLOGI KRITIS

Sejauh ini ada kecenderungan di kalangan umat beragama untuk mengembangkan pola keberagamaan yang anti kritik. Keberagamaan sebagai proses penafsiran dan pemahaman umat beragama terhadap agama diidentikkan dengan agama itu sendiri. Pola yang demikian memosisikan mereka sebagai kelompok yang lebih baik, lebih benar atau lebih ortodoks tinimbang kelompok atau dan umat dari agama yang lain.

Kasus Sang Timur yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan salah satu contoh konkret yang memperlihatkan secara telak pola keberagamaan semacam itu. Dalam kasus ini, orang atau kelompok dari agama tertentu dengan alasan teologis yang dianut mereka melakukan tindakan sepihak dengan menutup jalan ke arah lembaga pendidikan tersebut. Sebagai dampaknya, siswa mengalami kesulitan untuk masuk ke lokasi.

Melalui tindakan yang merugikan orang dan kelompok lain, mereka nyaris seutuhnya mengklaim diri mereka –eksplisit atau implisit – sebagai *khaira ummah*, kelompok terbaik yang diturunkan dari langit untuk menegakkan kebenaran di bumi persada. Mereka meyakini bahwa segala tindakan mereka, termasuk hal-hal yang merugikan orang dan kelompok lain, sebagai perbuatan yang selalu bernilai baik.

Pola keberagamaan yang demikian akan selalu menjustifikasi sikap dan perilaku penganutnya sebagai sesuatu yang dibenarkan yang dirujukkan kepada landasan-landasan teologis eksklusif dan sejenisnya. Pada saat yang sama hal itu membuat mereka tidak memiliki kesadaran yang memadai untuk menilai diri sendiri secara obyektif sehingga mereka steril dari kritik diri.

Dengan demikian, agama memunculkan diri sebagai fenomena gerakan yang penuh dengan ambivalensi. Pada satu pihak, ia diyakini sebagai sumber acuan bagi penganutnya untuk melakukan transformasi sosial menuju suatu kehidupan yang akan memberikan kemaslahatan bagi umatnya dan seluruh umat manusia. Namun di pihak lain, agama dihadirkan dalam aktivitas yang sering bertentangan dengan nilai-nilai ideal atau misi luhur agama itu sendiri.

***

Kesenjangan yang cukup lebar antara misi dan nilai-nilai ideal agama dengan realitas konkret keberagamaan umat terjadi ketika umat beragama memaknai agama berdasarkan paradigma tertentu yang meletakkan agama yang sejatinya mengemban moralitas pembebasan berada dalam kungkungan yang bersifat eksklusif. Agama dibebani dengan muatan-muatan kepentingan sempit yang dapat memudarkan kiprahnya sebagai gerakan moral yang bersifat lintas golongan, kesukuan dan semacamnya.

Dalam perspektif Islam, reduksi misi itu muncul bersamaan dengan terjadinya upaya penarikan Islam dari keberadaannya sebagai *rahmatan lil alamin* menjadi alat pengentalan identitas kelompok, dan golongan. Keberkahan bagi semua sebagai sebuah misi universal yang melampaui sekat-sekat primordialistik lalu diletakkan dalam kerangka klaim kebenaran yang hanya merujuk ke dalam kelompok dan golongan sendiri.

Dalam *Islam, Postmodernism and Other Futures* (2003), Ziauddin Sardar menjelaskan, penarikan Islam sebagai ideologi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pemandulan misi Islam yang membebaskan. Akibatnya –kata Sardar –*but once Islam, as an ideology, becomes a programme of action of a vested group, it looses its humanity and becomes battlefiled where morality, reason and justice are readily sacraficed at the altar of emotions.*

Metamorfosis ini menjadikan Islam kehilangan elan vitalnya sebagai gerakan pencerahan yang bernuansa kemanusiaan universal. Pendukung ideologi ini hanya sibuk meletakkan Islam sebagai landasan untuk membentengi kepentingan kelompok sendiri serta menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Dalam kondisi semacam itu, mereka tidak mau membuka, apalagi mau membangun, suatu ruang untuk dialog, negosiasi, atau pun tawar menawar. Yang tersisa hanyalah upaya mereka untuk menundukkan kelompok lain dalam hegemoni mereka.

Para ideolog meletakkan Islam sebagai saingan terhadap ideologi-ideologi lain. Dengan demikian, mereka menyikapi kehidupan sebagai sebuah pertarungan terus-menerus dalam rangka memperebutkan ruang publik. Realitas yang ada dihadapan mereka disikapi sebagai wacana kalah-menang dan sebagai praksis yang menundukkan atau ditundukkan. Tujuan dari semua "perjuangan" mereka adalah kemenangan mutlak dan kemampuan menundukkan orang atau kelompok lain.

Dalam proses kontestasi yang terus berlangsung itu, dimensi moral menjadi terabaikan. Nilai-nilai kemanusiaan perennial yang melekat pada ajaran agama menjadi tak tersentuh dan terbenam dalam debu-debu sejarah yang kian menebal dari saat ke saat. Kesetaraan, misalnya, sebagai etika sosial keagamaan dan kemanusiaan perennial disikapi sebagai sesuatu yang heretik: dan karena itu harus dibuang

jauh-jauh diganti dengan rasa keangkuhan yang ditampakkan melalui pemaksaan kehendak.

Sikap yang demikian menjadikan agama –meminjam ungkapan Kimball dalam karyanya *When Religion Becomes Evil*, 2002 –sebagai kejahatan dalam bentuk yang seutuhnya. Islam menjadi *corrupted religion* yang karakteristiknya selain klaim kebenaran yang absolut, kepenganutan yang membuta, pengembangan *the ideal time*, dan deklarasi "perang suci", juga cenderung menghalalkan segala cara dalam pencapaian tujuan.

Watak yang terakhir ini mengantarkan para penganutnya kepada tindakan-tindakan yang sering merugikan pihak lain. Demi tujuan penyebaran "syiar Islam" atau "pemberantasan munkarat" yang telah didefinisikan sesuai dengan *image* keberagamaan mereka sendiri, mereka tidak segan-segan menebarkan ancaman terhadap masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan misi keberagamaan mereka, serta mereka dengan gampangnya melakukan pengrusakan terhadap sarana-sarana publik. Mereka melakukan semua itu, tanpa memikirkan dampak negatif dari perbuatan itu, baik terhadap masyarakat secara umum, maupun terhadap citra agama yang dianut mereka. Dengan watak keagamaan semacam itu, mereka ingin membangun suatu bentuk kehidupan yang boleh dikata seutuhnya merepresentasikan kehendak dan kepentingan mereka semata.

***

Menguatnya ideologisasi agama, selain berujung kepada tatanan global yang pincang dengan akibat tergerusnya identitas komunitas tertentu dari umat Islam, juga yang sama sekali tidak dapat diabaikan berpulang dari sikap umat dalam memahami keberagamaan. Sebagian umat menyikapi religiositas sekadar kepenganutan kepada agama dan menjalankan ritual-ritual formal yang diwajibkan.

Dengan menganut Islam, umpamanya, serta menjalankan kewajiban ritualistik, mereka beranggapan telah menjadi bagian dari *khaira ummah*, umat terbaik sebagaimana dinyatakan teks suci. Mereka tidak menyadari bahwa signifikansi ritual terletak pada keberadaannya sebagai simbol bagi kepatuhan seseorang untuk menjalankan ajaran-ajaran substantif agama yang sejatinya bersifat moral. Dengan demikian, ketika seseorang atau komunitas tertentu menyatakan kesiapan untuk menjalankan ritual agama, pada saat yang sama mereka dituntut untuk menjalankan pesan-pesan moral yang ada di balik ritual tersebut secara khusus, dan moralitas keagamaan secara umum.

Pencapaian keberagamaan ini berjalan seiring dengan kesungguhan umat Islam dan umat beragama secara umum untuk menjadikan keberagamaan mereka sebagai proses merengkuh misi universal agama. Umat Islam perlu menyadari bahwa dengan sekadar menjadi umat Islam tidak secara otomotis mereka memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan orang, kelompok lain, atau manusia yang tidak beragama. Mereka dapat mencapai *khaira umah* manakala mereka mampu mengemban misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin* semisal nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas di antara sesama umat manusia.

Untuk mengetahui posisi mereka dalam mengemban misi itu, mereka perlu merekonstruksi teologi keberagamaan mereka dari sifatnya yang apologetik dan cenderung berbentuk justifikasi menjadi teologi kritis yang dapat menelanjangi keberagamaan mereka secara obyektif berdasarkan dimensi holistisitas internal ajaran agama dan kehidupan mereka, serta dimensi eksternal kehidupan global. Mereka dituntut untuk menjadikan agama sebagai kritik diri yang dapat membeberkan kelemahan (bahkan borok dan kebejatan) sikap dan perilaku mereka di hadapan sesama manusia dan dalam altar kehidupan dengan segala seluk beluknya.

Mereka perlu menyadari, sebagai agama fithrah, Islam akan selalu sesuai dan bernilai positif bagi seluruh umat manusia dan kehidupan. Karena itu, selama sepak terjang mereka belum memberikan sumbangan positif terhadap perbaikan kehidupan, berarti keberagamaan mereka belum menyentuh esensi keberagamaan hakiki. Pada sisi itu reformulasi keberagamaan menjadi bagian yang tidak mungkin dihindari untuk terus dikembangkan sehingga mereka dapat menyentuh misi agama sedekat mungkin. ©

# DARI KONFLIK MENUJU DIALOG YANG DIALOGIS

Di negeri ini pertentangan atau konflik horizontal maupun vertikal yang bermula dari perbedaan pandangan terus berkelanjutan sampai sekarang. Dalam bentuk yang horizontal, pertentangan itu di antaranya dapat dilacak pada konflik antarelite yang selalu menjadikan perbedaan sebagai ajang konflik terbuka. Misalnya, hampir semua pernyataan atau tindakan eksekutif ditanggapi negatif oleh pihak legislatif – DPR dan MPR, mulai dari pemecatan Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi, sampai persoalan penangkapan Guteres. Sedang dalam bentuk vertikal, pertentangan itu dapat dilihat pada penentangan (sebagian) masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah, misalnya tentang kenaikan BBM, penurunan bendera Bintang Kejora di Wamena oleh aparat keamanan, atau lainnya.

Terlepas siapa yang memicu persoalan, adanya perbedaan sudut pandang seharusnya tidak perlu sampai mengarah kepada konflik, apalagi sampai berlarut-larut. Idealnya, perbedaan sudut pandang seharusnya diletakkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara sehingga hal itu bisa memperkaya wawasan dalam penyelesaian masalah bangsa secara keseluruhan. Namun dalam realitasnya, perbedaan pandangan sering mengarah kepada konflik terbuka, yang pada gilirannya menyulitkan mereka yang terlibat konflik dalam menentukan langkah positif untuk menuju masa depan yang penuh kebersamaan.

Dilihat dari aspek mana pun, pertentangan horizontal antar elit bukan hanya akan menghambat proses penyelesaian krisis yang belum sepenuhnya pulih melanda negeri ini, tapi juga akan memiliki *trickle down effect* dalam bentuknya yang negatif, menetes, merambat ke masyarakat luas dalam bentuk konflik yang lebih tajam dan luas. Di tingkat bawah, pertentangan itu membiaskan proses dan nilai-nilai demokrasi ke arah berkembangnya otoritarianisme atau tindakan-tindakan tidak sehat lain yang tentunya akan merugikan segala pihak: mereka yang terlibat konflik, masyarakat luas, dan bangsa secara keseluruhan. Pada sisi ini pula pertentangan vertikal antara pemerintah, atau dan lembaga-lembaga tinggi negara pada satu pihak, dan masyarakat pada pihak lain memiliki dampak negatif yang kurang lebih sama.

Dalam konteks itu, dialog sebenarnya merupakan salah satu sarana dengan tingkat signifikansi cukup tinggi untuk meredam konflik dan menjadikan perbedaan sebagai pengkayaan pandangan dalam merumuskan solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi bangsa. Karena itu, adanya Sidang Tahunan MPR, pertemuan berkala antara ekskutif dan legislatif, gerakan rekonsiliasi, ataupun dialog dalam bentuk-bentuk yang lain merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya peredaman konflik yang berkepanjangan, serta pada gilirannya dapat menumbuhkan gagasan-gagasan segar bagi langkah-langkah konkret penyelesaian persoalan bangsa.

Namun sejauh ini, agenda tersebut ternyata tidak mampu memberikan angin segar sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, dialog yang terjadi justru mengarah kepada pembentukan konflik berikutnya. Di sini jelas ada yang salah – minimal ada yang kurang tepat – dalam pelaksanaan dialog yang dikembangkan selama ini, dan karena itu perlu direformulasi sehingga sesuai dan nilai dan tujuan dialog yang hakiki.

***

Dalam perspektif filosofis, efektivitas tidaknya suatu dialog sangat terkait dengan model relasi yang terjadi antarmanusia. Menurut Martin Buber ( 1983: 163-164), manusia memiliki dua relasi fundamental yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, relasi dengan benda-benda (atau obyek, pen.) yang disebut *Ich-Es* (*I-It*). *Kedua*, relasi dengan sesama manusia dan Allah (Tuhan) yang dinamakan *Ich-Du* (*I-Thou*). Relasi *Ich-Es* merupakan pola hubungan di mana seseorang menganggap sesuatu yang lain (termasuk lawan dialog) sebagai benda-benda, yang dapat disusun sesuai kehendaknya, dan diperalat sesuai kepentingannya.

Relasi model ini membuat seseorang melihat orang lain tidak dalam bentuk sebagai sesama manusia, tapi lebih merupakan sebagai suatu benda, obyek yang dapat digunakan, atau sesuatu yang tidak boleh mengganggu kesenangannya. Sedangkan relasi *Ich-Du* bersifat pola hubungan yang membuat seseorang akan "menyapa" manusia yang lain sehingga menimbulkan dialog yang sejati berupa "perjumpaan" antar sesama yang akhirnya menjadi relasi puncak antarmanusia dengan sang Pencipta. Wujud relasi puncak itu adalah kepatuhan manusia melaksanakan ajaran Tuhan yang di antaranya berupa pengembangan nilai-nilai kemanusiaan di jagad raya.

Berkaitan dengan tesis dari Buber tersebut, Raimundo Pannikar (2000: 198-222) menjelaskan, dialog yang saat ini berjalan merupakan dialog yang lebih bersifat relasi *Ich-Es*. Akibat yang paling tampak dari relasi itu ialah terjadinya dialog yang terlalu menekankan ada aspek dialektis, yaitu dialog tentang obyek-obyek yang berujung kepada muatan kepentingan. Kepentingan akan muncul sebab dialog dialektis merupakan pengandaian bahwa manusia yang sedang berdialog – karena ia makhluk rasional –akan menyodorkan sudut pandang masing-masing kepada Pengadilan Rasio, terlepas dari apa pun keyakinan mereka terhadap rasio.

Dengan demikian, dialektika terlalu mengagungkan "kebenaran" semata, khususnya kebenaran rasional. Padahal dengan hanya menunjukkan kebenaran, sebuah peperangan (pertikaian, pertentangan dan sebagainya, pen.) tidak akan pernah bisa dihindarkan. Atas dasar itu, diperlukan pola dialog yang lebih dari sekadar bersifat dialektis. Bukan berarti dialektika salah. Bagaimapun juga manusia adalah makhluk rasional, dan rasionalitas adalah bakatnya yang paling berharga.

Namun yang perlu disadari, rasionalitas bukanlah satu-satunya realitas bagi manusia. Selain kebenaran, perlu diperlukan aspek lain yang tidak terdapat pada dialektika, yaitu cinta. Jelasnya, dialog yang perlu dikembangkan antar sesama manusia ialah dialog yang dialogis; suatu dialog mengenai subyek-subyek, bukan obyek sehingga benar-benar otentik dan mendalam. Mereka berdialog bukan mengenai sesuatu, tetapi mereka melakukan dialog mengenai diri mereka sendiri; mereka mendialogkan diri sendiri.

Dalam kenyataannya, pertikaian memang tidak dapat dihentikan atau diselesaikan melalui dialog tentang kebenaran semata. Dari sejarah kita belajar, banyak orang atau kelompok bertikai, bahkan berperang justru untuk mempertahankan atau menyebarkan paham, ideologi atau semacamnya yang dalam anggapan mereka merupakan suatu "kebenaran". Karena itu Pannikar mengingatkan, dialog dialektis dapat menjadi alat untuk menguasai dan alat dari kehendak untuk menguasai. Jelasnya, melalui rasionalitas, suatu kebenaran sering dipaksakan untuk bisa diterima oleh pihak lain.

Ketika pihak lain tidak mau menerima kebenaran karena ia juga memiliki kebenaran sendiri dengan dalil-dalil yang juga rasional, maka yang tersisa adalah terjadinya dua sikap atau pandangan yang saling bertabrakan yang sulit dipertemukan lagi. Dalam kondisi ini adanya konflik menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar untuk muncul ke permukaan.

Kebenaran memang penting, dan karena itu harus diperjuangkan. Para filosuf dari zaman klasik sampai kontemporer, semuanya memiliki misi mencari dan menyebarkan kebenaran. Kehadiran semua agama juga dalam rangka menunjukkan kebenaran sebagai kebenaran dan kesesatan sebagai kesesatan. Melalui misi itu agama berupaya menyadarkan manusia agar mengikuti kebenaran dan menjauhi kesesatan. Sebab kebenaran merupakan jalan menuju Tuhan yang akan membuat manusia mencapai kesejahteraan hakiki dalam kehidupannya, sedang kesesatan adalah jalan setan yang akan mencelakakan, menyengsarakan manusia dalam kehidupannya.

Namun persoalannya bukan sekadar mengenai ontologi kebenaran semata. Terkait erat dengan suatu kebenaran adalah cara penyampaian kebenaran. Ketika seseorang atau kelompok menyampaikan suatu kebenaran kepada manusia yang lain, maka diperlukan suatu dialog yang mampu membuat orang atau kelompok itu dapat melihat pihak yang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri atau kelompoknya, bukan sebagai obyek yang harus dipaksa menerima tanpa daya suatu kebenaran. Pada tataran ini diperlukan keterlibatan emosi, yang dalam istilah Buber dan Pannikar disebut cinta; atau dalam Islam disebut *hikmah* yang dapat membuat mereka yang terlibat dalam dialog benar-benar "berjumpa" satu sama lain.

Melalui dialog yang dialogis, manusia mencoba memahami manusia lain yang menjadi lawan dialognya. Yang dipentingkan bukan lagi mencari upaya untuk memaksakan segala apa yang dianggapnya benar. Namun mereka berdialog untuk memahami keberadaan masing-masing, kemudian mencari cara yang tepat agar perbedaan dapat dipahami dalam kerangka kebersamaan untuk diabdikan kepada kemanusiaan. Semua itu dilakukan –disadari atau tidak – sebagai perwujudan kepatuhan kepada ajaran universal agama. Maka, klaim kebenaran masing-masing dapat dipertemukan dalam cinta dan kebersamaan.

***

Berdasarkan paparan tentang dua bentuk dialog tersebut, beralasan sekali bila dialog yang selama ini dikembangkan di negeri ini kurang menampakkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sebab mereka yang terlibat dalam dialog belum bersikap mau memahami dan "menjumpai" lawan dialog mereka. Justru kesan kental yang sangat tampak adalah hadirnya orang-orang yang memaksakan kepentingan diri dan kelompok masing-masing yang dibalut dengan dasar-dasar argumentasi formal, entah itu keyakinan, hukum, agama, ataupun lain-lainnya.

Karena itu, ketika –misalnya –Markas Besar Kepolisian menangkap Wakil Panglima Pro-Integrasi, Eurico Guteres pada hari Rabu 4 Oktober yang lalu (baca *Kompas*, 5/10 2000), pemerintah yakin bahwa tindakan itu adalah benar karena akan semakin memuluskan dalam penyelesaian sebagian persoalan yang dihadapi bangsa. Sebaliknya, pihak legislatif – misalnya Amien Rais dan Akbar Tanjung -- berpendapat, penangkapan itu terkesan hanya untuk menyenangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Kompas*, 6/10 2000).

Dari kasus ini tertangkap kesan yang cukup kuat bahwa relasi yang terjadi antar lembaga negara, atau dan antar elit lebih bersifat *Ich-Es*. Akibatnya persoalan penangkapan Guteres –juga persoalan lain yang menimbulkan pertentangan– ditarik ke dalam kerangka kepentingan masing-masing. Demikian pula ketika pemerintah menaikkan harga BBM, ratusan massa dari berbagai kelompok, mahasiswa, pemuda, buruh dan sebagainya melakukan aksi unjuk rasa menentang kenaikan tersebut. Mereka mengklaim bahwa mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menganggap DPR sebagai reformis gadungan (*Kompas*, 3/10 2000).

Tentunya, unjuk rasa adalah sah dan menjadi bagian dari demokrasi. Namun ketika masing-masing *ngotot* mempertahankan

"keyakinan" mereka, atau ketika unjuk rasa itu berubah menjadi kerusuhan, maka persoalannya akan menjadi lain. Pada perspektif itu pula terjadi peristiwa Wamena. Masing-masing, pihak aparat keamanan dan masyarakat memiliki sudut pandang berbeda yang dipertentangkan sehingga berakhir dengan penggunaan kekerasan dan jatuhnya korban yang tidak dapat dielakkan.

Dalam penyelesaian persoalan semacam itu, dialog dengan model yang berkembang saat ini ternyata tidak atau kurang efektif. Sebab terbukti, dialog-dialog tersebut paling *banter* hanya mampu membungkam sementara waktu –bukan menyelesaikan –persoalan yang terjadi, dan kemudian memanas lagi secara eskalatif pada waktu-waktu berikutnya. Karena itu, penyelesaian yang tuntas menuntut semua pihak agar mau mengembangkan dialog yang dialogis yang dapat memahami dan berimpati terhadap pihak lain.

Untuk mencapai hal tersebut, masing-masing terlebih dulu harus melepaskan semua kepentingan mereka yang bersifat pribadi, kelompok atau semacamnya. Pada saat yang sama, semua pihak hendaknya meletakkan perbedaan pandangan mereka di atas kepentingan kemanusiaan secara umum, dan kepentingan bangsa secara khusus. Bila mereka telah mau melepaskan kepentingan sempit mereka dalam sikap dan tindakan politik mereka, serta pada gilirannya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, maka itulah saatnya untuk mengembangkan dialog yang dialogis.

Dalam dialog ini, kelompok yang satu hendaknya "membaca" persoalan dan sekaligus memahami kelompok lain secara bersamaan, bukan "membaca" persoalan sebagai obyek yang terpisah, serta menjadikan persoalan dan kelompok lain sebagai obyek yang diarahkan kepada kepentingan kelompok sendiri. Artinya, masing-masing hendaknya melihat pihak lain sebagai mitra sejajar yang sama-sama bertanggung jawab dalam pengembangan nilai-nilai kemanusiaan

dan kelangsungan hidup bangsa sehingga keyakinan atau kebenaran mereka dapat dipertemukan dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian diharapkan di sana akan ditemui nilai-nilai, latar belakang dan tujuan yang sebenarnya dari gagasan atau tindakan yang selama ini membuat mereka terlibat dalam perbedaan, atau bahkan mengarah kepada pertentangan. Pada sisi ini, persoalan lalu akan menjadi milik bersama yang akan diselesaikan secara bersama-sama. Mereka – eksekutif dan legislatif, eksekutif dan masyarakat, atau dan sebagainya – benar-benar berjumpa dalam bingkai kemanusiaan sejati. ©

***

# SIGNIFIKANSI PERINGATAN MAULID

Beberapa waktu lalu sebagian umat Islam sempat dibuat *geger* dan marah ketika Rasulullah dikarikaturkan sebagai teroris. Unjuk rasa marak di mana-mana memprotes ulah nakal yang dianggap melecehkan agama ini.

Persoalan yang kemudian mengedepan terletak pada penyikapan umat Islam yang tampaknya hanya sebatas marah, protes, dan bahkan sebagian cenderung mengarah kepada tindakan destruktif. Unjuk rasa tentu wajar sebaga ejewantah aspirasi mereka selama mereka melakukannya dengan cara-cara damai. Namun jika hal itu sudah mengarah kepada anarkisme, persoalannya menjadi lain. Demikian pula jika umat Islam sekadar sibuk dengan sebatas protes tanpa ada kearifan untuk membuat agenda starategis ke depan, maka mereka tidak akan menggapai keuntungan apa-apa. Justru bisa-bisa mereka hanya akan menelan kerugian.

## Refleksi Diri

Ada beberapa kemungkinan yang mendasari munculnya karikatur yang mengolok-olok simbol agama Islam tersebut. *Pertama*, kesengajaan kelompok tertentu untuk memancing kemarahan umat Islam sehingga umat Islam dari saat ke saat sibuk dengan sikap reaktif, dan lupa terhadap persoalan dasar yang dihadapi mereka. *Kedua*, ketidaktahuan

sebagian masyarakat Barat mengenai Islam dan ajarannya. Menguatnya puritanisme yang kurang menghargai keragaman, serta menyebarnya aksi-aksi teroristik yang kebetulan dimotori orang Islam dan dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang Muslim menjadikan sebagian orang dan masyarakat Barat mengindentikkan Islam dengan terorisme.

Terlepas dari motif yang melatarbelakangi, umat Islam sepantasnya tidak perlu bersikap reaktif terhadap pembuatan karikatur Rasulullah (saw). Sebab reaksi tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Alih-alih, justru hal itu bisa menimbulkan persoalan baru yang lebih serius. Dalam menyikapi persoalan semacam itu, umat Islam seharusnya lebih mengedepankan respons kritis dan kreatif. Mereka perlu menyadari, adanya Islam dan umatnya yang sering menjadi bahan olok-olokan dan sejenisnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi umat Islam yang saat ini berada dalam posisi pinggiran dalam nyaris seluruh dimensi kehidupan mereka.

Umat Islam jangan sampai larut dalam dekapan emosional yang rendah. Tinimbang sibuk diperbudak dengan amarah, mereka sebaiknya melakukan refleksi diri untuk merajut masa depan yang lebih baik. Mereka dituntut membangun peradaban yang mampu berdiri sejajar, dan sekaligus bersanding secara kritis dengan peradaban dunia yang lain.

**Belajar dari Rasulullah**

Dalam konteks itu, keberhasilan Rasulullah Muhammad (saw) dalam mengantarkan umatnya meraih kejayaan kehidupan perlu dijadikan rujukan utama. Sejarah menunjukkan, dalam waktu hanya sekitar dua belas tahun Nabi berhasil mengubah kehidupan sosial masyarakat Arab yang primordial-sektarianistik dengan *savage ethic*-nya menjadi masyarakat yang berlandaskan persaudaran universal, dan

bermoral perennial. Dari masyarakat yang sangat membanggakan garis keturunan dan darah biru menjadi masyarakat yang egalitarian.

Kenyataan sejarah menunjukkan, keberhasilan Nabi itu senyatanya tidak dapat dilepaskan dari keimanan Rasulullah yang bersifat aksi. Agama diyakini sebagai sumber etika-moral yang harus dilabuhkan ke dalam realitas. Kesaksiannya tentang monoteisme mengantarkan Nabi kepada penyikapan terhadap seluruh umat manusia sebagai makhluk Tuhan yang setara yang harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai kesataran itu.

Dengan pola semacam itu pula Rasulullah menyikapi dan melaksanakan ibadah-ritualistik. Ia melakukannya sebagai proses dialog intens dengan sang Khalik untuk *muhasabah* dan memperkaya spiritualitas, yang pada gilirannya diejawantahkan ke ruang publik dalam bentuk pengembangan moralitas sosial yang luhur.

Bagi Rasulullah, Islam harus menjadi nilai-nilai transformatif yang dapat mengantarkan manusia kepada pencerahan bagi dirinya, dan manusia yang lain. Pencerahan yang harus diusung ke ruang publik: dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Tidak berlebihan jika kata Hodgson (1974) menyatakan, *Muhammad insisted on the moral responsibility of human being……The cosmos of the Qur'an was intensely human and even social.*

Berdasarkan ajaran itu, struktur sosial, budaya, politik dan sebagainya dibenahi. Rasulullah bukan hanya berkutat di tataran wacana, tapi ia sekaligus terlibat dalam aksi konkret. Nabi menjelaskan signifikansi egalitarianisme, keadilan, dan nilai-nilai sejenis, serta pada saat yang sama ia sendiri melaksanakan nilai-nilai itu, termasuk memberlakukannya terhadap dirinya sendiri. Di atas nilai-nilai itu, umat Islam membangun peradaban, mengembangkan sains dalam berbagai disiplin, dan teknologi yang berorientasi kepada kesejahteraan kehidupan.

Di bawah kepemimpinan Rasulullah dan para khalifah awal yang meneruskannya umat Islam berkembang secara relatif (untuk ukuran zamannya) sebagai –meminjam penjelasan Barry Knight *et. al.* (2002) – *good society*: suatu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka yang bersifat ekonomi, fisik, dan keamanan, dapat mengembangkan asosiasi di antara mereka, dan bisa berpartisipasi (aktif) dalam mengurus masyarakat.

Umat Islam dituntut untuk meladani Rasulullah melalui pendekatan semiotis-hermeneutik. Mereka niscaya untuk menguak substansi nilai yang dikembangkan Nabi dan inti tindakan yang dilakukannya. Nilai dan tindakan itu kemudian dikontekstualisasikan ke dalam kondisi kekinian dengan pola dan bentuk yang bisa berbeda. Pada saat yang sama, umat Islam perlu mengembangkan dialog keterbukaan yang lebih intens dan tulus dengan dunia Barat sehingga prakonsepsi dan sikap apriori yang masih ada pada masing-masing dapat dihilangkan, dan kesepahaman serta *mutual-respect* dibangun dengan kokoh.

Dalam kerangka itu terletak signifiknasi peringatan Maulid Rasulullah Muhammad (saw) yang tahun ini jatuh pada hari Selasa, 11 April. Kita perlu menjadikan peringatan Maulid dan peringatan keagamaan lain sebagai wahana reflektif untuk pengkayaan spiritual, peningkatan kecerdasan emosional dan untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan. Dengan demikian, peringatan maulid Nabi dan sejenisnya tidak akan terjebak ke dalam acara seremonial yang terus berulang tanpa berimplikasi pada terjadinya perubahan fundamental bagi keberagamaan umat. ©

# SIGNIFIKANSI ISRA' MI'RAJ DALAM KONTEKS KEKINIAN

Pada setiap tanggal 27 bulan Rajab dalam hitungan tahun qamariyah (*lunar year*), yang kali ini bertepatan dengan tanggal 24 September 2003, umat Islam, terutama di Indonesia, biasa memperingati peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah (saw). Kehidupan bangsa Indonesia memang lekat dengan upacara dan tradisi keagamaan. Setiap peristiwa yang berkaitan dengan agama nyaris tidak pernah terlewatkan; semuanya pasti diperingati secara seremonial.

Fenomena itu menjadi salah satu faktor adanya anggapan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dikenal sebagai bangsa yang taat beragama. Tepatnya, selain mereka antusias menyambut hari-hari yang berkaitan dengan keagamaan –termasuk peristiwa Isra' Mi'raj – melalui pelaksanaan acara-acara yang cukup meriah dan besar-besaran, mereka juga sangat patuh menjalankan ritual formal dan tradisi-tradisi keagamaan yang lain. Misalnya, setiap Jumat atau Minggu, mesjid dan gereja dipenuhi oleh umat agama masing-masing untuk melakukan serangkaian ibadah, misa dan sejenisnya.

Namun ironisnya, pada saat yang sama agama terkesan hanya dijadikan alat pengentalan identitas diri. Bahkan ada kecenderungan sebagian kelompok tertentu menjadikan agama sebagai alat pencapaian kepentingan kelompok mereka yang sempit dan sesaat. Agama

belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan moral-etika dalam mengembangkan keadilan, kesetaraan, solidaritas sosial, pertanggung-jawaban, dan kedamaian menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, peristiwa Isra' Mi'raj menjadi penting sekali diangkat bukan sekadar sebagai upacara seremonial semata, tapi sebagai momen dalam menguak nilai dan pesan moral agama yang terkandung di balik kejadian itu dan meletakkannya ke dalam kehidupan konkret.

***

Isra' Mi'raj -sama dengan peristiwa keagamaan yang lain –sejatinya merupakan peristiwa simbol-metaforis yang merepresentasikan nilai-nilai Islam substansial yang mencerahkan bagi umat manusia dan kehidupannya. Perjalanan Rasulullah (saw) dari Masjid al-Haram Mekkah ke Masjid al-Aqsha di Jerusalem, dan kemudian *mi'raj* ke langit ke tujuh menggambarkan suasana dialogis antara Nabi dan semua "realitas" yang dihadapi.

Perjalanan spiritualnya ke Jerusalem adalah representasi konkret dari dialog Nabi dengan situasi historis yang melingkupi kota suci yang kental dengan suasana keagamaan Kristen dan Yahudi. Dialog itu dikonkretkan Nabi dengan cara melakukan solat sunnah di Masjid al-Aqsha yang (dalam al-Quran disebutkan) diliputi keberkahan bagi seluruh manusia dan kehidupannya.

Suasana dialogis semacam itu berlanjut terus saat Nabi melakukan pendakian ke langit: alam transendensi, dan bersua dengan Nabi Musa, serta figu-figur sentral agama wahyu yang lain, dari Isa al-Masih sampai Nabi Adam. Saat itu terjadi dialog intens antara Nabi dan Musa mengenai kewajiban solat yang akan diberlakukan kepada umat Islam. Dialog itu dilanjutkan saat Rasul berada di hadapan Tuhan.

Berkah dari dialog *intens* itu adalah terjadinya pengurangan kewajiban solat dari lima puluh kali menjadi lima kali dalam sehari semalam.

Selain itu, Nabi dikisahkan pula berdialog dengan "realita" kehidupan eskatalogis yang ditampakkan dalam bentuk kesengsaraan atau keberuntungan manusia sebagai konsekuensi yang niscaya atas perbuatan manusia dalam kehidupan ini. Signifikansi akhirat menjadi tampak senyatanya dalam rangka pengembangan etika-moral yang meniscayakan manusia untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya sehingga setiap manusia yang mampu berdialog dengan realita akan terbimbing untuk selalu berada dalam kebenaran dan perbuatan yang baik.

Proses dialogis yang melingkupi perjalanan Nabi mengindikasikan, Islam adalah agama dialog. *Mitsaq* al-Madinah sebagai dasar konstitusi negara kota Madinah yang dibangun pasca peristiwa Isra' Mi'raj memberi penampakan secara utuh tentang sikap Islam yang sangat mengedepankan dialog dalam segala proses yang berhubungan dengan risalah yang dikembangkannya. Piagam Madinah dengan karakter semacam itu adalah nilai-nilai Islam yang sangat prinsip.

Melalui dialog, Islam memberikan ruangan dan kesempatan cukup besar bagi terjadinya pencerahan umat karena nilai-nilainya akan selalu kontekstual, menyapa kehidupan sesuai dengan karakter kehidupan sendiri yang sangat beragam. Dialog akan meletakkan umatnya kepada kondisi untuk selalu memahami kehidupan dan umat manusia secara utuh dan menyikapinya berdasarkan watak asalnya.

Sebagai konsekuensinya, pluralisme dalam keberagamaan umat Islam menjadi kemestian untuk dikembangkan. Dialog sebagai proses untuk menelanjangi diri sendiri, dan sekaligus upaya melihat orang, kelompok, atau subyek lain sebagaimana apa adanya akan mengantarkan umat Islam untuk memahami segala sesuatu yang ada di luar diri sendiri secara arif. Dengan demikian, hal itu akan

menjauhkan mereka dari sikap untuk mereduksi keberadaan yang lain ke dalam kepentingan sempit mereka sendiri. Pada gilirannya hal itu akan menumbuhkan secara kokoh sikap menghormati subyek lain dalam bentuk perwujudan pola perilaku yang dapat membawa kebaikan dalam kehidupan.

***

Isra' Mi'raj sebagai simbol dari signifikansi "*dialog dengan dan dalam kehidupan*" memiliki relevansi sangat kuat untuk dibumikan nilai-nilainya ke dalam konteks Indonesia saat ini. Kejadian berulang yang berbau terorisme di Indonesia belakangan ini –sampai batas tertentu –ikut dipicu oleh keengganan para pelaku untuk melakukan dialog dengan masyarakat, realitas Indonesia, atau situasi global yang sangat kompleks. Akibatnya, mereka tidak mampu menyikapi kehidupan secara bijak. Mereka terjebak ke dalam sikap eksklusivisme atau bahkan narsisme yang dimunculkan dalam bentuk kecenderungan untuk memperkokoh identitas diri sendiri semata, serta mendiskreditkan –dalam bentuk pengabaian hingga peniadaan –orang atau kelompok lain.

Demikian pula, maraknya tindak kejahatan lain, semisal korupsi berpulang dari ketidakmauan para koruptor untuk berdialog dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih terbelakang dari sisi ekonomi dan pendidikan. Para perampok kekayaan Negara atau rakyat itu tidak dapat berempati dan menjadi bagian dari masyarakat. Mereka hanya memikirkan diri sendiri; menumpuk kekayaan sebanyak mungkin di atas penderitaan masyarakat luas.

Di atas semua itu, pengembangan dialog sangat urgen untuk dilakukan karena bangsa Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu). Pada masa-masa itu, kaum politisi biasanya terpenjara dengan angan-angan dan

tujuan politik mereka yang sangat pragmatis, sekadar meraih suara sebanyak mungkin. Hal itu membuat mereka sangat sulit untuk mengembangkan dialog transformatif dengan masyarakat dan realita konkret Indonesia. Alih-alih, mereka membodohi, dan berupaya menundukkan masyarakat ke dalam kepentingan sendiri dan kelompok mereka.

Dalam kondisi Indonesia yang kritis itu, mudah-mudahan peringatan Isra' Mi'raj mampu menciptakan kembali suasana dialogis di kalangan umat Islam, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam suasana itu, mereka diharapkan dapat berdialog pertama kali dengan diri sendiri, mengasah nurani sehingga berkembang kecenderungan kepada nilai-nilai keagamaan substansial, semacam kesetaraan dan solidaritas sosial yang dapat mengantarkan kepada dialog dengan realita dan masyarakat luas.

Pada akhirnya, dialog dengan Tuhan diharapkan juga tumbuh subur pada bangsa ini sehingga mereka menyadari bahwa "akhirat" merupakan realitas riil yang ada di hadapan mereka; suatu kesadaran moral-teologis untuk mempertanggung-jawabkan keseluruhan tindakan kita kepada Tuhan, kehidupan dan sesama manusia. Dalam kondisi yang tercerahkan itu, pluralisme yang berwujud dalam sikap saling-menghargai, pengembangan kesetaraan, solidaritas dan keadilan sosial, serta sejenisnya akan berpijak kokoh di masyarakat luas.

***

# PUASA BERSAMA KAUM YANG TERPINGGIRKAN

Hari-hari ini puasa Ramadlan mendekati titik akhirnya. Aroma hari raya telah menyeruak di mana-mana, tapi bau yang menyebar lebih menampakkan diri dalam bentuk borjuisasi hari raya. Iklan penjualan barang-barang di mal dan pusat perbelanjaan untuk kebutuhan hari raya lebih terasa *ketimbang* kekhusyukan ibadah puasa itu sendiri. Di saat kita dituntut untuk mengendalikan diri dari segala perbuatan tercela, sebagian kita disibukkan dengan memborong pakaian dan belanjaan lain; dan sebagian yang lain berbelanja barang untuk dibagi-bagikan kepada sanak keluarga yang ada di kampung. Mereka melakukan itu bukan sebagai manifestasi rasa solidaritas sosial, tapi lebih untuk memamerkan "keberhasilan" mereka setelah sekian lama menjadi "orang kota". Di samping itu, sebagian elit kita ada yang dengan pongah memborong barang dengan uang hasil korupsi dan perbuatan tercela sejenis.

Di tengah-tengah kemeriahan yang bersifat artifisial itu, sebagian kelompok masyarakat sedang meradang dalam kepedihan akibat kemiskinan terus mendera mereka. Mereka nyaris tidak mendapatkan sama sekali sentuhan proses pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Alih-alih, mereka dari saat ke saat justru kian terpinggirkan dan semakin tidak berdaya. Sebagai contoh, *Kompas* memberitakan (Senin 27/10 2003), menjelang bulan puasa yang lalu warga Kampung Sawah Taman Anggrek, Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta kehilangan

tempat tinggal mereka karena rumah mereka telah diratakan dengan tanah oleh aparat. Kesedihan mereka ternyata belum selesai karena beberapa hari kemudian (tanggal 26/10 2003) tenda-tenda darurat yang mereka bangun telah dibakar oleh sekelompok orang.

Orang-orang semacam warga Kampung Sawah itu tentunya tidak sempat lagi memikirkan untuk berlebaran atau berhari raya, seperti membeli pakaian dan seumpamanya. Yang ada dalam benak mereka hanyalah mencari cara untuk bertahan hidup; melindungi diri mereka dari panas matahari dan dinginnya hujan, serta mendapatkan sesuap nasi untuk menyambung hidup mereka yang sekarat. Kenyataan hidup seperti itu adalah persoalan yang harus mereka hadapi sampai saat ini, ketika saat-saat kewajiban puasa akan usai, dan hari raya kian mendekat.

Fenomena di atas menampakkan secara nyata dua kenyataan yang sangat kontras dan bertentangan. Bulan puasa yang pada intinya sebagai asah nurani dan penajaman sikap dan perilaku sosial belum mampu menjadikan sebagian (besar?) masyarakat untuk menciptakan kerja-kerja kreatif dan sistematis yang dapat mengangkat kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari lembah penderitaan. Bahkan jika kita mau jujur, para elit dan kelompok *the haves* hanya bersibuk diri dengan hal-hal yang bersifat karitas murni yang tidak memiliki dampak apa pun terhadap masa depan kelompok yang terpinggirkan.

Dalam melakukan itu, orang yang berpunya kian memperkokoh eksistensi mereka sebagai kelompok kelas atas dan menempatkan masyarakat miskin sebagai kelompok yang benar-benar tercampakkan. Karitas dalam bentuk "*memberi ikan dan bukan kail*" hanya menambah kesenjangan antara orang yang punya dan orang yang miskin kian melebar tajam.

***

Paparan di atas mengentalkan kebenaran Hadis Nabi yang menyatakan bahwa banyak orang berpuasa yang puasanya tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap mereka. Mereka hanya merasakan haus dan lapar, tapi sikap dan perilaku mereka tidak mengalami proses transformasi sedikit pun. Mereka berpuasa, namun mereka tetap melakukan kejahatan dan hal-hal munkarat lain, seperti praktik korupsi, dan tidak perduli atas penderitaan orang lain.

Sejatinya puasa merupakan upaya refleksi total terhadap seluruh sikap, perilaku, dan atau aktivitas diri orang yang melakukan ibadah itu. Kewajiban untuk menahan diri bukan hanya terhadap segala hal yang dilarang, tapi juga terhadap sebagian hal yang pada hari-hari biasa (di luar bulan puasa) dibolehkan menjadi bukti jelas tentang keharusan umat Islam untuk melakukan transformasi diri mereka secara menyeluruh.

Melalui pengendalian diri, mereka diharapkan dapat mengasah nurani sehingga spiritualitas mereka memiliki ketajaman, yang dalam Islam disebut etika-moral takwa: sikap kehati-hatian untuk selalu berada dalam nilai-nilai dan ajaran moral luhur agama. Dengan demikian, mereka mampu menguak arti kehidupan yang hakiki dan tujuan kehidupan yang sejati.

Dalam perspektif Islam, kebersamaan merupakan makna hidup yang sejati. Karena itu, setiap individu (menurut Eaton 2002: 505) harus menjadikan orang lain tak ubahnya diri sendiri dan harus diperlakukan seperti itu. Artinya, jika orang lain merasa tidak betah hidup dalam penderitaan, maka setiap muslim seharusnya mampu berimpati, dan mencari solusi sistematis untuk melepaskan orang-orang yang menderita itu dari jeratan penderitaan.

Pencapaian kebersamaan meniscayakan umat Islam untuk menancapkan secara kokoh pola pandang tentang kesederajatan di antara sesama umat manusia. Dalam bahasa Fazlur Rahman (1987:

125), Al-Quran mengajak manusia menerima Tuhan Yang Mahaesa dan menerima kemanusiaan yang tunggal sebagai dua hal yang saling berkaitan, yang tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Hanya melalui keyakinan teologis semacam itu, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam kerangka kesederajatan dapat berpijak kuat pada pandangan dan hidup kesaharian umat Islam.

Pembumian kesederajatan dalam sikap dan perilaku umat Islam khususnya, dan umat manusia secara umum, tidak dapat dilepaskan dari keadilan, dan kejujuran. Keadilan menjadi nilai moral paling asasi yang sama sekali tidak dapat diabaikan untuk dilabuhkan dalam kehidupan. Tanpa adanya keadilan, kesederajatan tidak akan pernah berkembang subur dalam kehidupan. Pada saat yang sama, pencapaian keadilan hanya akan menjadi angan-angan yang sia-sia jika tidak disertai dengan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui kesalahan diri sendiri, dan kejujuran untuk menerima kebenaran orang lain hatta orang lain itu orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak pernah tersentuh pendidikan, atau orang yang selama ini dianggap sebagai sampah masyarakat.

***

Berangkat dari inti berpuasa itu, umat Islam –terutama di Indonesia yang saat ini kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih cukup tajam –seharusnya mampu mengembangkan puasa mereka sebagai upaya untuk "hidup bersama" dengan kelompok marginal yang sampai saat ini belum disentuh proses *community empowering* secara sistematis dan berjangkauan jauh ke depan. Hidup bersama mengindikasikan sikap empati, komitmen, peduli, dan terlibat aktif dalam persoalan yang dihadapi kelompok *mustadh'afin* dalam bentuk pencarian solusi transformatif yang dapat memberdayakan mereka dalam arti yang senyatanya.

Melalui puasa bersama kelompok yang lemah, kaum muslim –terutama kalangan elit penguasa serta kalangan menengah atas –bukan sekadar dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat karitas semata; apalagi dalam bentuk sekadar "pameran kekayaan" yang tetap menjadikan orang-orang yang lemah sebagai obyek keangkuhan mereka dituntut untuk bersedia mengendalikan diri, semisal menyadari dan membeli apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hari raya, serta menahan diri untuk tidak berbelanja apa yang sebenarnya hanya sebagai pemuas nafsu dan keinginan semata.

Pada saat yang sama, para pejabat dan elite lainnya perlu mengakui hak-hak yang lemah dan rakyat secara keseluruhan dengan cara berhenti secara total dari korupsi yang selama ini mereka lakukan secara *at home*, merampok harta rakyat dan negara. Sebab bagaimana pun juga, hal itu bertentangan dengan nilai dan tujuan puasa. Lebih dari itu, pelaku korupsi, dan orang yang mengabaikan hak-hak kelompok yang lemah, dan perbuatan lain sejenis –karena dalam perspektif teologis merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak manusia lain –tidak akan pernah mendapat ampunan Tuhan selama si korban tidak memberikan maaf atas dosa-dosa besar mereka.

Mudah-mudahan di saat-saat akhir puasa ini, mereka yang hanya sekadar berpuasa dari haus dan lapar akan tersadarkan mengenai inti berpuasa. Mereka bersedia hidup bersama orang mustadh'afin dalam bentuk menghentikan segala perbuatan yang akan merugikan mereka, dan menumbuh-kembangkan sikap dan tindakan yang dapat mengantarkan mereka kepada kehidupan yang benar-benar manusiawi; tenang serta sejahtera lahir dan batin. ©

***

# PUASA, TEOLOGI PENGENDALIAN MENUJU *CIVIL SOCIETY* YANG BERMORAL

Setiap tahun Ramadhan datang, setiap tahun pula umat Islam berpuasa. Namun sampai derajat tertentu, ritual tersebut seakan-akan sekadar menjadi rutinitas yang tidak mampu memberikan nilai-nilai transformatif. Dampak puasa sulit untuk ditumbuhkan dalam kehidupan konkret. Kezaliman tetap merajalela, kejahatan terus mengalami eskalasi yang cukup tajam, kekerasan tetap marak di mana-mana, serta proses dehumanisasi berlangsung terus dalam kehidupan.

Pada sisi itu, umat Islam dituntut untuk menelaah kembali nilai-nilai intrinsik yang terdapat pada puasa. Sebagai salah satu kewajiban dan manifestasi komitmen keberagamaan, puasa sangat signifikan untuk dibaca kembali berdasarkan nilai-nilai-nilai agama dan tujuan puasa sehingga menumbuhkan religiusitas yang benar-benar bermanfaat dan bermakna positif bagi kehidupan, serta dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

***

Untuk pengembangan pola keberagamaan semacam itu, bulan Ramadhan perlu dilihat dari tiga aspek: *Pertama*, dari aspek fungsinya sebagai proses menuju ketakwaan. *Kedua*, dari keberadaannya sebagai bulan di mana al-Quran sebagai dasar ajaran Islam diturunkan

pertama kali. *Ketiga*, dari sisi adanya *moment* yang sangat bernilai bagi umat manusia dan kehidupan, yaitu adanya Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam rangka pengembangan keberagamaan yang *kaffah* yang pada gilirannya akan memunculkan *civil society* sebagai suatu prasyarat mutlak menuju kehidupan berbangsa yang lebih manusiawi dan sekaligus berdimensi teologis-transformatif.

Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran, di bulan Ramadhan umat Islam mendapat kewajiban untuk menjalankan puasa. Melalui puasa, umat Islam diharapkan dapat memiliki moralitas takwa, suatu kondisi mental –menurut Fazlur Rahman (1984: 155) –berupa pertanggungjawaban manusia terhadap tindakannya, dan sekaligus pengakuan terhadap adanya suatu penilaian terhadap tindakan tersebut yang terletak di luar dirinya yang berasal dari sang Pencipta. Dengan demikian, manusia selalu berada dalam sikap dan perilaku yang dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang berarti bagi diri sendiri, manusia yang lain, dan kehidupan secara keseluruhan.

Ketakwaan tersebut akan menemukan arti yang sebenarnya bila dikorelasikan dengan kehidupan masyarakat. Sebab –masih kata Rahman (1989: 37) –dalam realitasnya individu tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, dan tidak ada individu tanpa masyarakat. Dari itu, takwa hanya akan memiliki arti dalam sebuah konteks sosial konkret. Artinya, manusia sebagai individu harus berupaya untuk merealisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam dirinya. Pada gilirannya, bila tiap-tiap individu telah mencapai derajat itu, maka dampaknya akan berlabuh secara kokoh dalam masyarakat.

***

Pengembangan ketakwaan menuntut umat Islam untuk memahami ajaran dan nilai Islam secara utuh. Secara substansial, dasar dan

prinsip ajaran Islam tersebut ditubuhkan dalam filsafat *iqra'* yang terdapat pada surat al-Quran yang diturunkan pertama kali pada bulan Ramadhan. Dalam surat itu Allah memerintahkan Nabi (saw) –yang harus diikuti seluruh umatnya –untuk membaca, meneliti, dan memeriksa ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyyah* (alam semesta) maupun *Quraniyyah* (Kitab Suci).

Melalui upaya itu, umat Islam diharapkan dapat memahami secara benar dan menyeluruh ajaran Islam yang berkaitan dengant ibadah-ritual dan akidah pada satu pihak, serta ajaran yang berhubungan dengan kehidupan dan jagad raya pada pihak lain. Dua bentuk ajaran itu selain memiliki kesamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Kesamaannya, umat Islam dituntut untuk melaksanakan kedua dimensi ajaran itu secara total.

Sedang perbedaannya, ajaran pertama yang berkaitan dengan masalah ibadah-ritual harus dilaksanakan secara ketat dan murni sesuai dengan ketentuan Kitab dan Sunnah Nabi, dan tidak boleh ditambah dan dikurangi (lihat Madjid, 1995: 59). Sedangkan ajaran yang berhubungan dengan kehidupan dan jagad raya, termasuk tentang diri manusia itu sendiri perlu dipahami, dan dimaknai melalui cara disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kehidupan yang terus berjalan.

Pemahaman tersebut perlu dikembangkan dalam setiap diri umat Islam dalam rangka membuahkan pandangan kritis, kreatif, memiliki orientasi yang jauh ke depan, dan sikap-perilaku yang *istiqamah*. Kreatif dan kritis akan muncul dari pemahaman yang holistik dan kontekstual, dan konsistensi akan berkembang dari pelaksanaan ritual yang ajeg. Dengan demikian, hal itu diharapkan bisa mengantarkan mereka kepada bentuk implementasi yang bersifat praksis yang mencerahkan, dan sekaligus disertai tanggung jawab dalam rangka mewujudkan tujuan kehidupan sebagaimana diajarkan agama.

Secara mendasar, kehidupan yang menjadi tujuan Islam adalah pendekatan diri umat kepada Allah dan mewujudkan sifat-sifat-Nya –seperti Mahakasih, dan Maha Pemberi rahmat –dalam kehidupan. Melalui upaya itu, rahmat dan sejenisnya dalam seluruh aspek kehidupan di jagad raya akan tersebar di muka bumi. Dalam bentuk konkret, rahmat adalah kehidupan yang damai, sejahtera, tenang dan tentram. Pada bulan Ramadhan pesan tersebut disampaikan secara tegas melalui kehadiran Lailatul Qadar. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa inti dari Lailatul Qadar adalah kehidupan yang damai.

Karena nilai-nilai kedamaian itu, Lailatul Qadar memiliki nilai-nilai kebaikan yang sangat mendalam yang tidak dapat dikuantifikasikan secara angka dibandingkan dengan nilai kebaikan yang terdapat pada waktu yang lain. Sebab kedamaian berarti tegaknya keadilan, kesetaraan dan persatuan, serta hilangnya penindasan, kezaliman, kekerasan, dan tindakan lain yang sejenis. Pada sisi ini korelasi antara ketakwaan dan kedamaian tampak terjalin dengan kuat.

Pada gilirannya, keberpegangan kepada nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan masyarakat yang emansipatoris dan mandiri. Bersifat emansipatoris karena masyarakat model itu akan terbebas dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan; dan bersifat mandiri sebab nilai-nilai yang dijadikan rujukannya adalah nilai yang bersifat ilahi semata sehingga dapat membebaskan umat dari ketergantungan pragmatis kepada negara atau kelompok, serta bebas dari kepentingan sempit dan sesaat. Inilah sebenarnya hakikat dari *civil society* –atau dalam istilah Hefner (2000) disebut dengan *civil Islam* –yang perlu dikembangkan dalam konteks Indonesia kekinian.

Dalam konteks itu, Gramsci (2000: 103) menyatakan, *civil society* adalah masyarakat etika atau moral. Sebab kehadiran mereka dalam rangka memperjuangkan kepentingan warga secara kritis, dan harus

diletakkan di atas landasan moral dengan cara mengedepankan *civility* serta menjauhkan diri dari segala tindakan yang biadab dan anarkis.

***

Jika kita mau jujur, sepanjang masa orde baru sampai kini masyarakat semacam itu masih terasa (agak) absen dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Akibatnya, selama orde baru masyarakat tidak memiliki kemandirian. Masyarakat terkooptasi oleh negara dan tidak memiliki tawar menawar yang tinggi dalam melaksanakan kehidupan mereka. Ketika datang era reformasi, masyarakat terperangkap dalam pola ekstrem yang lain. Dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya, masyarakat (termasuk komunitas Muslim) cenderung mengedepankan tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan semacamnya sehingga tidak bernilai positif bagai kehidupan mereka sendiri. Bahkan kekerasan, tindakan teror, perbuatan anarkis terus berlanjut sampai saat ini.

Dilihat dari perspektif manapun, kekerasan dan seumpamanya selain bertentangan dengan ajaran Islam, pola itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Pola semacam itu juga tidak akan mengantarkan umat (dan masyarakat luas) kepada kedewasaan. Selama mereka tidak dewasa, maka selama itu pula mereka akan terus digilas oleh zaman dan perubahan yang terus terjadi. Mereka tidak akan pernah berada setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam skala internasional.

Atas dasar itu, upaya pemahaman kembali nilai-nilai puasa secara utuh, dan sekaligus membumikannya dalam kehidupan konkret merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Melalui upaya itu, mereka diharapkan dapat merealisasikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan nyata sehingga berdampak positif bagi umat Islam sendiri, umat

manusia, dan kehidupan secara luas. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai. ©

***

# HALAL BIHALAL: MENGUKUHKAN MISI DAMAI AGAMA

Seusai hari Idul Fitri, umat Islam Indonesia secara khusus, dan bangsa Indonesia secara umum mulai tersedot dalam kegiatan halal bihalal. Tradisi khas Indonesia ini memiliki tempat yang sangat khusus dalam kehidupan bangsa sehingga setiap organisasi –swasta maupun pemerintah –, kelompok, etnis dan lainnya mengadakan cara halal bihalalnya sendiri.

Halal bihalal dapat mempertemukan komponen bangsa dan elemen masyarakat dalam satu majelis pertemuan dan altar kegembiraan yang mungkin jarang ditemukan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini sebenarnya silaturrahim menemukan tempat labuh yang cukup tepat. Dengan demikian, dendam antar pribadi, etnis, kelompok, dan bahkan antar agama seharusnya mencair, melebur, dan berubah menjadi satu rasa kebersamaan. Mereka seharusnya terikat kembali dalam humanisme universal.

Namun dalam realitasnya, nilai-nilai intrinsik yang terdapat dalam acara silaturrahim itu tidak sepenuhnya dapat membumi secara kukuh dalam kehidupan bangsa. Tahun-tahun yang telah dilalui bangsa ini membuktikan bahwa tidak berapa lama sehabis lebaran, dendam dan benci membara kembali, permusuhan dan kekerasan dalam beragam bentuknya merebak di berbagai tempat. Alhasil, tradisi halal bihalal belum mampu menjadi suatu kegiatan substansial yang

dapat menyumbangkan peran cukup berarti dalam mengembalikan bangsa kepada fitrah kemanusiaannya yang fitri.

Kenyataan itu menggugah kita untuk membaca kembali makna halal bihalal dan meletakkannya dalam konteks dan kondisi bangsa dalam kekinian. Upaya ini perlu dilakukan agar kegiatan tersebut memiliki arti yang signifikan dalam mendukung pengembangan kehidupan yang lebih mencerminkan nilai-nilai keagamaan sejati dan kemanusiaan sejati sebagaimana menjadi harapan bangsa secara keseluruhan.

***

Sejak awal, halal bihalal merupakan kegiatan yang memiliki mata rantai yang terkait erat dengan Idul Fitri. Kegiatan pasca lebaran ini senyatanya berada dalam bingkai yang kukuh yang menyatu dengan kegiatan Idul Fitri sebagai puncak keberhasilan umat dalam menunaikan puasa sebagai proses pengendalian diri. Moment tersebut merepresentasikan semangat Islam dalam bentuk munculnya kesadaran di kalangan umatnya untuk selalu mengendalikan diri dari segala sikap dan tindak kejahatan, serta kesiapan untuk meminta dan sekaligus memberikan kepemaafan kepada orang atau pihak lain.

Kesadaran semacam itu merupakan salah satu jalan yang akan mengantarkan umat Islam mendapatkan kembali kemanusiaan mereka yang fithri. Pencapaian derajat ini mengindikasikan bahwa mereka telah memperoleh kemenangan sebagai hamba Tuhan yang berhasil menundukkan segala bentuk dorongan, sikap dan perilaku jahat yang ada dalam hati mereka.

Pada saat yang sama, hal itu menunjukkan bahwa mereka telah mampu mengembangkan segala hal yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan religiusitas perennial, seperti solidaritas sosial, dan

cinta damai. Dengan adanya kemampuan itu, ungkapan semacam "*minal 'aidzin wal faizin*" atau dan "*mohon maaf lahir dan batin*" yang mereka sebarkan menjelang dan saat-saat hari raya akan menemukan bentuknya dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai yang terdapat pada Idul Fitri dan kemudian dikonkretkan dalam tradisi halal bihalal tersebut adalah suatu moralitas keagamaan yang agung. Secara prinsip, moralitas atau etika –menurut P. Edwards (1998: 41) adalah *standards of behaviour* yang memberikan otoritas untuk menilai suatu sikap dipuji atau dicela, dan dihormati atau dihina. Moralitas yang baik dan agung adalah substansi dan nilai yang menjadikan setiap sikap dan perilaku memiliki makna dan tujuan.

Kehidupan bermoral adalah kehidupan yang mempunyai makna bagi diri sendiri, manusia yang lain, dan alam semesta; serta sekaligus memiliki tujuan penyebaran kebaikan bagi semua penghuni alam semesta. Maka, moralitas identik dengan setiap nilai yang menjadi dasar bagi sikap dan perilaku yang dapat mengukuhkan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sebab melalui nilai-nilai itu, setiap sikap dan perilaku manusia akan selalu diarahkan kepada kebaikan bagi semua dan akan bernilai positif bagi terciptanya suatu kehidupan yang sesuai dengan fitrah kehidupan dan cita-cita seluruh umat manusia.

Pengendalian diri, silaturrahim, dan kepemaafan menjadi inti dari moralitas agama karena hal itu akan membuat seseorang selalu berupaya memadamkan dendam-kebencian, dan menggantinya dengan cinta dan kasih dan sikap yang sejenis kepada yang lain. Sikap itu pula akan membuat umat manusia bersikap toleran terhadap perbedaan dan mau menghargai pihak yang lain. Demikian pula, sikap tersebut akan membuat manusia selalu bersikap obyektif dalam melakukan intraksi dengan sesamanya sehingga akan selalu mengedepankan keadilan, kearifan, dan kebijakan.

Ujung dari semua itu adalah tertanamnya kedamaian dalam kehidupan umat manusia. Inilah salah satu misi utama Islam yang terdapat dalam Idul Fithri yang sejatinya dikukuhkan melalui acara halal bihalal.

***

Meletakkan halal bihalal dan tradisi keagamaan sejenis pada maknanya yang hakiki seperti itu memerlukan kesiapan umat Islam untuk mengkritisi pemahaman keagamaan mereka. Mereka dituntut untuk mampu membedakan antara Islam identitas dan Islam kebenaran. Dari pemahaman itu, Islam identitas –sebagaimana dinyatakan Soroush (2002: 33) –harus ditundukkan pada Islam sebagai kebenaran. Sebab, Islam sebagai kebenaran dapat berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lain. Sedangkan Islam identitas cenderung berseteru. (Bahkan) Islam model terakhir ini adalah Islam perang, bukan Islam damai.

Melalui pengembangan Islam sebagai kebenaran tersebut, halal bihalal akan dilihat bukan sebagai pengentalan identitas dan pengembangan simbol-simbol formal agama yang tanpa makna, serta bentuk eksklusivitas kelompok. Namun ia akan disikapi sebagai sarana untuk penumbuhan dan pemupukan nilai-nilai moralitas keagamaan substansial. Halal bihalal lalu menjadi wahana transformasi menuju kepada keberagamaan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab; keagamaan sesuai dengan misi Rasul (saw) sang pembawa risalah, yaitu rahmat bagi sekalian alam.

Eksistensinya sebagai rahmat karena Muhammad –sebagaimana diungkap al-Quran 3: 159 –dalam mengemban risalah selalu bersikap lemah lembut dan menjauhi sikap yang keras, dan hati yang kasar. Menjelaskan hal tersebut, Yusuf Ali (1989: 169) menyatakan, bahwa salah satu gelar Nabi (saw) adalah "*Mercy to all creation*", pengasih

kepada semua mahluk sehingga Rasul disayangi oleh semua. Hal ini menunjukkan bahwa misi Islam –sebagaimana direpresentasikan Nabi Muhammad (saw) – adalah mengembangkan dan melanggengkan kedamaian.

Dalam perspektif tersebut, halal bihalal harus dijadikan salah satu momentum penting dalam penyebaran misi itu. Meminjam ungkapan Bell (1997: 264), ritual keagamaan seharusnya dilihat sebagai sarana untuk menciptakan dan memperbarui komunitas, sebagai transformasi identitas kemanusiaan (bukan identitas kelompok, pen.), dan untuk menciptakan kembali arti keberadaan eksistensial manusia (*existensial sense of being*) dalam kosmos ini.

Alhasil, halal bihalal hendaknya dikembangkan sebagai suatu kegiatan yang merujuk kepada kesadaran humanistik dan nilai-nilai keagamaan yang pada intinya terletak pada misi pengembangan kehidupan yang bermoral –Islam sebagai kebenaran; Islam sebagai agama perdamaian. Selanjutnya, wujud konkret moralitas tersebut harus ditumbuh-kembangkan dan dilestarikan dalam sepanjang kehidupan mereka pasca kegiatan tersebut. Mereka tidak bisa hanya menjadikannya sekadar sebagai suatu formalisme yang menjadikan mereka terperangkap dalam sebatas kegiatan tersebut yang kemudian memudar selepas acara usai. Justru kegiatan tersebut perlu dijadikan awal dari proses rekonsiliasi hakiki dan perdamaian yang langgeng.©

***

# MUDIK, MENGAIS SPIRITUALITAS

Mudik yang khas Indonesia merupakan fenomena kehidupan unik yang tidak bisa didekati melalui ranah kognitif rasional semata. Aktivitas yang terjadi setahun sekali ini hadir lebih sebagai simbol kehidupan yang merujuk kepada nilai-nilai spiritualitas dan kedalaman makna. Karena itu mudik perlu dipahami dari perspektif kedirian manusia yang utuh.

Bayangkan saja, orang-orang dari tingkatan dan strata sosial yang sangat beragam bisa menyatu dalam satu emosional yang sama, mudik. Demi mudik, mereka rela berjubelan, mulai dari antri untuk membeli tiket hingga naik kendaraan. Mereka yang membawa kendaraan pribadi pun tidak mempersoalkan kemacetan jalan yang harus dilalui. Bahkan ada yang harus menempuh perjalanan berhari-hari. Sebagian mereka ada pula yang harus menguras kantong mereka, mengeluarkan uang yang tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh selama ini. Mereka semuanya memiliki tujuan sama: mudik, pulang kampung untuk satu atau dua hari, menengok desa, dan menyapa, atau bercengkrama dengan sanak keluarga.

Di mana rasionalitas mereka? Bukankah mereka bisa menggunakan telepon dan semacamnya –yang saat ini nyaris dimiliki setiap orang –untuk berkomunikasi dengan sanak mereka di kampung? Bukankah

kampung halaman mereka nyaris tidak ada bedanya lagi dengan kota yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini?

Pada sisi itu keunikan mudik menemukan titik labuhnya. Mereka bukan sekadar ingin berbincang dengan keluarga di kampung. Mereka bukan sekadar mau melihat desa yang mungkin pernah meninggalkan kenangan cukup dalam. Lebih dari itu, mereka –sadar atau tidak –menginginkan suatu kehidupan lain dari yang selama ini mereka jalani. Kejenuhan hidup di kota, kesumpekan keseharian pekerjaan yang mereka tekuni dan hal-hal yang sejenis dengan itu mengantarkan mereka untuk mencari perefensi kehidupan baru, atau kehidupan lama yang bermakna baru; dan mudik memberikan hal itu.

Dalam konteks itu, sebuah perjalanan yang berdimensi spiritual telah dimulai. Mereka –menyadari atau tidak –telah "dipaksa" oleh semacam kekuatan transendental untuk mencari nilai-nilai yang dapat mencerahkan kehidupan mereka: kearifan kehidupan desa yang damai dan sejuk, kerukunan dan solidaritas sosial yang tinggi. Mereka dituntun untuk menemukan makna kehidupan yang tidak selamanya bisa diukur oleh indikator-indikator yang bersifat materi.

Bisa saja nilai-nilai itu saat ini telah lenyap dalam kehidupan desa karena tergerus oleh arus modernisasi yang merambah ke mana-mana. Namun nuansa spritualitas desa –minimal dari *angle* kehidupan kota –tetap menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh dalam kehidupan kota. Mereka yang mudik bisa menggalinya kembali. Karena itu, tidak heran jika para pemudik yang selama hidup di kota tidak pernah tersentuh sejuknya nilai-nilai spiritualitas, mereka mencoba meraihnya kembali saat mudik. Mereka yang di kota berlumuran dengan kejahatan, ketika mudik dipaksa –oleh nurani, lingkungan, dan sebagainya –untuk hidup normal kembali, menjadi bagian dari masyarakat dalam arti yang senyatanya.

Persoalannya, nilai-nilai itu pada umumnya akan pudar kembali manakala mereka kembali ke kota. Mudik lalu tidak meninggalkan apa-apa selain keletihan, atau bahkan pemborosan dalam segala dimensinya. Bahkan ada kecenderungan, mudik bukan lagi menjadi perjalanan spiritual transformatif yang dapat mencerahkan, menyegarkan kehidupan mereka yang layu. Alih-alih, mudik dijadikan ajang pamer kehidupan yang berdimensi sosial-ekonomi. Sebagian mereka pulang kampung sekadar untuk mempertontonkan kemewahan, atau pola hidup konsumtif sebagai bukti keberhasilan hidup mereka di kota.

Kondisi semacam ini pada gilirannya membuat sebagian pemudik harus hidup dengan kepura-puraan. Agar dikatakan berhasil, mereka harus pamer mobil yang sejatinya sewaan. Mereka membagi-bagikan uang dan hadiah lainnya pada sanak keluarga, tanpa harus tahu lagi apa yang akan dijadikan modal sekembali mereka ke kota. Mudik lalu tidak memberikan makna apa pun selain tradisi yang di dalamnya penuh dengan hipokrisi dan kehidupan semu yang kian menggerus nilai-nilai moral yang selama ini telah mengalami degradasi cukup parah.

Fenomena semacam itu yang seharusnya perlu dikritisi bersama. Mudik perlu dikembalikan kepada makna dan tujuannya yang sarat dengan nilai-nilai keluhuran. Spiritualitas yang sejatinya intrinsik dalam mudik perlu dikais kembali, diangkat dan direkonstruksi, serta diinternalisasi menjadi salah satu dasar rujukan dalam membangun kehidupan yang penuh silaturrahim, dan lebih akrab dengan kehidupan alam. Untuk itu, kita harus meninggalkan sikap kepura-puraan, dan suka pamrih, dan menggantikannya dengan ketulusan dan kejujuran. Mari kita mulai. ©

# IDUL ADHA, NAPAK TILAS MONOTEISME SEBAGAI SUMBER MORALITAS

Kehadiran Idul Adha di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan yang saat ini dialami umat manusia secara umum, dan umat Muslim secara khusus memiliki makna yang sangat penting untuk ditangkap dalam perspektif ajaran dan makna agama yang substansial. Idul Adha merupakan ritual keagamaan Islam yang sarat dengan nuansa simbolik-metaforis yang perlu dimaknai secara kontekstual dalam pijakan nilai-nilai universal Islam.

Makna terpenting Idul Adha, salah satunya terletak pada upaya meneladani ajaran monoteisme Nabi Ibrahim (as) yang bersifat transformatif. Dalam perspektif Islam, pengalaman rasional dan spiritual yang dilalui Ibrahim mengantarkannya kepada keyakinan tentang tauhid sebagai suatu kebenaran yang hakiki. Ajaran ini meletakkan Allah sebagai sumber kehidupan, moralitas, dan bahkan Eksistensi itu sendiri. Tanpa Allah, yang ada hanyalah kekacaubaluan, kehampaan, atau bahkan ketiadaan dalam arti yang sebenarnya. Keyakinan seperti itu berimplikasi secara langsung kepada keharusan Ibrahim untuk menampakkan Eksistensi itu dalam kehidupan konkret sehingga manusia dan dunia dapat menyaksikan dan "menikmati" kehadiran sang Pencipta dalam bentuk suatu kehidupan yang teratur, harmonis, dan seimbang.

Pengorbanan atau persembahan yang dilakukan Ibrahim merupakan manifestasi dari hal itu. Peristiwa ini memiliki dua dimensi yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kejadian simbolik tersebut merupakan upaya pendekatan diri (*qurban*) dan dialog dengan Tuhan dalam rangka untuk menangkap nilai dan sifat-sifat ketuhanan. Proses ini mengondisikan umat manusia untuk melepaskan segala hawa nafsu, ambisi, dan kepentingan sempit mereka sehingga dapat "menjumpai" Tuhan. Secara horizontal, hal itu melambangkan tentang keharusan manusia untuk membumikan nilai-nilai itu dalam kehidupan konkret.

Wahyu Tuhan kepada Ibrahim untuk melakukan persembahan puttanya yang kemudian diganti dengan binatang qurban memperlihatkan bahwa tidak satu manusia pun boleh merendahkan manusia yang lain, menjadikannya sebagai persembahan, atau melecehkannya dalam bentuk apapun. Sebab manusia sejak awal dilahirkan setara dan sederajat. Nilai-nilai yang merepresentasikan kesetaraan dan sejenisnya itu perlu diaktualisasikan ke dalam realitas kehidupan sehingga dunia dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki.

Tuhan pada hakikatnya tidak membutuhkan apa-apa, termasuk persembahan. Perintah itu hanya untuk menguji ketaatan manusia dalam merespons pesan dan perintah ilahi dan kesediaannya untuk tidak dikungkung oleh kediriannya yang subyektif, atau impuls-impuls kejahatan yang menipu. Persembahan sekadar suatu simbol yang melambangkan makna yang lebih subtansial, yaitu ungkapan ketaatan untuk mengembangkan nilai-nilai agama yang sejatinya selalu bersesuaian dengan nilai kemanusiaan perennial.

### Monoteisme Islam

Berdasarkan pada monoteisme Ibrahim, Rasulullah (saw) mengajarkan bahwa seorang muslim dituntut untuk menyembah hanya kepada Allah (*tauhid uluhiyah*), dan pada saat yang sama harus pula

meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Mahaesa, bersifat mutlak, dan transendental (*tauhid rububiyah*). Keyakinan seperti itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang selain Allah adalah merupakan makhluk yang tidak memiliki hak sedikit pun untuk diperlakukan sebagai Tuhan atau disikapi seperti Tuhan. Pada saat yang sama itu, hal itu juga menggambarkan tentang ketidakbolehan manusia untuk diperlakukan semena-mena atau direndahkan karena manusia di hadapan Tuhan adalah sederajat.

Sebagai implikasi logis dari hal itu adalah munculnya tauhid sebagai nilai moral transformatif dalam kehidupan sosial. Ketauhidan Islam adalah akidah yang menumbuhkan moralitas pembebasan manusia. Dengan demikian, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara ide monoteisme pada satu pihak, dan pengembangan moral kemanusiaan universal pada pihak yang lain. Kedua aspek itu merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Surat al-Mā'ūn (107) telah menggambarkannya secara konkret nilai-nilai tersebut. Surat ini mengungkapkan dengan jelas bahwa orang yang tidak memiliki solidaritas sosial, dan nilai-nilai yang semacam itu adalah memiliki posisi yang sama seperti orang yang mendustakan agama.

Khotbah Haji Wada' (dan ibadah haji mesti berlabuh dalam Idul Adha) yang disampaikan Rasulullah (saw) mengukuhkan hubungan tersebut. Dalam ibadah haji tersebut, Nabi menyatakan tentang keharusan manusia untuk menjaga hak dan kehormatan orang lain, serta memperlakukan manusia yang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Menurut Rahman (1979: 25), khotbah Nabi pada kesempatan itu merepresentasikan tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi intisari perkembangan yang mendasari gerakan Islam dalam kemajuannya yang aktual dan tujuan yang ingin dicapainya. Prinsip tersebut adalah humanitarianisme, egalitarianisme, keadilan sosial dan ekonomi, kebajikan, serta solidaritas sosial.

Konkretnya, tauhid –kata Nasr (1975: 29) –merupakan alfa dan omega Islam. *Unity* selain bersifat pernyataan metafisik tentang karakteristik Zat yang absolut, juga merupakan suatu cara integrasi, wahana untuk menjadi utuh, dan sebagai realisasi kesatuan dalam semua eksistensi. Melalui prinsip-prinsip itu, umat Islam secara metafisik-vertikal harus meyakini keesaan Tuhan, dan pada saat yang sama mereka dituntut untuk mengusung nilai-nilai tersebut ke ruang publik dalam bentuk pengembangan moralitas yang dapat mencerahkan kehidupan.

## Meneguhkan Kembali Moralitas

Pengembangan tauhid seperti yang diungkap sebelum ini menjadi niscaya untuk dikembangkan dalam konteks kekinian karena (sebagian) masyarakat muslim cenderung untuk memaknai tauhid sekadar percaya dan meyakini keesaan Allah. Monoteisme telah dipangkas dari maknanya yang substantif sehingga Islam mengalami reduksi pada sekadar implementasi rukun Islam yang lima. Dengan demikian, tauhid belum menjadi *faith in action* yang menjadi rujukan moral dalam segala sikap dan perilaku.

Pengembangan tauhid dalam kerangka pemahaman yang holistik tersebut mensyaratkan adanya kesiapan umat Islam untuk merekonstruksi keberagamaan mereka dengan cara memahami dan memaknai ajaran dan nilai agama secara menyeluruh dan menghindari sejauh mungkin pemahaman yang sepotong-potong, dan parsial. Dalam sisi itu, umat Islam perlu menyikapi ritual-ritual agama selain sebagai konkretitasi bentuk kepatuhan kepada Tuhan, juga mereka perlu menangkap makna intrinsik –yang sebagian besar bersifat moral –yang terdapat pada upacara keagamaan tersebut.

Pada sisi itu, *udlhiyah* (*sacrafice*) dalam Idul Adha perlu dimaknai dalam kerangka pembumian nilai agama yang memiliki spektrum moral

yang sangat luas. Pengorbanan merepresentasikan upaya pencapaian nilai-nilai kebaikan sejati yang pada prinsipnya bersifat moralitas perennial dan universal, seperti melepaskan egoisme, narsisme, dan sejenisnya, berlaku adil kepada siapa saja, dan mengembangkan kesederajatan dalam kehidupan.

Melalui pemaknaan semacam itu, Idul Adha akan bersifat signifikan dalam meneguhkan keberagamaan yang substansial: kebertauhidan yang berimplikasi secara nyata dalam kehidupan. Hari Raya Haji mengingatkan kita tentang peristiwa keagamaan yang telah menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang berawal dari penghambaan diri manusia kepada kepentingan diri sendiri. Karena itu, Idul Qurban harus menjadi proses pembebasan manusia dari segala sifat-sifat yang akan membuat umat manusia lupa tentang jati dirinya sebagai makhluk Allah, yang satu dengan yang lain memiliki kesetaraan dan kesederajatan, serta juga perbedaan yang tidak harus dipertentangkan. Dalam kesetaraan dan perbedaan itu seluruh umat manusia seharusnya menjalin kerjasama yang hakiki, serta membuang jauh-jauh segala bentuk permusuhan, serta segala rupa kejahatan yang lain. ©

***

# MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN AGAMA YANG MENCERAHKAN

Sejauh ini pendidikan agama—khususnya dalam sistem pendidikan Nasional—tidak lebih dari sekadar pelengkap, bersifat marginal, dan terkesan terpisah dari keilmuan yang lain. Sepanjang sejarahnya, pendidikan agama tidak pernah mengalami sentuhan serius untuk dikembangkan sesuai dengan perubahan kehidupan yang terus berjalan. Ia diajarkan sekadar memenuhi tuntutan kondisi sehingga nyaris tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Wajar sekali bila pendidikan agama sarat dengan kelemahan mendasar mulai dari sisi *content*, sampai penilaian. Pada sisi materi, bahasannya sejak dulu hanya berkutat dengan seputar persoalan agama yang bersifat ritual-formal serta akidah/teologi yang terkesan eksklusif. Persoalan keagamaan yang lebih substansial tidak pernah dikuak secara kritis. Misalnya saja, mengenai pemaknaan kesalehan dalam konteks sosial, dan perlunya kerja rintisan yang kreatif dan transformatif, serta keharusan kerjasama dengan umat agama yang lain sebagai manifestasi dari keberagamaan yang benar.

Kedangkalan pemahaman semacam itu diperparah lagi dengan cara penilaian yang "karitatif". Artinya, keberhasilan pendidikan agama semata-mata didasarkan kepada penilaian yang bersifat belas kasihan; siapa saja yang telah mengikuti pendidikan agama, maka ia mesti dianggap telah memahaminya. Penilaian nyaris tidak didasarkan

kepada aspek yang bersifat kognitif dan afektif, apalagi yang bersifat konatif.

***

Pola pendidikan agama seperti itu telah menjadikan manusia "terasing" dengan agamanya, dan bahkan dengan kehidupan itu sendiri. Mereka mengenal agama sebagai persoalan yang hanya penuh dengan klaim-klaim kebenaran sepihak. Mereka terperangkap pada pemahaman ajaran agama yang bersifat permukaan, dan bersifat legal-formalistik yang hanya berkaitan dengan persoalan halal-haram, iman-kafir, surga-neraka, dan persoalan-persoalan lain yang seumpama dengan itu. Sedang ajaran dasar agama yang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, semisal kedamaian dan keadilan, menjadi terbengkalai, dan tidak pernah disentuh secara serius.

Akibatnya, pesan dan misi agama yang bersifat perennial terbenam di balik keberagamaan eksklusif. Teks-teks suci dibaca tiap hari, namun maknanya yang hakiki tidak berwujud dalam kehidupan. Kedamaian hidup, keadilan, persamaan kemanusiaan, dan nilai-nilai sejenis yang menjadi risalah agama-agama besar tidak lagi menjadi komitmen umat beragama.

Sebaliknya, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama merebak di mana-mana. Kezaliman, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ironisnya, kejahatan hidup berdampingan secara akrab dengan bentuk-bentuk keagamaan formal. Seseorang yang rajin melakukan ritual keagamaan tidak mustahil sebagai koruptor kelas kakap yang merugikan jutaan manusia yang lain. Demikian pula, seorang yang dianggap "tokoh agama" bisa jadi sebagai "pembunuh" berdarah dingin yang dengan ringannya menghabisi jiwa orang lain, justeru dengan menggunakan

nama "agama". Mereka bisa membunuh manusia lain dengan dalih perang suci dengan tanpa perasaan berdosa sedikit pun.

Semua itu—sampai batas tertentu—merupakan produk dari pendidikan agama formal yang selama ini berjalan di tanah air ini, dan tidak menutup kemungkinan terjadi pula di beberapa kawasan dunia yang lain. Pada sisi itu, jika kemanusian dan kehidupan masih merupakan komitmen bersama, maka rekonstruksi pendidikan agama menjadi kemestian yang perlu menjadi perhatian dari segenap kalangan: para agamawan, tokoh intelektual, dan kaum pendidik.

***

Untuk merekonstruksi pendidikan agama, pertama kali yang perlu dilakukan adalah telaah kritis dan menyeluruh terhadap agama, baik dalam bentuknya yang normatif maupun yang historis. Teks-teks suci yang bersifat normatif perlu dipahami secara utuh sehingga nilai-nilai dasar agama dapat ditangkap secara keseluruhan. Sedang dalam sisi historis, pemahaman umat terhadap agama sepanjang sejarahnya perlu diperiksa kembali.

Dalam perspektif Islam—sebagaimana diungkapkan Fazlur Rahman (1992)—tugas pertama yang amat penting adalah memeriksa kembali tradisi Islam yang tentunya berisi banyak hal yang islami, yang tidak islami, dan yang terdapat di antara batas keduanya. Sebagai contoh, pandangan yang bersifat eksklusif yang tidak sesuai dengan fitrah manusia perlu dipahami sebagai tradisi yang tidak sesuai dengan nilai agama. Melalui pembacaan kembali tersebut, tradisi—khususnya berupa pemahaman umat terhadap agama mereka dari masa ke masa—perlu dirumuskan dan diletakkan kembali dalam kerangka dasar ajaran agama yang bersifat universal sehingga bersifat dinamis, responsif, dan transformatif dalam kehidupan.

Sejalan dengan itu, sejarah agama-agama dengan segala cabang-nya—yang sampai saat ini terasa masih absen—perlu diperkenalkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan intelektualitas manusia. Melalui pengenalan terhadap agama lain, mereka diharapkan memahami kemunculan agama-agama dan keserupaan misi yang diembannya, serta perbedaan yang terdapat pada tiap-tiap agama. Pada sisi itu, perlu diupayakan *Cross-Cultural Criteria of Religious Truth*.

Menurut Stenger (1995: 106-107), kriteria kebenaran agama yang bersifat lintas kultural ini mensyaratkan adanya *metacriteria*, yaitu suatu kriteria yang dapat diaplikasikan selain terhadap tradisi keagamaan yang bersifat partikular, juga terhadap tradisi yang bersifat lintas budaya. Hal ini menuntut diskusi serius mengenai terma-terma keagamaan sehingga menghasilkan pemahaman yang bersifat lintas budaya yang jelas. Dengan kata lain, melalui metakriteria ini, nilai-nilai universal yang bersifat lintas budaya akan terangkat ke permukaan bersama dengan bentuk-bentuk kebenaran dan ritual partikular yang terdapat pada tiap-tiap agama.

Melalui lacakan terhadap sejarah agama yang bersifat lintas kultural tersebut, kita akan disadarkan bahwa setiap agama—seperti kata Darmaputera (1999)—mempunyai partikularitas dan tidak dapat begitu saja disamakan dengan yang lain. Namun hal itu bukan berarti terdapat agama yang begitu singular dan unik sehingga tidak ada bandingannya.

Melalui pemahaman itu, manusia diharapkan dapat mengetahui adanya kesamaan dan sekaligus perbedaan yang terdapat pada agama-agama. Atas dasar itu, mereka dituntut menjalin kerjasama melalui nilai-nilai universal yang terdapat pada semua agama, dan sekaligus mereka harus memperkokoh iman masing-masing melalui partikularitas yang terdapat pada agama mereka sendiri.

Pada gilirannya, pemahaman terhadap agama-agama lain akan menimbulkan keberagamaan yang inklusif dan pluralis. Para pemeluk agama akan mengerti dan menghormati perbedaan yang terdapat pada agama yang lain serta menjadikan perbedaan itu sebagai pengkayaan wawasan dan intelektual untuk membangun kerjasama yang kokoh antar-umat beragama. Hal ini diarahkan dalam rangka pengembangan kehidupan yang diridhai Tuhan; kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Di saat yang sama, mereka tetap teguh dengan keimanan mereka karena dengan partikularitas itu hanya agama mereka yang paling "sesuai" dengan diri mereka.

Pada sisi yang lain, pendidikan agama hendaknya diintegrasikan secara padu dengan keilmuan yang lain sehingga tidak menimbulkan pandangan dikotomis yang bisa menimbulkan anggapan bahwa antara pendidikan agama dengan keilmuan yang lain terdapat perbedaan nilai dan keutamaan. Untuk pemaduan ini, nilai-nilai universal agama perlu dikontektualisasikan dengan kenyataan kehidupan dalam berbagai dimensinya: sosial, politik, ekonomi, budaya dan semacamnya. Nilai-nilai agama perlu dijadikan landasan kehidupan tanpa terperangkap dengan simbol dan formalisme yang kaku. Justru yang dimunculkan adalah sikap agama yang positif terhadap kehidupan.

Akhirnya, semua itu hendaknya diletakkan pada penilaian obyektif terhadap kemampuan seseorang dalam memahami dan melaksanakan nilai dan ajaran tersebut, khususnya dalam melakukan interaksi dan kerjasama dengan umat dari agama lain. Hanya melalui pola pendekatan semacam itu, pendidikan agama dapat mencerahkan umat manusia dan kehidupan. Mereka akan memiliki iman yang kokoh dan sekaligus mampu memahami dan menghormati pemeluk agama yang lain yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kerjasama yang kokoh untuk merangkai kedamaian dan kesejahteraan yang abadi. ©

***

# BAGIAN KETIGA:

# MEMBACA KEMBALI AGAMA: PENGEMBANGAN DEMOKRASI, DAN *CIVIL SOCIETY*

# NILAI-NILAI MORAL: KEKUATAN MELAWAN PERANG DAN KEKERASAN

Gelar unjuk rasa menentang invasi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya ke Irak yang terjadi dalam gelombang besar dan melibatkan berbagai bangsa dan agama menunjukkan bahwa masyarakat dunia sebenarnya menolak perang dan kekerasan, serta lebih memilih kedamaian. Mereka menyadari bahwa kekerasan dan perang tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara tuntas. Bahkan hal itu hanya akan mengakibatkan penderitaan bagi manusia yang tidak berdosa. Di samping itu, penyelesaian melalui kekerasan hanya akan memberi peluang yang cukup besar terhadap munculnya kekerasan yang lain, seperti radikalisme agama, atau tindakan-tindakan yang berbau teror.

Namun kekuatan moral itu ternyata belum mampu menghentikan keangkuhan AS dan sekutu-sekutu setianya untuk memerangi Irak. Sejak beberapa hari yang lalu, AS yang diamini oleh Inggris dan Spanyol telah melakukan serangkaian serangan terhadap beberapa kota di Irak bagian selatan. Mesin-mesin perang mulai memporak-perandakan kehidupan. Hari-hari yang penuh penderitaan bagi penduduk Irak telah hadir mencengkeram kehidupan mereka. Batas antara kehidupan dan kematian menjadi tidak tampak lagi. Hari-hari yang menyesakkan menjadi begitu panjang karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui secara pasti batas akhir dari kekerasan dan kebiadaban itu.

Persoalan menjadi kian runyam ketika perang cenderung membuta-tulikan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia yang telah menjadi mesin perang akan membuat tolok ukur kebenaran dan kejahatan berdasarkan kriteria-kriteria subyektif dalam kerangka keangkukan dan rigiditas kedirian. Pembalikan logika untuk menjustifikasi tindakan menjadi sulit untuk dihindari. Ujung-ujungnya hanya akan mengantarkan kepada suatu kesimpulan yang telah direkayasa bahwa diri dan kelompok sendiri yang benar, dan kelompok lain adalah sesat, jahat, dan tidak akan pernah benar.

***

Senyatanya manusia dalam perspektif Islam dilahirkan dengan fitrah yang cenderung kepada kebenaran dan kedamaian. Kesejatian diri itu akan mengantarkan manusia kepada potensi untuk melihat dan menyikapi kehidupan sebagai amanah Tuhan yang harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan universal. Dalam kondisi fitrahnya, manusia akan menyikapi kehidupan sebagai milik "bersama", di mana setiap manusia, atau bangsa apa pun berhak untuk menikmati ketenangan dan kesejahteraan hidup, serta pada saat yang sama mereka memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan semacam itu.

Dalam rangka pencapaian kehidupan seperti itu, manusia dituntut –meminjam ungkapan Elshtain (1995: 66) –membangun *political body* yang dapat mengantarkannya kepada kebersamaan, menciptakan ke-*kami*-an, dan sekaligus memberikan kemampuan untuk tetap berbeda, serta dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang terdapat pada orang (atau kelompok, pen.) lain. Terkait dengan itu, kehidupan yang demokratis menjadi salah satu syarat mutlak untuk dijadikan referensi dalan kehidupan.

Demokrasi –menurut Neuhaus, sebagaimana dikutip Euben (2002: 257) –merupakan proses politik yang religius karena demokrasi menyangkut pertanyaan-pertanyaan moral tentang yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Artinya, ketika pandangan-pandangan moral itu telah dihilangkan dalam proses pengambilan kebijakan politik berarti hal itu merupakan kebijakan yang tidak demokratis. Kedamaian dilihat dari perspektif mana pun adalah kebaikan, sedangkan kekerasan merupakan kejahatan.

Rakyat atau masyarakat di satu pihak, dan moralitas di pihak lain merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Suara masyarakat perlu didengar karena mereka menyuarakan moralitas. Demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang mampu menangkap kearifan dan pandangan-pandangan moral seluruh masyarakat, bahkan seluruh umat manusia. Ketika masyarakat telah sepakat untuk menolak perang dan kekerasan, tapi perang tetap dilaksanakan, maka keputusan itu adalah tidak demokratis dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Secara substansial Islam memiliki nilai dan ajaran yang nyaris tidak memiliki perbedaan signifikan dengan pola pandang seperti itu. Sebagaimana diungkap Eaton, (2002: 483, 506), manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai proyeksi dimensi vertikal ke dalam tataran horizontal dituntut mampu bangkit (dengan kemampuannya mengetahui realitas) melampaui egonya yang bersifat duniawi dan kontingen. Umat Islam diwajibkan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat bukan seperti apa adanya melainkan bagaimana seharusnya. Dalam ungkapan yang lain, manusia, terutama umat Muslim memiliki kewajiban moral-teologis untuk mempersembahkan karya dan aktivitas yang terbaik kepada manusia yang lain dan kepada alam semesta sehingga sifat-sifat Tuhan yang Mahapengasih, dan Mahadamai membumi secara kokoh dalam kehidupan.

***

Nilai-nilai demokratis dan teologis sebagaimana dipaparkan sebelum ini tidak pernah memberikan ruang sedikit pun bagi pengembangan kekerasan. Karena itu, kehidupan dan cara yang damai dilihat dari *angle* mana pun adalah pilihan terbaik untuk dikembangkan dalam kehidupan. Namun realitas telah berbicara lain. Elshtain tidak salah menamakan bukunya (yang dikutip penulis) dengan judul *Democracy on Trial* karena senyatanya nilai-nilai demokrasi belum berlabuh secara kokoh dalam kehidupan ini.

Demokrasi dengan nilai-nilainya sebagai pembebasan manusia dari segala kebiadaban telah memfosil menjadi sekadar aksesoris yang tidak mampu mengubah sikap dan perilaku manusia yang serakah dan gila perang menjadi manusia yang lebih beradab dan cinta damai. AS yang mengklaim dirinya sebagai negara paling demokratis telah membiaskan nilai-nilai demokrasi untuk kepentingan kelompok sendiri dan segelintir elit yang berkuasa. Akibatnya, kehidupan demokratis yang bertujuan untuk kedamaian dan kesejahteraan tidak lebih sekadar slogan yang terkesan kian jauh dari jangkauan umat manusia.

Gerakan anti perang yang saat ini sedang terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia sebenarnya dapat menjadi kekuatan moral melawan serta menghentikan kekerasan dan perang. Agar kekuatan moral itu memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, gerakan ini dituntut memunculkan diri sebagai kekuatan yang sistematis yang memiliki jangkauan luas sehingga memiliki *pressure power* yang dapat menyadarkan manusia bahwa kekerasan dan perang hanya akan membuat penderitaan, dan penderitaan merupakan kondisi yang tidak pernah dikehendaki oleh siapa pun juga.

Bersamaan dengan itu, masyarakat anti perang dituntut untuk mengkritisi proses perlucutan senjata yang dalam realitasnya hanya diberlakukan bagi negara-negara tertentu. Perdamaian dan keamanan tidak akan pernah terealisasi secara nyata dalam kehidupan jika sebagian negara masih terus menciptakan atau menyimpan alat-

alat pemusnah dan penghancur dunia, apapun alasannya. Adanya persenjataan pemusnah yang dimiliki sebagian negara pasti akan disikapi sebagai ancaman bagi negara lain. Pada gilirannya, negara-negara lain –dengan alasan demi keamanan (yang sebenarnya membuat kian tidak aman) –akan berupaya untuk menciptakan alat yang sejenis. Dengan demikian, keamanan dan kedamaian tidak lebih dari sekadar retorika belaka yang tidak pernah menyentuh realitas kehidupan.

Pada akhirnya, penolakan perang dan kekerasan, serta upaya pengembangan kehidupan yang damai sangat tergantung kepada ketulusan hati nurani dan tanggung jawab kita semua. Selama kehidupan kita masih diperbudak oleh kepentingan diri dan kelompok, serta mempertentangkannya dengan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, selama itu pula celah-celah kekerasan dan potensi perang akan terus membayang-bayangi kehidupan. Sebaliknya, jika kita masing-masing telah mampu meletakkan kepentingan masyarakat luas dan umat manusia di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri, maka kedamaian dan kesejahteraan akan segera hadir menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan. ©

# URGENSI MENGEMBALIKAN *AMERICAN CIVIL RELIGION* KE VISINYA YANG TRANSFORMATIF

Ketegaran (atau lebih tepat keangkuhan) pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menundukkan Irak merupakan tindakan yang patut disesali oleh seluruh dunia, dan patut dipertanyakan oleh masyarakat AS sendiri. Pada saat yang sama, hal itu harus dikutuk dan dilawan melalui cara-cara damai oleh masyarakat dunia secara keseluruhan. Tindakan AS itu telah melecehkan nilai-nilai *American civil religion* yang senyatanya telah mampu mengantarkan negara itu ke gerbang kemerdekaannya, dan pada masa berikutnya dapat memberikan kearifan kepada bangsa Amerika untuk menyelesaikan persoalan perbudakan serta menjadikan negara itu sebagai negara demokrasi.

Melalui penyerangan ke Irak itu, pemerintah AS telah menjadikan *civil religion* – meminjam ungkapan Bellah (1970: 1986, 1984) –sebagai *a cloak for petty interest and ugly passion*. AS terperangkap ke dalam ketergantungan kepada kekuatan fisik *ketimbang* kepada kemampuan intelegensi (dan moral, pen.) sehingga konfrontasi militer dan semacamnya dianggap sebagai jalan menuju kehormatan bangsa. Pemerintahan Bush telah membiaskan *civil religion* sebagai kekuatan moral bangsa Amerika ke dalam absolutisme dengan tujuan untuk mendukung dan menghalalkan ambisi, keserakahan, dan kepentingan sempit dan primordialistik. Dalam reduksi itu, kebebasan, kesederajatan, dan pluralisme yang selama ini selalu

digaungkan AS menjadi sekadar retorika yang dijadikan alat untuk menutupi kepentingan sempit negara adi kuasa itu.

Keberlangsungan fenomena tersebut akan memberikan dampak yang sangat mengerikan bagi masa depan umat manusia dan kehidupan. Absolutisme akan mengantarkan AS kepada upaya untuk menjadikan negara-negara lain yang tidak seide atau tidak tunduk kepada kemauan AS sebagai mangsa berikutnya. Di saat itu, kehancuran kehidupan dunia akan menjadi realita yang sulit untuk dibantah lagi.

***

*American civil religion* pada prinsipnya berasal dari konsep Rousseau tentang *civil religion*. Sebagaimana dikutip Cassanova (1994: 60), terma itu merujuk kepada hak-hak kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat, sehingga dalam dua wilayah itu tidak ada satu kekuasaan pun yang berhak mengontrol. Namun pada saat yang sama, hal itu memerlukan keberimanan sipil yang sejati; suatu keniscayaan yang menjadi urusan "agama" untuk mengaturnya bukan sekadar sebagai dogma agama, tapi lebih merupakan sentimen sosiabilitas sebagai prasyarat mutlak untuk menjadi warga negara dan sekaligus manusia yang baik.

Sebagai sentimen sosialibilitas, agama sipil dituntut untuk meramu nilai-nilai substansial agama-agama yang dianut masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam satu kerangka acuan kehidupan sosial-politik yang kokoh, tanpa harus menghilangkan jati diri dan otentisitas masing-masing agama. Agama sipil bukan dimaksudkan untuk mengganti agama, namun lebih diarahkan sebagai dasar pijakan dalam membangun kebersamaan berdasarkan perbedaan yang ada untuk mengembangkan kehidupan yang benar-benar mencerahkan bagi umat manusia.

Dengan demikian, agama sipil memiliki komitmen yang tidak dapat ditawar untuk meletakkan keadilan, kesetaraan, pluralisme, dan nilai-nilai sejenis sebagai anutan dalam kehidupan bersama, baik sebagai warga suatu negara maupun sebagai warga dunia. Melalui pembumian nilai-nilai itu, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di berbagai belahan dunia diharapkan dapat menjadi realitas nyata dalam kehidupan.

Nilai-nilai semacam itu telah menumbuhkan semangat perennial yang mengantarkan penduduk daerah-daerah koloni Inggris di benua Amerika untuk berjuang meraih kemerdekaan dengan mendirikan negara baru yang kemudian dikenal dengan *the United States of America* (AS). *The founding farthers* dan beberapa Presiden AS terdahulu, seperti Washington, Adams, Johnson, Jefferson, dan John F. Kennedy merupakan anak-anak terbaik *American civil religion*. Tanpa menyebut atau mengkaitkan dengan agama tertentu, mereka –sebagaimana diungkap Bellah –mengedepankan signifikansi Tuhan atau agama dalam kehidupan sebagai prinsip etika-moral yang harus dijadikan rujukan dalam kehidupan bangsa. Melalui etika-moral universal itu, bangsa dan pemerintah Amerika memiliki kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang bermoral sehingga warga negara Amerika, dan warga negara lain sama-sama memiliki kesetaraan dalam arti yang hakiki.

Hasil dari semua itu adalah berkembangnya kebebasan dan kesederajatan yang dialami oleh warga negara Amerika, meskipun mereka, masing-masing, memiliki perbedaan dalam sisi etnis, ras, atau agama. Namun persoalan bukan berarti telah selesai. Dalam realitasnya, *stereotyping* yang kemudian memunculkan sitigmatisasi terhadap komunitas tertentu masih muncul ke permukaan. Pada taraf selanjutnya, pola itu justru meluas kepada pengembangan citra negatif terhadap bangsa lain atau dan sebagainya.

Sampai derajat tertentu, hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama sipil Amerika yang dalam sepanjang sejarahnya merupakan proses tarik menarik antara humanisme sekular, evangelisme (dalam pengertian sekular atau teologis), dan nilai-nilai demokrasi yang transformatif. Pada gilirannya aspek "evangelisme" (bukan dalam pengertian gereja murni, tapi dalam arti bahwa dunia lain harus tunduk di bawah kekuasaan Amerika) dalam agama sipil Amerika mengalami penguatan yang cukup berarti. Fenomena semacam itu yang akhirnya menjadikan orang-orang Amerika semacam George W Bush memiliki ambisi untuk menaklukkan negara lain dan menjadikannya sebagai boneka Amerika. Dalam kondisi seperti itu, pluralisme mengalami pemudaran, berganti menjadi absolutisme yang mengancam eksistensi bangsa-bangsa lain di luar Amerika.

***

Sebagai negara adikuasa, AS dengan absolutisme yang dianutnya tentu sangat membahayakan bagi terciptanya masa depan umat manusia yang lebih cerah. Kenyataan ini senyatanya bukan hanya menjadi keprihatinan masyarakat di luar AS, tapi juga menjadi kecemasan masyarakat AS sendiri. Karena itu, warga negara AS, para kaum intelektual, dan kaum agamanya dituntut untuk mengembalikan *American civil religion* kepada visi awalnya yang *genuine*: yaitu terjadinya transformasi nilai etika-moral keagamaan yang membebaskan dan mencerahkan ke dalam kehidupan konkret umat manusia.

Pencapaian ke arah itu mensyaratkan nilai-nilai agama perlu dikembangkan sebagai nilai universal yang dapat diusung ke wilayah publik yang plural dan sangat beragam. Dalam pengusungan itu, nilai-nilai agama perlu dibebaskan dari keranda formalisme sehingga nilai yang akan lahir nanti merupakan moralitas perennial yang menjadi

kebutuhan semua umat manusia untuk mengembangkan kehidupan mereka yang lebih manusiawi.

Dalam konteks itu, umat Muslim Amerika –sebagai misal –perlu mengembangkan konsep akhlak-politik al-Quran, *al-maslahat al-'am* (kemaslahatan umum), sebagai nilai-nilai yang dapat disumbangkan bagi pembumian visi *civil religion*. Melalui pembumian nilai itu, absolutisme tidak akan mendapatkan tempat lagi untuk berkembang karena hal itu pada prinsipnya bertentangan dengan kepentingan asasi manusia. Demikian pula "*promise land*" yang berasal dari ajaran Hebrew-Christiany perlu dimaknai sebagai adanya hak bagi setiap bangsa untuk mengatur negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara atau pihak lain. Dalam pengertian seperti itu, tanah yang dijanjikan merupakan representasi dari kemerdekaan hakiki yang harus dimiliki setiap bangsa. Bangsa dan negara yang lain, termasuk AS, tidak memiliki hak sedikit pun untuk masuk terlalu dalam, mencampuri persoalan intern suatu bangsa.

Pengembalian agama sipil Amerika kepada visinya yang luhur itu mengharuskan *civil society* yang berkembang di AS untuk memperkuat posisinya secara sistematis, berjejaringan luas, dan *sustainable* sehingga mereka benar-benar memiliki tawar menawar yang cukup tinggi dalam berhadapan dengan negara. Masyarakat sipil yang berkeadaban itu dituntut secara moral untuk memiliki daya tekan yang cukup ampuh dalam melakukan pencerahan terhadap negara yang telah terperangkap ke dalam orientasi kekuasaan semata. Dengan demikian, tindakan imperialistik Amerika mudah-mudahan akan berganti dengan tindakan yang bersifat kenabian yang lebih mengedepankan kasih dan kedamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia. ©

***

# MORALITAS DEMOKRASI-TEOLOGIS, KEKUATAN MELAWAN KEKERASAN YANG DEHUMANISTIK

Kekeringan spiritualitas yang dialami manusia kontemporer telah membuat kemajuan teknologi, informasi, dan sejenisnya tidak dapat memberikan kesejahteraan dan ketenangan hakiki kepada umat manusia. Realitas menunjukkan, kemajuan yang mereka capai telah menjadi bumerang yang memakan diri sendiri. Kemajuan justru melahirkan kekerasan sehingga barbarisme tetap menjadi fenomena kehidupan; bahkan pola itu –sampai derajat tertentu –mengalami eskalasi yang cukup mengerikan dalam sisi kuantitas dan sekaligus kualitas.

Tragedi Irak yang terjadi beberapa waktu yang lalu menelanjangi secara utuh barbarisme manusia kontemporer itu. Penderitaan ribuan manusia telah dijadikan semacam proyek untuk kepentingan segelintir manusia. Sebagai misal, ketika perputaran dana telah mencapai titik jenuh serta sulit untuk dikembangkan, maka sekelompok manusia –tanpa emosi sedikit pun –rela membantai ribuan umat manusia yang lain dan menghancurkan suatu negara sehingga pasca kehancuran itu mereka memiliki peluang untuk "membangun" kembali negara itu melalui dana-dana yang nyaris macet.

Ironisnya, mereka melakukan semua itu melalui kemasan retorika yang sangat apik; kesesatan dibungkus dengan kebenaran artifisial, dan kejahatan diancangkan dalam bentuk kebaikan yang semu. Dalam

kondisi ini, manusia telah kehilangan fitrahnya yang sejati. Manusia telah mengalami dehumanisasi yang sangat parah. Ia telah menjadi makhluk sangat barbar, anarkis, serta hipokrit sehingga tidak mampu mengemban amanah Tuhan untuk menjadikan kehidupan sebagai tempat yang benar-benar layak huni bagi semua makhluk-Nya.

***

Senyatanya manusia dalam perspektif Islam dilahirkan dengan fitrah yang cenderung kepada kebenaran dan kedamaian. Kesejatian diri itu akan mengantarkan manusia kepada potensi untuk melihat dan menyikapi kehidupan sebagai amanah Tuhan yang harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan universal. Dalam kondisi fitrahnya, manusia akan menyikapi kehidupan sebagai milik "bersama", di mana setiap manusia, atau bangsa apa pun berhak untuk menikmati ketenangan dan kesejahteraan hidup, serta pada saat yang sama mereka memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan semacam itu dan menyebarkannya secara konkret di seluruh belahan dunia.

Dalam rangka pencapaian kehidupan seperti itu, manusia dituntut –meminjam ungkapan Elshtain (1995: 66) –membangun *political body* yang dapat mengantarkannya kepada kebersamaan, menciptakan ke-*kami*-an, dan sekaligus memberikan kemampuan untuk tetap berbeda, serta dapat menghargai dan menghormati perbedaan yang terdapat pada orang (atau kelompok, pen.) lain. Terkait dengan itu, kehidupan yang demokratis menjadi salah satu syarat mutlak untuk dijadikan referensi dalan kehidupan.

Demokrasi –menurut Neuhaus, sebagaimana dikutip Euben (2002: 257) –merupakan proses politik yang religius karena demokrasi menyangkut pertanyaan-pertanyaan moral tentang yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Artinya, demokrasi adalah

pengejawantahan nilai moralitas yang berintikan humanisasi yang transformatif. Karena itu, ketika pandangan-pandangan moral itu telah dihilangkan dalam proses pengambilan kebijakan politik berarti hal itu merupakan kebijakan yang tidak demokratis. Kedamaian dilihat dari perspektif mana pun adalah kebaikan, sedangkan kekerasan dipandang dari sudut apa pun merupakan kejahatan.

Rakyat atau masyarakat di satu pihak, dan moralitas di pihak lain merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Suara masyarakat perlu didengar karena mereka menyuarakan moralitas.

Demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang mampu menangkap kearifan dan pandangan-pandangan moral seluruh masyarakat, bahkan seluruh umat manusia sehingga menjadi proses pemanusiaan manusia. Ketika masyarakat telah sepakat untuk menolak kekerasan, tapi kekerasan tetap dilakukan, maka keputusan itu adalah tidak demokratis dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral yang humanistik.

Secara substansial Islam memiliki nilai dan ajaran yang nyaris tidak memiliki perbedaan signifikan dengan pola pandang seperti itu. Sebagaimana diungkap Eaton, (2002: 483, 506), manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai proyeksi dimensi vertikal ke dalam tataran horizontal dituntut mampu bangkit (dengan kemampuannya mengetahui realitas) melampaui egonya yang bersifat duniawi dan kontingen. Umat Islam diwajibkan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat bukan seperti apa adanya melainkan bagaimana seharusnya. Dalam ungkapan lain, manusia, terutama umat Muslim memiliki kewajiban moral-teologis untuk mempersembahkan karya dan aktivitas yang terbaik kepada manusia lain dan kepada alam semesta sehingga sifat-sifat Tuhan yang Mahapengasih, dan Mahadamai membumi secara kokoh dalam kehidupan.

***

Nilai-nilai demokratis dan teologis sebagaimana dipaparkan sebelum ini tidak pernah memberikan ruang sedikit pun bagi pengembangan kekerasan dan segala bentuk barbarisme. Karena itu, kehidupan dan cara yang damai dilihat dari *angle* mana pun adalah pilihan terbaik untuk dikembangkan dalam kehidupan.

Namun realitas telah berbicara lain. Irak telah hancur berantakan, dan Aceh tidak pernah mengalami damai yang sebenarnya. Elshtain tidak salah menamakan bukunya (yang dikutip penulis di atas) dengan judul *Democracy on Trial* karena senyatanya nilai-nilai demokrasi belum berlabuh secara kokoh dalam kehidupan. Demokrasi dengan nilai-nilainya sebagai pembebasan manusia dari segala kebiadaban telah memfosil menjadi sekadar aksesoris yang tidak mampu mengubah sikap dan perilaku manusia yang serakah dan gila kekerasan menjadi manusia yang lebih beradab dan cinta damai.

Gerakan anti kekerasan, atau anti perang yang terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia beberapa waktu yang lalu sebenarnya dapat menjadi kekuatan moral melawan serta menghentikan kekerasan dalam kehidupan. Agar kekuatan moral itu memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, gerakan ini dituntut memunculkan diri sebagai kekuatan yang sistematis yang memiliki jangkauan luas sehingga memiliki *pressure power* yang dapat menyadarkan manusia bahwa kekerasan dan barbarisme hanya akan membuat penderitaan umat manusia; dan penderitaan merupakan kondisi yang tidak pernah dikehendaki oleh siapa pun juga.

Bersamaan dengan itu, masyarakat anti kekerasan dituntut untuk mengkritisi proses perlucutan senjata yang dalam realitasnya hanya diberlakukan bagi negara-negara tertentu. Perdamaian dan keamanan tidak akan pernah terealisasi secara nyata dalam kehidupan jika sebagian negara (apapun alasannya) masih terus menciptakan atau menyimpan alat-alat pemusnah massal dan penghancur dunia. Adanya persenjataan pemusnah yang dimiliki sebagian negara pasti

akan disikapi sebagai ancaman bagi negara lain. Pada gilirannya, negara-negara lain –dengan alasan demi keamanan (yang sebenarnya membuat kian tidak aman) –akan berupaya untuk menciptakan alat yang sejenis. Dengan demikian, keamanan dan kedamaian tidak lebih dari sekadar retorika belaka yang tidak pernah menyentuh realitas kehidupan.

Pada akhirnya, penolakan terhadap kekerasan serta upaya pengembangan kehidupan yang damai sangat tergantung kepada ketulusan hati nurani dan tanggung jawab seluruh umat manusia secara bersama. Selama kehidupan sebagian mereka masih diperbudak oleh kepentingan diri dan kelompok, serta mempertentangkannya dengan kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, selama itu pula celah-celah kekerasan akan terus membayang-bayangi kehidupan.

Sebaliknya, jika kita masing-masing telah mampu meletakkan kepentingan masyarakat luas dan umat manusia di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri, maka kedamaian dan kesejahteraan akan segera hadir menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan. ©

# PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENEGAKAN DEMOKRASI

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, dan kemudian terpilihnya lima pimpinan komisi disambut dengan berbagai tanggapan. Ada yang cukup optimistis dengan keberadaan komisi ini sehingga dalam jangka waktu antara lima sampai sepuluh tahun, komisi tersebut diprediksikan akan menghasilkan kerja yang cukup signifikan dalam memberantas korupsi di negara Indonesia. Selain itu, ada yang meragukan kemampuan KPK dalam "memerangi" praktik kotor yang sudah mengakar dan menggurita dalam berbagai lembaga tersebut.

Terlepas dari dua sikap yang berbeda itu, keberhasilan atau kegagalan KPK dalam melaksanakan tugasnya selain tergantung kepada kinerja yang harus ditampakkan, juga (hal yang tidak kalah pentingnya) sangat terkait dengan kondisi sosial-politik yang harus dikembangkan. Dalam konteks ini pemberantasan korupsi mensyaratkan adanya nilai-nilai demokratis yang harus membumi secara kokoh di bumi pertiwi.

Faktor terakhir ini perlu diperhatikan secara serius sebab keberlangsungan "perampasan" harta negara dan masyarakat dalam bentuk korupsi dan semacamnya itu memiliki kaitan erat dengan rendahnya pengembangan demokrasi substansial yang terjadi di negeri ini. Jika kita mau berjujur diri, sejauh ini demokrasi yang berjalan di negeri

kita tercinta masih lebih bersifat formal dan belum seutuhnya menyentuh makna demokrasi yang hakiki. Hal itu dapat dilihat dari keberadaan demokrasi yang –sampai batas tertentu –masih dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk meneguhkan *status quo*.

Para elit politik dan penguasa berlindung di balik nama mayoritas yang telah direkayasa sedemikian rupa untuk sekadar meraih atau melanggengkan kekuasaan yang selama ini digenggamnya. Pada saat yang sama, mereka dengan menggunakan media atau terma-terma hukum yang telah "dijinakkan" dan retorika keadilan yang *biased* berupaya lari dari tanggung jawab atas dosa-dosa sosial mereka yang sejatinya lambat laun menggerogoti keabsahan negara dan legitimasi pemerintahan.

Dalam kondisi semacam itu, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk melibatkan diri atau berpartisipasi dalam ikut mengontrol terhadap proses pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap upaya untuk masuk ke dalam proses itu, mereka akan terbentur pada formalisme *rigid* yang sudah diberi label demokrasi dan akan masuk ke ruang labirin yang tidak bertepi. Pada sisi itu, lembaga-lembaga demokrasi formal –legislatif, eksekutif, dan yudikatif –beserta segala bentuck derivasinya belum sepenuhnya dapat merealisasikan makna dan hakikat demokrasi yang substantif.

Kenyataan seperti itu merupakan bercak-bercak hitam yang terus mewarnai proses demokratisasi yang sedang berjalan di negara tercinta. Noda yang masih melekat pada kehidupan bangsa ini menjadikan demokrasi Indonesia berada dalam implimentasi yang sangat rendah dan sekadar berjalan di atas permukaan sehingga partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dan seumpamanya menjadi sangat lemah. Kondisi itu memberi peluang besar bagi berkembangnya korupsi, KKN dan sejenisnya.

***

Berpijak pada uraian sebelum ini, upaya kita, bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi dan perbuatan jahat lain yang senada meniscayakan seluruh komponen bangsa untuk menegakkan demokrasi secara sungguh-sungguh yang pada intinya merupakan "keterlibatan" aktif warga negara dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Dalam konteks itu, demokrasi mensyaratkan secara mutlak adanya keterbukaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Smolla (Tth: 65), pemerintahan yang demokratis seharusnya merupakan pemerintahan yang terbuka dan transparan secara luas, serta memiliki nilai-nilai pertanggungjawaban dan partisipasi yang demokratis.

Keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai nilai-nilai inti demokrasi mengindikasikan secara kuat bahwa demokrasi substansial senyatanya merupakan nilai-nilai moral yang berpijak kokoh pada ajaran agama substantif. Demokrasi sejati identik dengan komitmen penegakan moral. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa agama sebagai benteng moralitas –sebagaimana dijelaskan Soroush (2002: 222) –dapat bertindak sebagai penjamin terbaik bagi demokrasi.

Pada tataran itu, utang besar demokrasi terhadap agama terungkap secara nyata. Alhasil, demokrasi tidak bertentangan, apalagi memiliki nilai-nilai kekufuran terhadap agama. Justru keduanya saling memerlukan. Agama membutuhkan demokrasi untuk menegakkan nilai dan ajarannya dalam kehidupan sehingga kehadirannya benar-benar mencerahkan umat manusia; dan demokrasi tergantung kepada agama dalam rangka menghindarkan proses demokratisasi dan implementasinya ke dalam pembiasan dan reduksi.

Dengan demikian, keinginan bangsa (yang mayoritas terdiri dari umat Islam) untuk melenyapkan dan memberantas korupsi menjadi niscaya untuk meletakkannya di atas nilai-nilai demokrasi. Pemberantasan korupsi atau dan lainnya yang tidak didasarkan pada

prinsip-prinsip luhur itu hanya akan melahirkan kekerasan atau anarkisme, serta diyakini tidak akan pernah mematikan akar-akar kejahatan tersebut.

Pada ranah itu, KPK perlu memosisikan dirinya. Dalam ungkapan lain, komisi ini mutlak dituntut untuk mengembangkan seluruh rencana, kerja dan langkahnya di atas bingkai nilai-nilai demokrasi substansial. Komisi dituntut untuk menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam rencana yang strategis yang kemudian dikonkretkan ke dalam langkah-langkah operasional yang intens dalam bingkai kerja yang sistematis, serta holistik. Transparansi, misalnya, merupakan keharusan yang perlu dikembangkan KPK dalam menguak dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktik korupsi dan sejenisnya sehingga mendapat kepercayaan, dukungan, serta partisipasi penuh masyarakat luas.

Di atas semua itu, gerakan sosial anti korupsi dalam bentuk pengawasan dan tekanan-tekanan masyarakat terhadap pemerintah dan *class action* terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat –sebagaimana dinyatakan Teten Masduki (*Kompas*, 18/12/2003) – menjadi mutlak untuk dikembangkan.

Persoalannya, sejauh mana niat tulus dan komitmen kita semua, bangsa ini untuk menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai acuan pokok dalam membangun negara dan bangsa, serta meletakkanya dalam bingkai moral-agama yang substansial. Tanpa pengembangan dan pembumian demokrasi substansial, maka KPK hanya akan menjadi sebutir pasir di pantai yang sangat luas; eksistensinya tidak akan bermakna signifikan bagi pemberantasan korupsi, atau bahkan ia bisa terhanyut, ikut arus, dan larut dalam praktik-praktik kotor yang sejenis. ©

# *CIVIL RELIGION*, PENGEMBANGAN KEBERAGAMAAN INDONESIA KE DEPAN

Penarikan agama formal ke persoalan-persoalan yang bersifat publik ditengarai tampak kian menguat, terutana di Indonesia akhir-akhir ini. Gejala ini membuat sebagian orang khawatir, mengkritisi akan terjadinya dominasi agama formal yang rigid atas wilayah publik yang berdimensi plural dan terdiri dari elemen-elemen yang sangat beragam.

Dalam konteks Indonesia, kekhawatiran semacam itu tidak dapat diartikan sebagai penolakan kehadiran agama di ruang publik. Pada umumnya mereka yang mencoba mengkritisi itu menolak agama formalistik yang berwujud dalam otoritarianisme yang membelenggu sebagian (besar) tokoh agama dengan karakteristiknya yang *one sided truth claim*. Agama formalistik semacam ini cenderung sangat kaku, menolak komunikasi dialogis bukan hanya dengan penganut agama lain, tapi juga dengan penganut yang seagama tapi berbeda aliran.

Dalam realitasnya, manakala agama ini diusung ke ranah sosial, maka yang terjadi adalah pemaksaan atas nama Tuhan –dari yang halus hingga kasar –terhadap publik untuk mentaati segala aturannya. Setiap orang atau kelompok yang menolak dianggap melawan agama sehingga "atas nama agama" sah untuk didiskreditkan dalam beragam bentuknya. Pada sisi itu beragam persoalan muncul ke ruang publik, dari konflik yang tidak terselesaikan hingga pertentangan yang

bernuansa kekerasan. Bukan tidak mustahil bangsa ini akan menuju kehancurannya akibat berkembangnya keberagamaan yang tidak kondusif.

**Pelajaran bagi Indonesia**

Dalam perspektif sejarah modern, hubungan agama formal dengan negara memang sering menyulut persoalan krusial. Dalam suatu bangsa yang masyarakatnya pun relatif homogen dalam sisi agama, persoalan seputar itu tetap saja mengedepan. Untuk ini, Pakistan menjadi salah satu contoh paling konkret yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Kendati hampir seluruh elemen bangsa Pakistan pada saat berdirinya negara itu sepakat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, tapi masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam itu sendiri dengan aspirasi yang berbeda pula. Pandangan mereka tentang negara Islam Paksitan dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan etnis mereka yang sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain.

Akibatnya, selama dua dekade sejak kelahirannya Pakistan disarati dengan pertentangan antar berbagai kelompok yang tak kunjung padam. Pengesahan konstitusinya memakan waktu sekitar sembilan tahun. Bahkan pemisahan Pakistan menjadi dua tetap tidak dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas. Selama itu pula kekerasan terus mengiringi pertentangan yang terjadi.

Indonesia perlu belajar dari kasus semacam Pakistan. Sejatinya pada awal berdirinya republik ini, *the founding fathers/ mothers* telah melakukan terobosan kreatif, *enlighting*, yang berjangkauan sangat jauh ke depan. Ruang dialog yang terbuka lebar saat itu mengantarkan mereka untuk meletakkan Negara di atas dasar-dasar yang sangat kondusif bagi pluralitas kehidupan dan sekaligus pengembangan nilai-nilai asasi agama.

Sayangnya kita, bangsa ini, termasuk bangsa yang pelupa (atau berpura-pura lupa) dalam nyaris segala hal. Kita lupa apa yang telah kita janjikan. Kita secara retorik berjanji akan memperjuangkan kepentingan bangsa dan masyarakat, tapi tak lama kemudian kita hanya sibuk dengan urusan kita yang sempit, kepentingan kelompok dan sejenisnya. Kita tiap tahun memperingati hari kemerdekaan bangsa, tapi kita melupakan jasa-jasa pendahulu kita, serta kita lupa (mungkin berpura-pura?) untuk apa mereka berjuang mengorbankan jiwa raga mereka. Kita juga berpura-pura lupa tentang kemajemukan bangsa ini. Akibatnya, dari kelompok agama yang mayoritas ada yang memaksakan kehendaknya, dan dari yang minoritas ada yang licik, maunya menggunting dalam lipatan. Mereka lupa signifikansi solidaritas sosial untuk membangun Indonesia yang sejahtera.

**Pengembangan *Civil Religion***

Kekhawatiran akan terkoyak-koyaknya bangsa sama sekali bukan hal yang mengada-ada. Fenomena yang berkembang di sekitar kita memperlihatkan secara telanjang kemungkinan hal itu. Melihat kecenderungan yang ada, sangat mungkin jika salah faktor utamanya adalah keberagamaan (sekali lagi bukan agama) formalistik kaku yang mengabaikan nilai-nilai moral agama yang dianut sebagian kita.

Jika kita masih punya nurani, memiliki komitmen untuk kelangsungan hidup bangsa, serta tanggung jawab teologis atas kehidupan, maka tidak ada jalan lain selain kita mengembangkan keberagamaan kita menjadi *civil religion*. Memodifikasi secara kritis konsep Bellah (*Beyond Belief*, 1970), *civil religion* ini merupakan pola keberagamaan yang harus mampu menanamkan keimanan kokoh bagi para penganutnya sesuai dengan agama yang dianutnya, namun pada saat yang sama dapat mengantarkan mereka kepada *sense of crisis* terhadap kehidupan konkret.

Dengan sikap itu, mereka mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan moral universal yang disapih dari simbol-simbol agama serta dapat diterima di ranah publik melalui komunikasi kritis dan suasana dialogis, penuh kejujuran dan keterbukaan.

Pengembangan *civil religion* ini meniscayakan eliminasi –meminjam tawaran El Fadl (*Speaking in God's Name*, 2003) –terhadap otoritarianisme keagamaan dan pengembangan keotoritatifan. Sementara yang pertama cenderung menyamakan kehendak Yang Mutlak dengan kehendaknya sendiri, serta meminggirkan makna dan otonomi teks-teks suci (ajaran agama), maka yang terakhir lebih mengedepankan upaya untuk memahami dan mengekplor ide-ide Tuhan yang Mutlak tanpa bermaksud menyamakan diri sendiri dengan Tuhan. Pengembangan pemahaman agama yang otoritatif ini menuntut dari penganut agama sikap *honesty*, *diligence*, *comprehensiveness*, *reasonableness*, dan *self-restraint*.

Melalui sikap itu, para penganut agama dituntut untuk tanpa henti memperluas wawasan, serta berusaha memahami persoalan, realitas dan fenomena secara uruh dari berbagai dimensinya. Pada saat yang sama, mereka juga mengakui secara jujur keterbatasan diri mereka sehingga memunculkan keberagamaan yang rendah hati dan mengabdi kepada kepentingan manusia. Dengan demikian, kontastasi simbol-simbol agama dapat diminimalisasi, dan politasasi nama Tuhan dapat dihindari. Jutsru yang akan berkembang adalah kerjasama di antara para penganut agama untuk menegakkan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan, serta perjuangan melawan degradasi moral sosial, dari korupsi hingga kepemilikan kekuasaan. ©

# EPILOG
# MEMBANGUN KEBERAGAMAAN YANG TULUS

Sebagaimana dipaparkan sebelum ini, ada kesenjangan cukup lebar antara agama normatif di satu pihak, dan agama historis di pihak lain. Keberagamaan umat sebagai bentuk konkret agama historis saat ini belum berpijak secara kokoh pada normativitas agama; pada nilai-nilai dasar agama. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, mereka, para penganut agama telah meninggalkan nilai-nilai agama tersebut. Keberagamaan (dapat dikatakan) telah mengalami kemandulan dalam memberikan sumbangsih nyata dalam kehidupan.

Sebagai dampaknya, praktek-praktek kotor, konflik kekerasan, dan seumpamanya menjadi realitas keseharian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat beragama. Hal itu muncul dan berkembang nyaris tanpa sekat atau bahkan melekat kuat dengan praktik-praktik keagamaan formal. Misalnya saja, dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang terjadi pada tahun 2009 sebagian elit (agama) telah menjadikan simbol dan atribut keagamaan sebagai alat untuk mendukung salah satu partai, calon, atau pasangan, dan meminggirkan yang lain. Realitas ini tentu menohok dengan telak keberagamaan yang ada. Terbukti, mereka yang sarat dengan kibar-an simbol dan atribut agama ternyata tidak dapat meraih suara yang signifikan. Ironisnya, kendati dari saat ke saat pola itu hampir tidak berpengaruh sama sekali dalam membentuk opini publik, dan

memaksa masyarakat untuk mematuhi mereka, para elit agama tetap asyik untuk selalu mempermainkan agama.

Tentunya kondisi sejenis itu tidak bisa dibiarkan terus hadir, apalagi akan menguat. Tragedi keberagamaan tersebut (jika boleh disebut demikian) telah menjadi semacam fatwa otoritatif yang sangat *burhani* yang meminta kesadaran para elit untuk menjadikannya sebagai pelajaran yang sangat berharga. Dari potret buram itu, mereka diminta untuk merumuskan kembali pola keberagamaan mereka.

Konkretnya, upaya pengembalian agama ke ranah asalnya menjadi keniscayaan yang tidak bisa diperdebatkan kembali. Keberagamaan perlu ditegakkan kembali dalam bingkai nilai dasar agama yang seutuhnya bersifat etika-moral. Agama harus menjadi media pencerahan kehidupan dalam arti yang sebenarnya; dan sebagai pembenar bagi tindakan yang menghancurkan kehidupan dan merugikan umat manusia.

Sejatinya pengembalian agama ke ranah asalnya sebagai sumber moralitas untuk dijadikan rujukan mereka dalam menjalani kehidupan dalam berbagai aspeknya, merupakan hal yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Modal dasarnya "hanya" berupa ketulusan untuk beragama. Para umat beragama perlu menyadari tujuan asasi beragama adalah untuk mengasah dan menajamkan nurani. Untuk itu, ajaran agama perlu disikapi dan diletakkan dalam kerangka perspektif tersebut. Melalui pembacaan dan pemahaman agama seperti itu, mereka diharapkan mampu melihat dan menyikapi kebaikan sebagai kebaikan, dan kejahatan sebagai kejahatan. Pada gilirannya, mereka berupaya untuk selalu berada dalam kebaikan, dan di saat yang sama menghindari sejauh mungkin kejahatan dan segala turunannya.

Dari ketulusan itu diharapkan muncul derivasinya yang sangat beragam, dari kerendahatian hingga kejujuran. Berdasarkan nilai moralitas ini, setiap pemeluk agama akan menyadari bahwa

keberagamaan mereka sejatinya selalu berangkat dan pasti merujuk kepada pandangan keagamaan yang dihasilkan dari proses penafsiran dan pemahaman atas agama normatif. Dalam ungkapan lain, keberagamaan tidak bisa disamakan dengan agama itu sendiri. Keberagamaan tidak lebih dari sekadar upaya manusia untuk mendekati kebenaran yang hakiki. Karena itu, keberagamaan tidak akan pernah mengalami finalitas. Kondisi ini mengharuskan kesediaan mereka untuk melakukan penelanjangan diri terhadap kekurangan pemahaman keagamaan mereka dan kelemahan dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Dengan demikian, keangkuhan beragama dalam segala bentuknya yang sering menimpa sebagian umat beragama dewasa ini dapat dihindari. Minimal, mereka tidak akan selalu jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama berkali-kali.

Kondisi itu akan memunculkan dalam diri mereka sikap mau belajar dari siapa pun, dari sumber mana saja dan di saat kapan pun. Keberagamaan menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan untuk mengakui secara arif kekurangan diri sendiri, dan sekaligus mengapresiasi dengan kritis kelebihan orang atau umat lain.

Dalam konteks Indonesia, elit atau pemuka agama mutlak harus menjadi garda depan dalam pengembangan keberagamaan seperti itu. Untuk itu, mereka dituntut untuk tidak memperalat agama dalam segala bentuknya. Kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat yang diletakkan di atas nama atau simbol agama sejauh mungkin harus mereka hindari. Mereka sudah waktunya untuk berani bersikap jujur kepada diri sendiri bahwa rekayasa agama untuk sekadar menjadi justifikasi sama sekali tidak memiliki landasan dalam sumber otentik agama. Selain itu, hal yang demikian juga bertentangan dengan ajaran moral agama.

Ada beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian bersama agar keberagamaan fungsional dan transformatif itu menjadi realitas konkret; dan bukan sekadar angan-angan yang ada di langit tak

terjangkau. *Pertama*, organisasi keagamaan perlu menyegarkan kembali komitmen untuk seutuhnya memfokuskan kiprah organisasi dalam pemberdayaan dan "pencerdasan" keagamaan masyarakat. Program dan kegiatannya hendaknya diarahkan kepada pengembangan dan perluasan horizon keagamaan umat dan sekaligus penubuhan moralitas keagamaan substantif dalam kehidupan. Dalam tataran itu pula, organisasi keagamaan mana pun diharapkan tidak terpancing dengan pesona-pesona sesaat yang akan bisa memudarkan visi organisasi, semisal tarikan ke dunia politik kekuasaan.

Kedua, partai politik, dan lembaga yang lekat dengan politik kekuasaan harus bersikap lebih dewasa dan mengembangkan sikap *fairness* dengan tidak menjadikan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendukung program dan meraih tujuannya. Pencarian dukungan hendaknya dikembangkan melalui tawaran-tawaran program realistis, *reasonable* dan benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

Ketiga, sejalan dengan itu pendidikan agama di berbagai tingkatan dan bidang perlu dirumus-ulang menjadi pendidikan yang bernilai signifikan dan fungsional bagi *stakeholders* dan kehidupan. Untuk itu, perlu ada penelaahan ulang yang holistik terhadap pendidikan agama serta segala aspek dan unsur yang berkaitan dengan itu. Bahan ajar, metode pembelajaran, evaluasi dan sebagainya mutlak dikritisi dan direformulasi untuk diarahkan sesuai dengan visi agama masing-masing.

Mudah-mudah kita masih memiliki komitmen untuk melakukan reformulasi keberagamaan kita dan menjadikannya lebih bermakna. Tanpa itu, agama tanpa penganut dalam artian telanjang dan sebenar-sebenarnya akan menjadi realitas yang sama sekali tidak bisa dipungkiri siapa pun juga.

# DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan*, Terjemahan, Cetakan II, Jakarta – Bandung: PT Serambi Ilmu Semesta- Penerbit Mizan, 2001.

Barney Gerald O., *Global 2000 Revisited: What Shall We Do*, http://www.milleniuminstitute.net

Barney, Gerald O., *Global 2000 Revisited: What Shall We Do*, http://www.milleniuminstitute.net

Bell, Catherine, *Ritual: Perspectives and Dimensions*, Oxford – New York: Oxford University Press, 1997.

Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World*, New York, Evanston, dan London: Harper & Row, Publishers, 1970

Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Jakarta: PT Gramedia, 1983.

Cassonova, José, *Public Religions in the Modern World*, Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1994.

Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Cetakan I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Darmaputera, Eka, "Perbandingan Agama: Memperbandingkan atau Mempertandingkan ?", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Cetakan II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Eaton, Charles Le Gai, "Manusia" dalam Seyyed Hossein Nasr (ed.), *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*, Terjemahan, Cetakan I, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

Edwards, Peter, "The Future of Ethics" dalam Oliver Leaman (ed.), *The Future of Philosophy towards the 21st Century*, London: Routledge, 1998.

Elshtain, Jean Bethke, *Democracy on Trial*, New York: BasicBooks, 1995.

Euben, Roxanne L., *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Terjemahan, Cetakan I, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2000.

Henderson Jr., Charles P., *God and Science: The Death and Rebirth of Theism*, Atlanta: John Knox Press.

IDEA, *Nestapa Pembangunan Sosial: Studi atas Dampak Beban Utang terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan*, Cetakan I, Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia, 2001.

Al-Jabiri, Muhammad Abid, *al-'Aql al-Akhlaqi al-'Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li Nazhm al-Qiyami fi al-Tsaqafah al-'Arabiyah*, Maghrib: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 2001.

Lubis, Muchtar, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Cetakan V, Jakarta: Yayasan Idayu, 198.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam IndonesiaI*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Masduki, Teten, "Antiklimaks KPK" dalam Harian *Kompas*, Kamis 18 Desember 2003.

Mönks, F. J. *et. al.*, *Psikologi Perkembangan:Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Nasr, Seyyed Hossein, *Ideals and Reality of Islam*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1975.

Pabottingi, Muchtar, "Politik Menyantuni Pluralitas" dalam Harian *Kompas*, Edisi Khusus Ulang Tahun ke-35, Rabu 28 Juni, 2000.

Panikkar, Raimundo, "Dialog yang Dialogis" dalam Ahmad Norma Permata (ed.), *Metodologi Studi Agama*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rahman, Fazlur, "Islamisasi Ilmu, Sebuah Respons", Terjemahan dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. III, No. 4, Th. 1992.

----------, "Persepsi tentang Masyarakat yang Diinginkan Dalam Agama yang Berbeda-beda: Kasus Islam", dalam *Islam Modern: Tantangan Pembaharuan Islam*, Kumpulan Artikel, Rusli Karim dan Hamid Basyaib (eds.), Cetakan Pertama, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1987.

----------, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

----------, *Islam*, Edisi Kedua, Chicago & London: University of Chicago Press, 1979.

----------, *Major Themes of the Quran*, Edisi Kedua, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, CetakanPertama, Bandung: Mizan, 1986.

Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Terjemahan, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cetakan V, Jakarta: ANteve – Penerbit Mizan, 1999.

Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramci*, Cetakan II, INSIST-Pustaka Pelajar, 2000.

Sindhunata, "Setitik Nyala dalam Kegelapan" Rubrik Tanda-Tanda Zaman dalam Jurnal *Basis*, Nomor 09-10, Tahun ke-50, September-Oktober 2001.

Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Bandung: Mizan, 2002.

Smolla, Rodney A., "Hak Masyarakat untuk Tahu: Transparansi di dalam Lembag-Lembaga Pemerintahan" dalam Jurnal Demokrasi, Office of International Information Programs U.S. Departement of State, Tth.

Stenger, Mary Ann, "Religious Pluralism and Cross-Cultural Criteria of Religious Truth" dalam Thomas Dean (ed.), *Religious Pluralism and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*, Albany: State University of New York Press, 1995.

Tibbi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, Cetakan II, Boulder, San Francisco, & Oxford: Westview Press, 1991.

----------, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998.

Yusuf Ali, Abdullah, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Maryland: Amana Corporation, 1989.

***SUMBER TULISAN***

BAGIAN PERTAMA: AGAMA TANPA PENGANUT: MEMUDARNYA NILAI-NILAI MORAL

Kehidupan Kontemporer dalam Teologi yang Mandul (*Kompas*, Jumat 9 November 2001)

Agama Tanpa Penganut, (*Kompas*, Jumat 6 September 2002)

Menyoal Keberagamaan Dominan (*Kompas*)

*Islam And Theology Of Power* Dalam Konteks Indonesia (*Kompas*)

Kekerasan, Sumbangan Modernisasi dan Fundamentalisme Agama, (*Kompas*, Jumat 1 Februari 2002)

Menurunnya Kualitas Manusia dan Ancaman Kekerasan di Masa Depan, (*Kompas*, Sabtu 19 Juli 2003)

Kejujuran, Moralitas Bangsa yang Tergadaikan (*Kompas*, Senin 27 Mei 2002).

Infantilisme Bangsa (*Kompas*.)

Budaya Politik dalam Dunia Pendidikan (*Jawa Pos*)

BAGIAN KEDUA: PEMBACAAN KEMBALI SIMBOL DAN RITUAL AGAMA

Keberagamaan Umat Dan Signifikansi Teologi Kritis (*Kompas*, Jumat 26 November 2004)

Dari Konflik Menuju Dialog yang Dialogis (*Kompas*)

Signifikansi Peringatan Maulid (*Kompas*, Sabtu 8 April 2006)

Signifikansi Isra' Mi'Raj Dalam Konteks Kekinian (*Kompas*)

Puasa Bersama Kaum yang Terpinggirkan (*Kompas*)

Puasa, Teologi Pengendalian Menuju Civil Society yang Bermoral. (*Kompas*, Ahad 10 November 2002)

Halal Bihalal: Mengukuhkan Misi Damai Agama (*Jawa Pos*, 6 November 2006)

Mudik, Mengais Spiritualitas (*Jawa Pos*.)

Idul Adha, Napak Tilas Monoteisme Sebagai Sumber Moralitas (*Kompas*, Selasa 11 Februari 2003)

Mengembangkan Pendidikan Agama yang Mencerahkan (*Kompas*)

BAGIAN KETIGA: MEMBACA KEMBALI AGAMA: PENGEMBANGAN DEMOKRASI, DAN CIVIL SOCIETY

Nilai-Nilai Moral: Kekuatan Melawan Perang Dan Kekerasan (*Kompas*)

Urgensi Mengembalikan *American Civil Religion* Ke Visinya yang Transformatif (*Kompas*, Selasa 8 April 2003)

Moralitas Demokrasi-Teologis, Kekuatan Melawan Kekerasan yang Dehumanistik (*Kompas*, Jumat 24 Mei 2003)

Pemberantasan Korupsi Melalui Penegakan Demokrasi (*Kompas*)

*Civil Religion*, Pengembangan Keberagamaan Indonesia Ke Depan (*Jawa Pos*)

# PROFIL PENGARANG

Abd A'la, kelahiran Sumenep, 5 September 1957. Masa SD-SMA dihabiskan di Madrasah Annuqayah Sumenep. Kuliah S1 di Fak. Sastra IAIN Sunan Ampel Surabaya dan melanjutkan S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah. Disertasinya berjudul 'Pandangan Teologi Fazlur Rahman (Studi Kritis tentang Pembaruan Teologi neoModernisme)' dengan promotor Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA dan Dr. H. Muslim Nasution. Dengan spesialisasi ilmu Sejarah perkembangan pemikiran Islam, Abd A'la dikukuhkan sebagai Guru Besar Fak Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 17 Mei 2008. Di tahun 2003, pernah mengikuti Workshop Islam and Civil Society, selama satu bulan di Amherst, Massachusset, USA.

Terlibat dalam beberapa penelitian (di antaranya) : Karakteristik NeoModernisme Fazlur Rahman (1995), Menguak Metodologi Aliran Mu'tazilah (2002), Pendidikan Kedamaian dalam Masyarakat Madura (sebagai konsultan, 2002), Karakteristik Diskursus Islam Kontemporer (2003), dan Genealogi Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri (IAIN Sunan Ampel, 2008).

Pengalaman organisasi: sebagai aktivis dan konsultan dalam Konsorsium Keadilan dan Kedamaian (KKK), Malang, tahun 2002-sekarang. Aktivis Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Surabaya, tahun 2005 hingga sekarang, anggota National Board pada

International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta, 2003 sampai sekarang, hingga anggota paripurna Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2007-2009 (non-aktif).

Tulisan-tulisannya dapat dijumpai dalam buku, bunga rampai, hingga artikel dan kolom di surat kabar Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Jawa Pos, Republika, dll. Beberapa buku yang ditulisnya : Melampaui Dialog Agama, Kumpulan Tulisan Opini Kompas, Penerbit Kompas (2002), Dari Neomodernisme ke Islam Liberal, Paramadina (2003), Pembaruan Pesantren, Pustaka Pesantren, LKiS, (2006), dan menjadi tim penulis dalam Praksis Pembelajaran Pesantren, LkiS (2007). Atas produktivitasnya menulis, beliau mendapat penghargaan sebagai dosen terbaik dalam karya tulis ilmiah di lingkungan perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia tahun 2004.Tahun 2007, Abd A'la mendapat penghargaan sebagai dosen teladan di lingkungan perguruan tinggi Islam se-Indonesia.

Setelah menjabat sebagai Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005-2009), saat ini Abd A'la menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan SDM IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009-13).

Keberagamaan tidak lebih dari sekadar upaya manusia untuk mendekati kebenaran yang hakiki. Karena itu, keberagamaan tidak akan pernah mengalami finalitas. Kondisi ini mengharuskan kesediaan mereka untuk melakukan penelanjangan diri terhadap kekurangan pemahaman keagamaan mereka dan kelemahan dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Dengan demikian, keangkuhan beragama dalam segala bentuknya yang sering menimpa sebagian umat beragama dewasa ini dapat dihindari. Minimal, mereka tidak akan selalu jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama berkali-kali.

**Abd A'la**

**IMPULSE** adalah lembaga studi yang menjembatani tataran akademis dengan dunia praksis atas problem multikultur dalam ruang publik. Elaborasi akar epistemologis multikulturalisme dan pluralisme dilakukan melalui pendekatan struktural demi menghasilkan kajian yang komprehensif. Pengembangan wacana multikulturalisme dan pluralisme dilakukan melalui penerbitan buku, light research, fellowship, kegiatan sekolah, diskusi, short course, dan orasi budaya.

ISBN 978-979-21-2466-8

Penerbit Kanisius
Jl. Cempaka 9, Deresan
Yogyakarta 55281